



*Pendidikan Agama Islam
pada Sekolah Menengah*



H. ABDULLAH B

Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah Menengah

H. ABDULLAH B.

**Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Menengah
Abdullah B.**

Editor **Abdurrahman Wahid Abdullah**

Tata Letak **Umaima**

Desain Cover **M. Aidil Aditya H.S.**

ISBN **978-623-6622-11-7**

Diterbitkan oleh **IAIN Parepare Nusantara Press**

Alamat: Jln. Amal Bakti No. 9, Kel. Lembah Harapan Kec.
Soreang, Parepare 91131.

Hak Cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektris maupun mekanis, termasuk memfotokopi, merekam atau sistem penyimpanan lainnya tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit.

Copyright @ IAIN Parepare Nusantara Press, 2020



Kata Pengantar

Puji syukur ke hadirat Allah swt, atas rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa diperuntukkan kepada hamba-hamba-Nya. Shalawat dan salam kepada Rasulullah saw. dan juga kepada keluarga, sahabat, serta orang-orang yang mengikuti risalahnya.

Dewasa ini, problematika dalam dunia pendidikan semakin terang. Begitu banyak kasus yang terbit di permukaan melalui corong media. Yang paling banyak adalah pemberitaan yang masif mengenai kegagalan proses pendidikan kita dalam melahirkan output yang diharapkan. Ini bisa saja akan membawa dampak buruk bagi dunia pendidikan. Bagi praktisi pendidikan, tentunya hal ini merupakan tugas yang sebaiknya segera dibenahi sesuai amanat Undang-undang tentang sistem pendidikan nasional yang secara jelas telah menyampaikan bahwa tujuan pendidikan yang secara sederhana adalah *ta'nisul insan* atau memanusiakan manusia.

Fakta-fakta negatif yang terjadi di lapangan sebagaimana yang diberitakan justru seharusnya memantik

kesadaran kita untuk segera bertindak. Sejauh ini pemerintah sebagai stakeholder telah melakukan upaya semaksimal mungkin meski belum menyentuh sampai ke akar permasalahan. Masalah yang kompleks memang tidak bisa diselesaikan oleh satu peran saja. Begitupun persoalan pendidikan yang melibatkan begitu banyak peran. Untuk menyelesaikannya dibutuhkan kolaborasi dan sinergitas di antara peran-peran tersebut.

Salah satu usaha kongkrit yang dilakukan adalah dengan menawarkan pengajaran keagamaan dalam materi ajar kurikulum pendidikan kita, terutama pada jenjang dasar sampai menengah atas. Dimana targetnya adalah pada pembentukan kecerdasan afektif peserta didik. Konsentrasi pendidikan kita memang tidak hanya pada pengembangan aspek kognitif saja, namun langkah ini merupakan sebuah penekanan bahwa aspek afektif juga harus mendapat perhatian agar output tidak hanya matang di satu aspek, seperti berilmu namun tidak beradab, begitupun sebaliknya.

Pendidikan keagamaan di sekolah sudah pasti disesuaikan dengan kepercayaan yang dianut oleh peserta didik. Dan arahnya sama, yaitu membentuk peserta didik yang berbudi luhur dan berakhlakul karimah kepada siapa dan apa saja. Pendidikan keagamaan atau pendidikan Islam bagi peserta didik muslim adalah bekal untuk menghadapi sejuta tanda tanya di kemudian hari. Dengan bekal tersebut, mereka akan tenang menyikapi segala persoalan, bagaimanapun situasinya.

Pelaksanaan pendidikan agama Islam, baik itu sekolah negeri maupun sekolah swasta memiliki tujuan yang sama namun memiliki karakteristik masing-masing. Dari sekian perbedaan yang dipaparkan secara detail dalam buku ini, kedua jenis lembaga tersebut sama-sama melakukan pengembangan pendidikan agama yang ditanamkan pada lingkup pendidikan keluarga dan lingkungan. Pembiasaan juga dilakukan untuk melatih siswa dalam mengamalkan ajaran Islam, menjalankan ibadah dan berbuat baik. Selain pentingnya menanamkan pendidikan Islam (Pendidikan keagamaan yang orientasinya ke peserta didik muslim) sebagai upaya preventif, konsen tulisan ini juga mengarah pada pendidikan yang sebaiknya ditanamkan di masa-masa sekolah pada jenjang menengah atas.

Pola pendidikan agama Islam pada sekolah menengah dipilih sebab pada usia remaja atau di usia transisi menuju dewasa adalah penentu bagaimana kelanjutan nasib bangsa. Sebagai generasi, kesiapan mereka dibutuhkan karena selanjutnya adalah era mereka. Kontribusi yang ditorehkan oleh tangan-tangan mereka merupakan sumbangsih utama jalannya peradaban bangsa ini ke depan.

Semoga apa yang disajikan dalam buku ini bisa memberi kebermanfaatn dan keberkahan bagi siapapun. Tidak dinafikan bahwa masih begitu banyak kesalahan dalam penyusunan dan penyajian. Namun sebuah kesyukuran karena pada akhirnya buku yang merupakan ikhtisar dari

penelitian studi doktoral kami ini bisa dirampungkan. Kami memohon maaf sedalam-dalamnya, jika dalam penulisan maupun ide didalamnya terdapat kekeliruan. Berikut saran, kritikan, maupun masukan sangat kami nantikan.

Parepare, September 2020

Penulis



Daftar Isi

Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi.....	ix
Komparasi Sekolah Swasta dan Negeri.....	1
Teori Dasar Pembelajaran Agama Islam	29
Ruang Lingkup Pendidikan Agama Islam.....	51
Karakteristik Pelajaran Pendidikan Agama Islam.....	65
Model-model Pengembangan Pembelajaran	
Pendidikan Agama Islam	87
Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam.....	101
Perbandingan Pelaksanaan Pendidikan Agama	
Islam pada Sekolah Menengah Negeri/Swasta.....	147
Daftar Pustaka.....	191



Komparasi Sekolah Swasta dan Negeri

Pada masa awal kemerdekaan, pemerintah dan bangsa Indonesia telah mewarisi sistem pendidikan dan pengajaran yang dualistis, yaitu: pertama, sistem pendidikan dan pengajaran pada sekolah-sekolah umum yang sekuler, tak mengenal ajaran agama, yang merupakan warisan dari pemerintah kolonial Belanda, dan kedua, sistem pendidikan dan pengajaran Islam yang tumbuh dan berkembang di kalangan masyarakat Islam sendiri, baik yang bercorak *isolative-tradisional* maupun yang bercorak sintesis dengan berbagai variasi pola pendidikannya.¹

Salah satu corak pengembangan pendidikan Islam sebelum Indonesia merdeka ialah bercorak *isolative-tradisional*, dalam arti tidak mau menerima apa saja yang berbau Barat (Kolonial) dan terhambatnya pengaruh pemikiran modern dalam Islam untuk masuk ke dalamnya, sebagaimana tampak

¹Muhaimin, *Rekonstruksi Pendidikan Islam dari Paradigma Pengembangan, Manajemen, Kelembagaan Kurikulum hingga Strategi Pembelajaran* (Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h. 76.

jelas pada lembaga pendidikan Islam yang hanya menonjolkan ilmu-ilmu agama Islam dan pengetahuan umum sama sekali tidak diberikan. Hakikat pendidikan Islam adalah sebagai upaya melestarikan dan mempertahankan khazanah pemikiran ulama terdahulu. Tujuan utama pendidikannya adalah menyiapkan calon-calon kiai atau ulama yang hanya menguasai masalah agama semata.²

Corak pelaksanaan pendidikan Islam yang berusaha mempertemukan antara corak lama (model pesantren) dan corak baru (model pendidikan Kolonial atau Barat) yang berwujud sekolah. Hasil pengamatan penulis menunjukkan bahwa corak pemikiran yang berkembang dalam berbagai variasi, yaitu: **pertama**, pola pengembangan pendidikan madrasah mengikuti format pendidikan Barat terutama dalam sistem pengajarannya secara klasikal, tetapi isi pendidikan tetap lebih menonjolkan ilmu-ilmu agama Islam; **kedua**, pola pengembangan pendidikan madrasah yang mengutamakan mata pelajaran agama, tetapi mata pelajaran umum secara terbatas juga diberikan; **ketiga**, pola pengembangan pendidikan madrasah yang menggabungkan secara lebih seimbang antara muatan-muatan keagamaan dan non keagamaan; dan **keempat**, pola pengembangan pendidikan sekolah yang mengikuti pola *gubernemen* (pemerintahan

²Muhaimin, *Rekonstruksi Pendidikan Islam dari Paradigma Pengembangan, Manajemen, Kelembagaan Kurikulum hingga Strategi Pembelajaran*, h. 77.

kolonial) dengan ditambah beberapa mata pelajaran agama.³

Kedua corak pendidikan yang ada pada awal masa kemerdekaan tersebut di atas sering dianggap saling bertentangan serta tumbuh dan berkembang secara terpisah satu sama lain. Sistem pendidikan dan pengajaran yang pertama pada mulanya hanya menjangkau dan dinikmati oleh sebagian kalangan masyarakat, terutama kalangan atas saja, sedangkan yang kedua (sistem pendidikan dan pengajaran Islam) tumbuh dan berkembang secara mandiri di kalangan rakyat dan berurat akar dalam masyarakat. Hal ini diikuti oleh Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP) dalam usul rekomendasinya yang disampaikan pada pemerintah, tentang rencana pokok-pokok pendidikan dan pengajaran baru, pada 29 Desember 1945).⁴

Pendidikan Islam sesudah kemerdekaan semakin berkembang. Hal tersebut ditandai dengan lahirnya kerja sama antara Kementerian Agama dengan Kementerian Pendidikan Nasional dan Kebudayaan untuk memasukan mata pelajaran agama pada sekolah umum, mulai dari SD sampai Perguruan Tinggi. Pada tahap awal pendidikan agama di sekolah umum terkesan seolah-olah kurang penting. Namun setelah keluarkannya Tap MPR RI No. XXVII/MPR-

³Achmadi, *Ideologi Pendidikan Islam* (Cet.I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 147.

⁴Muhaimin, *Rekonstruksi Pendidikan Islam dari Paradigma Pengembangan, Manajemen, Kelembagaan Kurikulum hingga Strategi Pembelajaran*, h. 78.

RI/1996 dan setelah diberlakukannya Undang-Undang RI No. II tahun 1989 dan peraturan pemerintah No. 28 dan 29 Tahun 1990 dan begitu juga lebih ditegaskan dan diperkuat lagi kedudukan pendidikan agama itu pada UU RI No XX tahun 2003 pasal 12. Dari Undang-Undang dan peraturan tersebut menggambarkan betapa pendidikan agama di sekolah memiliki kedudukan yang amat penting.⁵

Lembaga pendidikan Islam tidak kalah populernya adalah madrasah. Madrasah pada awal Indonesia merdeka sampai lahirnya keputusan bersama SKB tiga menteri tahun 1975 menitikberatkan pada pengajaran ilmu agama, dan sedikit mata pelajaran umum. Dampak madrasah tidak memiliki kesetaraan dengan sekolah umum dalam hal melanjutkan studi. Tamatan madrasah tidak diperkenankan melanjutkan studi ke perguruan tinggi umum, karena dianggap ijazahnya tidak memiliki persyaratan untuk itu. Setelah keluar SKB tiga menteri maka salah satu sub yang paling substansial adalah kesamaan dan kesetaraannya dengan sekolah umum. Dengan demikian tamatan madrasah dapat melanjutkan studinya ke perguruan tinggi umum dalam berbagai bidang keilmuan baik yang tergolong ilmu kealaman, sosial maupun humaniora. Berkenaan dengan itu, maka disempurnakanlah struktur kurikulum madrasah yang pada mulanya sebelum lahirnya SKB 3 menteri terkonsentrasi pada pengembangan ilmu-ilmu

⁵A. Susanto, *Pemikiran Pendidikan Islam* (Cet. I: Jakarta: Amzah, 2009), h. 3 - 4.

agama. Dan setelah lahirnya SKB tiga menteri struktur kurikulum terjadi perubahan muatan yaitu 70 % umum dan 30 % agama.⁶

Dalam perjalanan memasuki era globalisasi saat ini, kesadaran global tentang peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui Pendidikan dan menempatkan manusia sebagai titik sentral pembangunan tampak semakin jelas, pengaruh budaya global dalam kehidupan umat manusia semakin dominan. Kondisi demikian meniscayakan lembaga pendidikan baik berstatus negeri maupun berstatus swasta membangun paradigma yang memadai dan mampu berkompetisi dengan bangsa lain yang pada akhirnya luaran sekolah tersebut dapat eksis dalam percaturan global.⁷

Sekolah negeri maupun swasta sama-sama ada yang berkualitas bagus, sedang, dan rendah. Belajar di sekolah negeri atau swasta memang mempunyai paradigma yang berbeda bagi para peserta didiknya. Di pedesaan, biasanya sekolah negeri begitu banyak diminati karena biaya pendidikan yang relatif terjangkau. Sedangkan di kota-kota besar, sekolah swasta justru diminati karena fasilitas dan ketercapaian kompetensi peserta didik yang telah terbukti bagus. Polemik tentang perbedaan sekolah negeri dan sekolah swasta tidak jarang pula masyarakat yang tidak tahu menahu

⁶A. Susanto, *Pemikiran Pendidikan Islam*, h. 3 - 4.

⁷Suyanto, *Refleksi dan Reformasi Pendidikan di Indonesia* (Cet. I; Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2009), h. 13.

akhirnya mengambil kesimpulan sepihak yang mengatakan bahwa sekolah negeri lebih baik dari sekolah swasta demikian pula sebaliknya. Minimnya informasi yang diperoleh merupakan salah satu faktor pengambilan kesimpulan sepihak.⁸

Sekolah negeri maupun sekolah swasta memiliki karakteristik mereka sendiri, sehingga dengan karakteristik masing-masing akan menampilkan perbedaan antara yang satu dengan yang lain. Pelaksanaan pendidikan agama Islam, baik itu sekolah negeri maupun sekolah swasta memiliki tujuan yang sama seperti yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan cara dan karakteristik masing-masing, sekolah negeri dan sekolah swasta tentu telah berupaya untuk mencapai tujuan tersebut.

Perbedaan sekolah negeri dan swasta dapat dilihat dari faktor-faktor sebagai berikut:

1. Tingkat perhatian dan perlakuan guru terhadap murid di kelas

Untuk hal ini, sekolah negeri akan kalah jauh dibandingkan sekolah swasta dikarenakan jumlah murid yang sangat banyak dalam satu kelasnya untuk sekolah negeri. Rata-rata murid di setiap kelas untuk sekolah negeri berkisar antara 40-45 orang. Hal ini mengakibatkan guru

⁸ Suyanto, *Refleksi dan Reformasi Pendidikan di Indonesia*, h. 13.

tidak dapat memperhatikan tiap muridnya secara baik, sehingga apabila ada murid yang mempunyai masalah yang unik dalam memahami pelajaran, maka hal ini tidak dapat diakomodir oleh guru yang bersangkutan dengan baik.⁹

Semua peserta didik di sekolah negeri mendapatkan perlakuan yang sama tanpa memperhatikan minat dan bakatnya. Sementara di sekolah swasta perhatian terhadap perkembangan dan kemajuan prestasi peserta didik lebih menonjol. Hal ini disebabkan karena pada umumnya jumlah peserta didik di sekolah negeri jauh lebih banyak dari pada di sekolah swasta.¹⁰ Wajar jika sekolah negeri kewalahan jika harus memonitor satu-satu peserta didiknya. Di sekolah swasta perhatian guru pada peserta didik sangat baik karena jumlah siswa sangat terbatas dalam satu romber yang hanya berkisar 25-30 orang sehingga dapat terpatu secara keseluruhan dengan baik pada setiap pembelajaran disampin perhatian guru sangat tinggi karena ia mendapatkan gaji dari pembayaran SPP peserta didik yang dikelola oleh yayasan karena mereka rata-rata guru swasta, sedangkan di sekolah Negeri rata-rata gurunya dari pegawai negeri.

2. Guru atau pengajar

Sekolah negeri tentu mempunyai tenaga pendidik yang

⁹ Suyanto, *Refleksi dan Reformasi Pendidikan di Indonesia*, h. 14.

¹⁰ Suyanto, *Refleksi dan Reformasi Pendidikan di Indonesia*, h. 13.

terspesialisasi dalam bidangnya. Ditambah, umumnya guru di sekolah negeri dibiayai oleh negara, alias PNS. Bandingkan guru di sekolah swasta pada umumnya yang harus bekerja sambilan untuk menutupi kebutuhan dasar hidupnya. Dari hal tersebut menindikasikan bahwa sekolah negeri lebih unggul dari sekolah swasta. Dengan kelebihan-kelebihan sekolah negeri tersebut justru terjadi ironi. Banyak sekolah negeri yang membebankan biaya sangat tinggi atas nama kualitas mereka.¹¹ Di sisi lain tidak menutup kemungkinan ada sekolah swasta khususnya di Kabupaten Pinrang yang kualitas pendidikan agamanya lebih bagus dibanding sekolah negeri.

Di sekolah negeri, hampir semua guru dan karyawan yang bekerja berstatus sebagai pegawai negeri sipil yang pendapatannya jauh lebih tinggi ketimbang mereka yang bekerja di sekolah swasta. Hal ini juga merupakan sebuah faktor yang mempengaruhi jumlah guru di sekolah swasta kurang dan tidak sedikit sekolah swasta yang ada di negeri ini kekurangan guru. Persoalan seperti ini tidak bisa dianggap sepele karena akan berpengaruh terhadap kualitas peserta didik.¹²

3. Pola Pengajaran dan Program serta Kurikulum

Sekolah negeri memakai pola pengajaran yang sangat

¹¹ Yusuf al-Qardhawi, *Pendidikan Islam dan Madrasah*, Terj, Bustami A.Gani dan Zainal Abidin Ahmad (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), h. 39.

¹² Suyanto, *Refleksi dan Reformasi Pendidikan di Indonesia*, h. 16.

statis, Materi yang diberikan oleh guru dari sekolah negeri cenderung disampaikan dalam format satu arah atau *feedback*, artinya guru berceramah kepada peserta didik dan tidak ada timbal balik yang terjadi antara murid dan guru. Tidak seperti sekolah swasta yang biasanya memakai pola pengajaran secara dinamis. Hal ini akan sangat berbeda sekali dengan sekolah swasta yang penyampaian materi pelajaran biasanya disampaikan dalam bentuk diskusi antara guru dengan murid.¹³

Sekolah negeri, baik pada Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI) maupun bukan, mau tidak mau harus menggunakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang telah di standarisasi oleh Kemdiknas, sedangkan sekolah swasta umumnya menggunakan kurikulum klasik sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikannya, seperti kurikulum buku *Kifayatul Akhyar*, *Tanwirul Qulub* dan lain-lain, khususnya swasta yang berbarengan dengan pesantren seperti SMA Al Mazakirah Baramuli Pinrang.

4. Cara belajar

Peserta didik di SMA swasta banyak melakukan diskusi dengan guru, presentasi di depan kelas, berdebat dan beradu argumentasi. Hal ini menyebabkan murid sekolah swasta pandai dalam menyampaikan pendapatnya, sementara

¹³ Suyanto, *Refleksi dan Reformasi Pendidikan di Indonesia*, h. 17.

peserta didik sekolah negeri belajar dengan cara menghafal dan memahami materi dengan mendengarkan guru dan membaca text book. sehingga murid sekolah negeri susah menyampaikan pendapatnya dikarenakan cenderung pasif dalam belajar.¹⁴ Sekolah swasta proses pembelajarannya lebih bebas dan terbuka sedangkan sekolah negeri lebih kaku dan tertutup.

5. Persepsi masyarakat

Persepsi tersebut umumnya berdasar pada kualitas *output* atau kelulusan peserta didik suatu sekolah. Sehingga otomatis sekolah tersebut dianggap favorit oleh masyarakat dan menggiring para calon peserta didik baru untuk berbondong-bondong masuk ke sekolah tersebut. Namun demikian, persepsi sekolah favorit ini menggiring sebagian besar peserta didik yang memiliki nilai tinggi untuk mendaftar ke sekolah negeri. Akibatnya, pada proses pendaftaran sebaran nilai tidak merata, karena pemegang nilai tinggi terkonsentrasi pada sekolah negeri favorit. Akan tetapi keberhasilan sekolah tidak tergantung pada *input* peserta didik.¹⁵ Hal itu semua bergantung pada pihak sekolah dalam mengelola kurikulum dan proses pengajaran.

¹⁴ Hasan Langgulung, *Beberapa Pemikiran Tentang Pendidikan Islam* (Bandung: al-Ma'arif, 1980), h. 4

¹⁵ Hasan Langgulung, *Beberapa Pemikiran Tentang Pendidikan Islam*, h. 4.

6. Gengsi Orang tua

Orang tua hanya berpikir bahwa sekolah negeri memberikan gengsi bagi anak-anaknya. Karena itulah, para orang tua memaksakan dengan berbagai cara untuk anaknya bisa diterima di sekolah negeri. Tidak selalu sekolah swasta atau yang non favorit nilainya kalah dengan sekolah negeri yang dikenal favorit.¹⁶ Di samping itu sekolah negeri pembayarannya gratis di banding sekolah swasta.

7. Kualitas *Output*

Output pendidikan dalam arti kualitas nilai akademik peserta didik yang dihasilkan oleh sekolah swasta biasanya tidak perlu menutup mata akan hal ini, lebih baik dibandingkan dengan sekolah negeri. Sekolah-sekolah andalan peraih medali dalam olimpiade sains internasional mayoritas dari sekolah swasta dengan budaya akademik yang kuat.

8. Segi Biaya Pendidikan

Dengan predikat sekolah negeri, biaya masuk maupun biaya sumbangan pelaksanaan pendidikan (SPP) digratiskan dibandingkan sekolah swasta. Secara rasional hal ini tentu masuk akal karena sekolah negeri mendapat subsidi dari pemerintah sedangkan sekolah swasta tidak memperoleh subsidi tersebut sehingga biaya masuk maupun biaya SPP menjadi lebih mahal. Sekolah swasta yang tidak

¹⁶ Hasan Langgulung, *Beberapa Pemikiran Tentang Pendidikan Islam*, h. 4.

memperoleh subsidi sudah barang tentu akan menarik biaya masuk atau SPP lebih mahal karena pengadaan fasilitas tentunya harus ditanggung oleh pihak sekolah swasta itu sendiri tanpa bantuan dari pemerintah. Jadi dari segi ekonomi, ada alasan yang logis mengapa biaya yang dikeluarkan untuk masuk di sekolah negeri dan sekolah swasta itu berbeda.¹⁷

Hal inilah yang mendorong para orang tua menyekolahkan anaknya di sekolah negeri karena biaya pendidikannya yang relatif terjangkau. Maklum, dari data BPS per Maret 2010 disebutkan bahwa 31,02 juta (13,33 persen) penduduk Indonesia masih berada di bawah garis kemiskinan.¹⁸

9. Jumlah peserta didik

Sekolah negeri yang memiliki biaya Sumbangan Pelaksanaan Pendidikan (SPP) yang lebih murah tentunya akan menarik perhatian banyak orang tua murid yang berasal dari golongan menengah ke bawah untuk menyekolahkan anak mereka di sekolah negeri. Berbanding terbalik dengan sekolah swasta yang tentunya akan memiliki jumlah murid lebih sedikit dikarenakan biaya yang harus dikeluarkan lebih mahal. Sisi positif yang kita dapatkan

¹⁷ Hasan Langgulung, *Beberapa Pemikiran Tentang Pendidikan Islam*, h. 4.

¹⁸ Departemen Agama RI, *Pedoman Manajemen Berbasis Madrasah* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, 2007), h. 74.

dengan sedikitnya jumlah murid, maka proses belajar mengajar akan terfokus dengan jumlah murid yang ideal di setiap kelasnya. Sedangkan sisi positif yang kita dapatkan dari sekolah negeri adalah adanya kesempatan bagi semua orang untuk mendapatkan pendidikan yang layak dengan biaya yang terjangkau.

Selanjutnya, permasalahan klise yang selalu terjadi dengan sekolah swasta yang berada di pedesaan adalah kurangnya jumlah murid. Seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa masyarakat desa cenderung menyekolahkan anaknya ke sekolah negeri sehingga “jatah” murid untuk sekolah swasta semakin terbatas. Hal ini diperparah lagi dengan semakin naiknya jumlah kursi yang ditawarkan oleh sekolah negeri.

10. Sarana dan Prasarana serta Fasilitas

Murid yang bersekolah di sekolah negeri akan bebas dari biaya bangunan yang biasanya dipungut di awal, sedangkan murid sekolah swasta dikenakan uang bangunan. Dampak positif yang dimiliki sekolah swasta dengan pemungutan biaya bangunan ini adalah terpenuhinya seluruh fasilitas, sarana dan prasarana yang diperlukan murid untuk mengembangkan minat dan bakat. Sedangkan untuk sekolah negeri, nilai plus yang dimiliki adalah bangunan sekolah yang luas dan besar tanpa harus membayar uang bangunan. Sesuatu yang berkualitas memang tidaklah murah. Fasilitas kelas VIP adalah konsekuensi logis dari biaya pendidikan

yang mahal di sekolah swasta. Fasilitas di sekolah swasta bisa jadi sangat lengkap. Mulai dari ruangan kelas ber-AC, laboratorium, fasilitas olahraga, hingga halaman parkir yang luas. *Branding* sekolah swasta juga dapat melalui hal ini, karena prinsip sektor swasta yang mengutamakan pelayanan prima dan kepuasan untuk *customer*-nya. Sedangkan sekolah negeri memiliki fasilitas yang standar untuk keberlangsungan kegiatan belajar mengajar.¹⁹

11. Status

Sekolah negeri berlomba-lomba mendapatkan status sebagai Sekolah Berstandar Nasional, Rintisan Sekolah Berstandar Internasional, atau bahkan Sekolah Berstandar Internasional. Sekolah swasta dengan menggunakan nama International School pun sudah banyak menjamur. Tentu saja faktanya di negeri ini sekolah “secara tidak sengaja” lebih cenderung terklasifikasikan menjadi kelas-kelas, yaitu (1) sekolah berkualitas baik, (2) sekolah berkualitas sedang, dan (3) sekolah berkualitas rendah, tidak peduli apakah sekolah tersebut berstatus sebagai sekolah negeri atau swasta.

Ada beberapa persoalan yang selama ini melingkupi dunia pendidikan dan sekaligus menjadi tantangan bagi masa depan pendidikan Islam di Indonesia baik sekolah

¹⁹ Mujahid Zulfadli. *Kebijakan Sekolah Negeri dan Swasta VS Pendidikan Untuk Semua*, di <http://edukasi.kompasiana.com/2011/06/04/>.

berstatus negeri maupun swasta, yaitu masalah-masalah internal, merupakan faktor yang terkait langsung secara internal dengan kondisi pendidikan di Indonesia dan di Kabupaten Pinrang pada khususnya. Bangsa Indonesia sejak merdeka hingga saat ini mengalami pergantian empat model kepemimpinan, masing-masing adalah orde lama, orde baru, orde reformasi, dan orde sekarang, yang banyak pengamat menyebutnya sebagai era transisi menuju demokrasi.²⁰ Sedikit atau banyak, tentunya setiap orde memberikan kontribusi dan membantu menentukan corak pendidikan saat ini.

Meskipun banyak faktor yang mempengaruhi kondisi Internal pendidikan di Indonesia, diantaranya;

a. Relasi Kekuasaan dan Orientasi Pendidikan

Menurut Mastuhu, terminologi pendidikan memiliki wajah dan bentuk. Terkhusus pendidikan akademis dan profesional, yang berorientasi pada perubahan sosial atau mengangkat harkat dan martabat manusia atau *human dignity*, yaitu untuk mengangkat manusia menjadi pemimpin di muka bumi, atau menurut istilah agamanya menjadi khalifah di muka bumi dengan tugas dan tanggung jawab memakmurkan kehidupan masyarakat

²⁰Musthofa Rembangy, *Pendidikan Transformatif Pergulatan Kritis Merumuskan Pendidikan di Tengah Pusaran Arus Globalisasi* (Cet. I; Yogyakarta: Teras, 2010), h. 19.

dan memelihara lingkungan.²¹ Tujuan pendidikan yang selama ini diorientasikan memang sangat ideal, bahkan, lantaran terlalu ideal, tujuan tersebut tidak pernah terlaksana dengan baik.²²

Orientasi pendidikan, sebagaimana yang dicita-citakan secara nasional, barangkali dalam konteks era sekarang ini menjadi tidak penentu, atau kabur kehilangan orientasi mengingat adanya tuntutan adanya pola kehidupan pragmatis dalam masyarakat Indonesia. Hal ini patut untuk dikritisi bahwa globalisasi bukan semata mendatangkan efek positif, dengan kemudahan-kemudahan yang ada, akan tetapi, berbagai tuntutan kehidupan yang disebabkan olehnya menjadikan terjadinya disorientasi pendidikan. Pendidikan cenderung berpijak pada kebutuhan pragmatis, dan kebutuhan pasar, lapangan kerja sehingga ruh pendidikan sebagai pondasi budaya, moralitas, dan *social movement* (gerakan sosial) menjadi hilang.²³

Untuk kepentingan tersebut, mengejar kelulusan adalah sebuah keniscayaan sehingga pelaku pendidikan pun tidak sungkan-sungkan melakukan kolusi, antara

²¹Lihat Mastuhu, *Menata Ulang Sistem pendidikan Nasional dalam Abad 21* (Cet. II; Yogyakarta: Safiriah Insani Press, 2006), h. 151.

²²Mastuhu, *Menata Ulang Sistem pendidikan Nasional dalam Abad 21*, h. 151.

²³Mastuhu, *Sistem Pendidikan Nasional Visioner* (Cet. III; Jakarta: Lentera Hati, 2010), h. 37.

siswa dengan guru, atau peserta didik dan pendidik. Dengan demikian, pendidikan pada akhirnya hanya mengejar hasil (produk), dan secara instant akan muncul program-program baru akibat tuntutan pragmatis tersebut. Kondisi ini semakin jelas bahwa pendidikan telah mengesampingkan aspek proses, nilai-nilai dan aspek sosial.²⁴

Dalam aspek politik pendidikan, pendidikan diorientasikan sebagai alat untuk kepentingan tertentu, seperti kepentingan ideologi tertentu, ataupun kepentingan politik dalam rangka mempertahankan status quo. Misalnya, *Pertama*, pada periode 1959-1966, ketika bangsa Indonesia mengalami perkembangan dan perubahan situasi politik, sosial, dan pendidikan yang dahsyat. Perdebatan tentang penciptaan masyarakat Indonesia yang bervisi sosialis sangat mempengaruhi terhadap sistem dan kebijakan di Indonesia. Sejak 1959 bangsa Indonesia di bawah gelora manipol (Manifesto Politik), dengan tujuan sosialisme Indonesia, demokrasi terpimpin, ekonomi terpimpin, Kepribadian Indonesia. Dari tujuan tersebut tampak sekali adanya kepentingan ideologi tertentu (sosialis) yang mencita-citakan terbentuknya manusia sosialis Indonesia.

²⁴Musthofa Rembangy, *Pendidikan Transformatif Pergulatan Kritis Merumuskan Pendidikan di Tengah Pusaran Arus Globalisasi* (Cet. I; Yogyakarta: Teras, 2010), h. 21.

Kedua, pada masa orba pendidikan dijadikan sebagai alat kekuasaan. Masyarakat luas sudah merasakan dan menyadari kondisi bangsa Indonesia di bawah rezim Orde Baru (Orba). Dengan adanya reformasi Mei 1998 kebobrokan dan kepentingan terselubung di bawah orde baru mulai terungkap semua. Pendidikan Nasional pada masa orde baru selama 32 tahun telah diabdikan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pelanggaran kekuasaan (mempertahankan *status quo*). Dengan demikian, tujuan pendidikan lalu direduksi menjadi sangat pragmatis, antara siap pakai dan tidak siap pakai, sehingga menghilangkan esensi dari pendidikan yang sebenarnya. Pendidikan juga menjadi ajang untuk melakukan indoktrinasi kepada masyarakat sehingga selama masa orde baru itu yang ada bukan pendidikan, melainkan penataran, atau indoktrinasi ideologi.²⁵

Sehingga menurut analisa penulis pendidikan yang merupakan modal dasar kehidupan bagi umat manusia, ternyata tidak berjalan sebagaimana adanya di negeri ini. Pendidikan semestinya ditujukan untuk kepentingan transformasi sosial dalam membentuk masyarakat yang adil dan makmur, tetapi ia malah dijadikan sebagai media untuk kepentingan politik tertentu. Orientasi pendidikan

²⁵ H. Gunawan Ary, *Kebijakan-Kebijakan Pendidikan di Indonesia* (Cet.II; Jakarta: Bina Aksara, 1999), h. 49.

harus diarahkan kembali pada hakekat pendidikan yang sebenarnya.²⁶ Dan dalam konstalasi global ini, dunia pendidikan tidak dapat menutup diri dari kemungkinan terjadinya kontekstualisasi terhadap perkembangan zaman yang ada supaya pendidikan menjadi problem solver atas persoalan zaman.

b. Masalah Kurikulum

Kurikulum merupakan aspek pendidikan yang prinsipil, sebagai tuntunan dan tujuan, cita-cita, atau orientasi pendidikan nasional. Akan tetapi, seringkali kebijakan tentang kurikulum pendidikan nasional dianggap tidak konsisten dalam menerjemahkan tujuan ideal pendidikan. Setiap adanya pergantian menteri pendidikan, kebijakan berkaitan dengan kurikulum pun ikut diganti,²⁷ sesuai dengan harapan menteri yang baru. Seiring digantinya Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 2 tahun 1989, dan terbitlah undang-undang baru yaitu undang-undang nomor 20 tahun

²⁶ H. Gunawan Ary, *Kebijakan-Kebijakan Pendidikan di Indonesia*, h. 50.

²⁷Kurikulum pendidikan di Indonesia hingga sekarang ini sudah enam kali mengalami pergantian; pertama 1968 yang bersifat *correlated subject curriculum* pada masa Mashuri 1968-1973, kedua, 1975 yang bersifat *Integrated curriculum organization* pada masa TNI Dr. Syaref Tajeb 1973-1978, ketiga, 1984 yang bersifat *content based curriculum* pada masa Nugroho Noto Susanto 1984-1994, keempat 1994 *objective based curriculum* pada masa Wardiman Djojonegoro 2004-2006, kelima kurikulum 2006, sifat kurikulum ini *kompetensi based curriculum* pada masa Malik Fajar, dan keenam kurikulum 2013 Lihat, H. Gunawan Ary, *Kebijakan-Kebijakan Pendidikan di Indonesia* (Cet.II; Jakarta: Bina Aksara, 2009), h. 49.

2003, bersama pula hadir kurikulum berbasis kompetensi (KBK), diantaranya memuat kompetensi yang perlu dimiliki setiap lulusan. Dalam praktik, jangankan dengan KBK, bahkan di banyak daerah masih ada sekolah yang belum sempat mempraktikkan kurikulum 1994, memasuki ajaran 2005/2006 ini kurikulum terakhir tetaplah sebagai *hidden curriculum*, kurikulum yang belum dipraktekkan sebagai pedoman belajar di perguruan tinggi.²⁸

c. Pendekatan/Metode Pembelajaran

Faktor pendekatan dan metode pembelajaran hingga kini masih menjadi persoalan dalam lingkungan pendidikan. Pendekatan yang tepat dalam metode yang efektif tentu akan mendukung terhadap keberhasilan pembelajaran di kelas. Terkait dengan hal ini, memiliki hubungan erat dengan beberapa aspek yang terlihat langsung diantaranya peran dosen di kelas, mahasiswa sebagai subyek aktif, dan fasilitas pendukung di lembaga tersebut.

Guru sebagai pendidik seringkali bicara tentang pendidikan "dialogis" bahkan pembelajaran yang partisipatif melalui pembicaraan-pembicaraan di luar kelas. Dan mereka yang selalu mendung-dungungkan

²⁸Darmaningtyas, *Pendidikan pada dan Setelah Krisis* (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 126.

kebebasan berpendapat, kesetaraan, cara hidup bermasyarakat, dan lain sebagainya. Sayangnya, masih sering dijumpai di sekolah adanya kultur guru yang masih melekat sebagai sosok yang otoritatif tentang ilmu pengetahuan, guru berperang dominatif terhadap peserta didik dan pada akhirnya pembelajaran tidak menyenangkan, sebab asumsi yang dibangun adalah guru memiliki ilmu dan pengalaman yang lebih tinggi dibanding peserta didik. Sehingga, tradisi keilmuan, berdialektika antara keduanya, dan sikap kritis akhirnya jarang dijumpai di kelas. Meskipun guru dulu pernah jadi peserta didik, oleh karenanya seyogyanya berpikirkannya ialah menerapkan model pembelajaran yang efektif, dialogis, dan menyenangkan atau Pembelajaran Aktif Inovatif Kreatif dan Menyenangkan (PAIKEM).²⁹

Persoalan fundamental tersebut dalam sistem pendidikan nasional adalah dehumanisasi pendidikan. Pendidikan seharusnya menghormati dan menghargai martabat manusia. Peserta didik harus tumbuh dalam kemanusiaannya sebagai subyek melalui proses pendidikan. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Dalam praktik di sekolah dan kampus banyak contoh menunjukkan betapa peserta didik diperlukan sebagai obyek demi kepentingan ideologi, politik, dan bisnis,

²⁹Azyumardi Azra, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional: Rekonstruksi dan Demokrasi* (Cet. I; Jakarta: Penerbit Kompas, 2009), h. xvii.

sebagai pendidik, guru tidak mampu mengembangkan kesadaran untuk menghentikan gejala dehumanisasi ini karena para guru dan dosen sendiri merasa terjebak sebagai obyek dalam sistem pendidikan nasional.³⁰

Peran guru sebagai pendidik sangat besar dalam meningkatkan mutu pembelajaran dan meningkatkan kualitas kompetensi peserta didik. Dalam mengajar, ia harus membangkitkan potensi diri, memotivasi, memberi suntikan energi, dan mengerakkan siswa melalui pola pembelajaran yang kreatif dan kontekstual. Pola pembelajaran yang demikian akan menunjang tercapainya sekolah yang unggul dan kualitas lulusan yang siap bersaing dalam arus perkembangan zaman.

d. Profesionalitas dan Kualitas SDM

Sikap optimis selalu muncul dalam pikiran masyarakat Indonesia bahwa potret pendidikan di Indonesia ke depan akan lebih baik sebagaimana yang diidealkan. Namun demikian, butuh prasyarat-prasyarat yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah professional dalam pengelolaan pendidikan untuk mendukung pengelolaan pendidikan secara profesional dibutuhkan kualitas sumber daya manusia (SDM) pendidikan yang memadai

³⁰Anitalie, *Guru dan Dosen Sebagai Pekerja Budaya* "Kompas 3/09/2010.

dan ditempatkan pada level yang proposional.³¹

Salah satu contohnya terdapat pada SMA Negeri dan SMA Islam Swasta yang ada di Kabupaten Pinrang pada khususnya adalah tenaga pendidik yang belum memadai. Secara kuantitatif, jumlah guru sudah cukup memadai, tetapi dari segi mutu dan profesionalisme masih belum memenuhi harapan. Banyak tenaga kependidikan masih *unqualified*, sehingga mereka kurang mampu menyajikan dan menyelenggarakan pendidikan yang benar-benar berkualitas.³²

Kemerosotan mutu pendidikan di Indonesia, seperti ditunjukkan dalam berbagai survei internasional, misalnya TIMSS dan Indek Pembangunan manusia, tidak lepas dari rendahnya mutu tenaga pendidik.³³ Alasannya, dosen mempunyai peran amat penting dan strategis dalam penyelenggaraan pendidikan.

e. Biaya Pendidikan

Faktor biaya pendidikan adalah hal penting, dan menjadi persoalan tersendiri yang seolah-olah menjadi kabur mengenai siapa yang bertanggung jawab atas

³¹Ade Maruf dan Anas, *Shaping Globalisation: Jawaban kaum Sosial Demokrat atas Neoliberalisme* (Cet. II; Yogyakarta: Jendela, 2009), h. 2.

³²Ade Maruf dan Anas, *Shaping Globalisation: Jawaban kaum Sosial Demokrat atas Neoliberalisme*, h. 4.

³³H.A.R. Tilar, *Pendidikan, Kebudayaan, dan Masyarakat Madani Indonesia: Strategi Reformasi Pendidikan Nasional* (Cet. I; Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2005), h. 43.

persoalan ini. Mungkin sekarang kalau kita menagih komitmen dan janji pemerintah, pasti akan mendapat jawaban yang kurang memuaskan. Terkait dengan amanat konstitusi sebagaimana termaktub dalam UUD 1945 hasil amandemen, serta UU sisdiknas nomor 20 tahun 2003 pasal 4 tentang sistem pendidikan nasional yang memerintahkan negara mengalokasikan dana minimal 20 % dari APBN dan APBD di masing-masing daerah, namun hingga sekarang belum terpenuhi.³⁴

Kebijakan pemerintah terkait UU Sisdiknas dan implikasinya, melalui perdebatan, draf RUU Sisdiknas pada 8 Juli 2003 akhirnya disahkan oleh Presiden Megawati melalui UU Sistem Pendidikan Nasional dengan keputusan Presiden nomor 20 tahun 2003 dalam undang-undang tersebut sudah ada upaya untuk memperbaiki dan melakukan perubahan terhadap UUSPN sebelumnya. Dalam UU Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003 ini fungsi dan tujuan pendidikan dijelaskan dalam pasal 3 sebagai berikut:

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak

³⁴ UU RI No. 20 tahun 2003 *Tentang Sistem Pendidikan Nasional* (Jakarta: BP. Panca Usaha, 2004), h. 7.

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.³⁵

Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tersebut menuntut adanya peningkatan mutu pendidikan Islam baik yang tercakup dalam sistem yang berada di bawah kementerian agama maupun pendidikan Islam dalam sistem Kementerian Pendidikan Nasional. Hanya dengan respon yang tepat, pendidikan Islam dapat diharapkan lebih fungsional dalam mempersiapkan peserta didik untuk menjawab tantangan perkembangan Indonesia modern yang terus semakin kompleks.³⁶

Dalam konteks tujuan tersebut, sebenarnya yang menjadi pertimbangan adalah potensi yang dimiliki peserta didik dan konteks era otonomi daerah. Sebab, harus diakui secara bersama bahwa peserta didik di seluruh penjuru nusantara ini memiliki potensi yang beraneka ragam dan tiak bisa disamaratakan. Sejalan dengan semangat otonomi daerah ini potensi-potensi lokal perlu mendapatkan penghargaan proposional, baik oleh masyarakat maupun pemerintah pusat.³⁷

³⁵ UU RI No. 20 tahun 2003 *Tentang Sistem Pendidikan Nasiona*, h. 3.

³⁶ Lihat Seyyed Hossein Nasr, *The Heart of Islam*, diterjemahkan oleh Nurasia Faqih Sutan Harahap dengan judul, *Pesan-pesan Universal Islam untuk Kemanusiaan* (Bandung; Mizan, 2003), h. 192.

³⁷ Mustafa Rembangy, *op. cit*, h. 39.

Dalam menghadapi persaingan global yang semakin ketat, standarisasi menjadi variabel penting dalam memenangkan percaturan global. Tak heran kalau isu standarisasi menjadi penting, terutama menyangkut sektor pendidikan. Pendidikan masih diyakini sebagai investasi jangka panjang (*long term investasion*) yang mampu menyiapkan kualitas sumber daya manusia yang handal, mampu memberikan kontribusi terhadap bangsa, dan siap bersaing dalam konteks era globalisasi sekarang ini. Standar Nasional Pendidikan (SNP) tak lain dimaksudkan sebagai upaya peningkatan mutu atau kualitas pendidikan di Indonesia, sehingga pendidikan memiliki daya tawar dalam kancah global.

Tugas utama bagi penyelenggara pendidikan baik pada sekolah negeri maupun sekolah swasta di Kabupaten Pinrang adalah menyusun perencanaan pendidikan yang diatur dalam sistem perundang-undangan pendidikan sehingga penerapan dari sistem perundang-undangan itu dapat digunakan para pelaksana atau oleh para pelaku pendidikan yang ada di Kabupaten Pinrang sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai.

Dalam konteks ini, Pendidikan Agama Islam pada sekolah SMA Negeri dan SMA Islam Swasta merupakan pelajaran pokok yang harus diberikan kepada peserta didik. Pembelajaran Pendidikan Agama Islam harus dilakukan secara maksimal agar peserta didik benar-

benar memahami dan menghayatinya. Maksimalisasi pembelajaran Pendidikan Agama Islam kepada peserta didik, ditentukan oleh tingginya minat belajar dan apresiasi peserta didik terhadap pelajaran tersebut, yang kesemuanya itu sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dan ketepatan metode yang digunakan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan pendidikan agama Islam dan pencapaian prestasi belajar yang tinggi peserta didik dipengaruhi oleh sejauhmana ketepatan lingkungan, pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran yang diterapkan.

Konsep pelaksanaan pendidikan agama Islam secara sederhana dapat diartikan sebagai proses aktualisasi pendidikan agama Islam.³⁸ Pendidikan Agama Islam biasa diartikan usaha sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, mengamalkan hingga mengimani ajaran agama Islam, dibarengi dengan tuntunan untuk menghormati penganut agama lain dalam hubungannya dengan kerukunan antarumat beragama dalam masyarakat untuk mewujudkan persatuan nasional.³⁹

Sedangkan istilah sekolah negeri adalah sekolah yang

³⁸ Mansoer Faki, *Sesat Teori Pembangunan dan Globalisasi* (cet. II; Yogyakarta: Insis Pres, 2003), h. 42.

³⁹ Muhaimin, *Paradigma Pendidikan Islam, Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah* (Cet. II; Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2007), h.76.

dikelola oleh pemerintah dan difasilitasi oleh negara. Sedangkan sekolah swasta, juga disebut sebagai sekolah independen, tidak dikelola oleh pemerintah daerah, negara bagian atau nasional; mereka memperoleh hak untuk menyeleksi siswa dan didanai seluruhnya atau sebagian dengan membebankan biaya sekolah kepada siswa, dari pada bergantung pada dana pemerintah, siswa dapat memperoleh beasiswa masuk sekolah swasta yang menjadikan biaya sekolah lebih mudah tergantung bakat siswa, misalnya beasiswa olahraga, beasiswa seni, beasiswa akademik, dan lain-lain sekolah keagamaan dan denominasional membentuk turunan dari sekolah swasta. Sekolah seperti ini mengajarkan pendidikan agama Islam, bersama dengan mata pelajaran umum untuk memperkuat keyakinan dan tradisi siswa. Sekolah lainnya menggunakan denominasi sebagai label umum untuk menggambarkan sesuatu yang menjadi dasar kepercayaan para pendiri, tetapi masih mempertahankan perbedaan antara pendidikan umum dan pendidikan agama.



Teori Dasar Pembelajaran Agama Islam

Istilah pembelajaran berasal dari kata “*instruction*” yang berarti *self instruction* (dari internal) dan *eksternal instructions* (dari eksternal). Pembelajaran yang bersifat eksternal antara lain datang dari guru yang disebut *teaching* atau pengajaran. Dalam pembelajaran yang bersifat eksternal prinsip-prinsip belajar dengan sendirinya akan menjadi prinsip-prinsip pembelajaran. Pembelajaran adalah perpaduan dari dua aktivitas, yaitu aktivitas mengajar dan aktivitas belajar. Aktivitas mengajar menyangkut peranan seorang guru dalam konteks mengupayakan terciptanya jalinan komunikasi harmonis antara pengajar itu sendiri dengan si belajar.¹

¹Knowles dalam buku Slameto, *Belajar dan Faktor yang Mempengaruhinya* (Cet. IV; Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 12. Lihat juga Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga (Cet. III; Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 1266.

Pengertian pembelajaran menurut para ahli seperti Knowles bahwa pembelajaran adalah cara pengorganisasian peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Sedangkan menurut Slavin, pembelajaran didefinisikan sebagai perubahan tingkah laku individu yang disebabkan oleh pengalaman.² Dari pendapat diatas dapat dipahami bahwa pembelajaran pada dasarnya merupakan bagian dari kegiatan pendidikan dan implementasi dari operasionalisasi dari kompetensi dasar yang terdapat dalam materi pendidikan Agama Islam. Kegiatan pembelajaran akan berlangsung apabila di dalamnya terjadi interaksi antara pendidik yang mengajar dan siswa yang belajar.

Beberapa ahli pendidikan sepakat bahwa pembelajaran merupakan pemberian pengetahuan dan informasi sebanyak-banyaknya ke dalam diri peserta didik. Dalam kegiatan pembelajaran aktivitas pengajaran utama diperankan oleh pendidik, dan sumber belajar kebanyakan diambil dari buku-buku pelajaran tanpa mengaitkan dengan realitas kehidupan yang berlaku di masyarakat.

Oemar Hamalik mengelompokkan pendapat para ahli mengenai pembelajaran ke dalam enam kelompok sebagai berikut;

1. Kelompok yang menganggap pembelajaran merupakan penyampaian pengetahuan kepada peserta didik.

²Knowles dalam buku Slameto, *Belajar dan Faktor yang Mempengaruhinya* (Cet. IV; Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 12.

2. Pembelajaran adalah menawarkan kebudayaan kepada generasi muda melalui lembaga pendidikan sekolah.
3. Pembelajaran adalah usaha mengorganisasi lingkungan sehingga menciptakan kondisi belajar bagi peserta didik.
4. Pembelajaran adalah memberikan bimbingan belajar kepada siswa.
5. Pembelajaran adalah kegiatan mempersiapkan peserta didik untuk menjadi warga negara yang baik sesuai dengan tuntutan masyarakat.
6. Pembelajaran adalah suatu proses membantu peserta didik menghadapi kehidupan masyarakat sehari-hari.³

Dalam pengertian di atas pembelajaran menyampaikan pengetahuan kepada peserta didik, pembelajaran dipandang sebagai upaya mempersiapkan peserta didik untuk hidup di masa yang akan datang, pembelajaran merupakan penyampaian pengetahuan dari pendidik kepada peserta didik; tujuan utama pembelajaran adalah penguasaan pengetahuan oleh peserta didik, pendidik dianggap sebagai sumber utama belajar, siswa diposisikan sebagai penerima pesan, informasi, dan pengetahuan dan pengajaran hanya berlangsung di ruang kelas.⁴

Pembelajaran sebagai kegiatan mewariskan kebudayaan kepada generasi muda membawa implikasi kepada tujuan pendidikan yaitu membentuk manusia yang berbudaya. Pembelajaran dipandang sebagai bimbingan siswa yang

³Oemar Hamalik, *Perencanaan Pengajaran Berdasarkan Pendekatan Sistem* (Cet. I; Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 13.

⁴Darwyn Syah, *Perencanaan Sistem Pengajaran Pendidikan Agama Islam* (Cet. II; Jakarta: Putra Garafika, 2007), h. 18.

sangat berkaitan dengan peran pendidik yang lebih kepada moderator dalam kegiatan pembelajaran, dan dituntut aktif melakukan aktivitas belajar adalah peserta didik untuk melakukan kegiatan pengalaman belajar dan memperoleh kecakapan hidup dalam kegiatan pembelajaran dengan mengali dan mencari informasi sendiri, berdiskusi, mengunjungi sumber belajar selain pendidik dan sebagainya.⁵

Kegiatan pembelajaran dalam rangka mempersiapkan siswa menjadi warga negara yang baik sesuai dengan tuntutan masyarakat yaitu; mempersiapkan siswa yang dapat bekerja di tengah-tengah masyarakat; pendidikan akan lebih baik bila berada dalam situasi kerja, dan peserta didik dipandang sebagai sumber daya manusia yang memiliki potensi untuk bekerja dan menghasilkan kerja, dan tugas pendidik dan dosen adalah sebagai pimpinan, pembimbing dan bengkel kerja yang memberikan keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan untuk bekerja.

Pembelajaran dalam arti yang lain diartikan telah terjadi interaksi pembelajaran antara komponen-komponen pengajaran khususnya antara pendidik dan peserta didik antara peserta didik dengan peserta didik dan komponen-komponen pengajaran lainnya. Pembelajaran juga sering diartikan sama dengan kegiatan pendidikan. Dalam

⁵Darwyn Syah, *Perencanaan Sistem Pengajaran Pendidikan Agama Islam*, h. 19.

pengertian yang lain pembelajaran adalah terjadinya dua aktivitas yang berbeda antara pihak pendidik dengan pihak siswa. Aktivitas pendidik adalah mengajar yang berperan mengupayakan jalinan komunikasi atau interaksi yang harmonis antara kegiatan yang dilakukan pendidik dengan kegiatan belajar yang dilakukan peserta didik.⁶

Ukuran keberhasilan pembelajaran menurut penulis adalah tercapainya komunikasi yang harmonis antara pendidik dengan peserta didik. Indikator keberhasilan pembelajaran lainnya adalah terjadinya perubahan tingkah laku pada diri peserta didik serta tertanamnya dalam diri peserta didik tentang kebutuhan akan belajar serta manfaat pembelajaran.

Pembelajaran adalah suatu usaha manusia yang penting dan bersifat kompleks. Dikatakan kompleks karena banyaknya nilai-nilai dan faktor-faktor manusia yang turut terlibat didalamnya. Dikatakan sangat penting, sebab pengajaran adalah usaha membentuk manusia yang baik. Kegagalan pembelajaran dapat merusak satu generasi masyarakat. Pembelajaran lebih sering dipahami dalam pengertian suatu kegiatan yang menyangkut pembinaan anak mengenai segi kognitif, afektif, dan psikomotor semata-mata, yaitu supaya anak lebih banyak pengetahuannya, lebih cakap berpikir kritis, sistematis, dan obyektif, serta terampil dalam

⁶Ahmad Fu'ad Al-Ahwāniy, *al-Tarbiyah fil Islam* (Mesir: Dār al-Ma'arif, t.th) h. 75.

mengerjakan sesuatu.

Menurut Degeng, pembelajaran adalah upaya untuk membelajarkan peserta didik.⁷ Dalam pengertian ini secara implisit dalam pengajaran terdapat kegiatan memilih, menetapkan, mengembangkan metode untuk mencapai hasil yang diinginkan. Pemilihan, penetapan, dan pengembangan metode ini didasarkan pada kondisi pengajaran yang ada. Kegiatan ini pada dasarnya merupakan inti dari pengelolaan pembelajaran.⁸

Pandangan tentang istilah pembelajaran terus-menerus berkembang dan mengalami kemajuan. Ada beberapa pemahaman tentang pembelajaran di antaranya yaitu: 1) pembelajaran identik dengan kegiatan belajar mengajar, 2) pembelajaran adalah interaksi belajar dan mengajar, 3) pembelajaran sebagai suatu sistem, dan 4) pembelajaran identik dengan pendidikan.⁹

Thomas E. Curtis dan Wilma W. Bidwell menjelaskan, dalam proses pembelajaran di sekolah peranan pendidik lebih spesifik sifatnya dalam pengertian yang sempit, yakni dalam hubungan proses belajar mengajar. Peranan pendidik adalah

⁷N.S. Degeng, *Buku Pegangan Teknologi Pendidikan Pusat Antar Universitas untuk Peningkatan dan Pengembangan Aktivitas Instruksional Universitas Terbuka* (Jakarta: Depdikbud RI, Dirjen Dikti, 1993), h. 1.

⁸Hamzah B. Uno, *Perencanaan Pembelajaran* (Cet. III, Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 2

⁹Oemar Hamalik, *Proses Belajar Mengajar* (Cet. VI; Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 53-54.

sebagai pengorganisasi lingkungan belajar dan sekaligus sebagai fasilitator belajar. Peranan pertama meliputi peranan-peranan yang lebih spesifik, yakni:¹⁰

1. Pendidik sebagai model,
2. Pendidik sebagai perencana,
3. Pendidik sebagai peramal,
4. Pendidik sebagai pemimpin,
5. Pendidik sebagai penunjuk jalan atau pembimbing kearah pusat-pusat belajar.¹¹

Menurut Charles E. Silberman, pendidikan tidak sama dengan pembelajaran, karena pengajaran hanya menitikberatkan pada usaha mengembangkan intelektualitas manusia. Sedangkan pendidikan berusaha mengembangkan seluruh aspek kepribadian dan kemampuan manusia, baik dilihat dari aspek kognitif, afektif dan psikomotorik. Pendidikan mempunyai makna yang lebih luas dari pengajaran, tetapi pengajaran merupakan sarana yang ampuh dalam menyelenggarakan pendidikan.

Jadi pembelajaran merupakan bagian dari pendidikan, mengacu pada konsep yang lebih luas dan lintas kultural masyarakat Indonesia yang demikian majemuknya, maka pendidikan diselenggarakan berdasarkan rencana yang matang, mantap, jelas dan lengkap, menyeluruh, rasional, dan

¹⁰Oemar Hamalik, *Perencanaan Pembelajaran Berdasarkan Pendekatan Sistem* (Cet. VII, Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 45.

¹¹Oemar Hamalik, *Perencanaan Pembelajaran Berdasarkan Pendekatan Sistem*, h. 46.

obyektif menjadikan peserta didik menjadi warga negara yang baik. Keberhasilan pendidikan banyak ditentukan bagaimana optimalisasi upaya pendidik dalam merencanakan dan melaksanakan serta mengevaluasi sistem pembelajaran.

Sering dikatakan pembelajaran adalah mengorganisasikan aktivitas peserta didik dalam arti yang luas. Peranan pendidik bukan semata-mata memberikan informasi, melainkan juga mengarahkan dan memberi fasilitas belajar (*directing and facilitating the learning*) agar proses pembelajaran lebih memadai. Dalam pembelajaran pendidik harus memahami hakekat materi pelajaran yang diajarkannya sebagai suatu pelajaran yang dapat mengembangkan kemampuan berpikir siswa, dan memahami berbagai model pembelajaran yang dapat merangsang kemampuan siswa untuk belajar dengan perencanaan pengajaran yang matang oleh pendidik.¹²

Pendapat ini sejalan dengan Jerome Bruner yang mengatakan bahwa perlu adanya teori pembelajaran yang akan menjelaskan asas-asas untuk merancang pembelajaran yang efektif di kelas. Menurut pandangan Bruner teori pembelajaran itu bersifat deskriptif, sedangkan teori pembelajaran itu preskriptif.¹³ Dengan demikian, setiap pendidik perlu memahami bahwa pembelajaran bukan sekedar menceramahkan bahan ajar di depan kelas atau

¹²Syaiful Sagala, *Konsep dan Makna Pembelajaran* (Cet. II, Bandung: Alfabeta, 2005), h. 63.

¹³Syaiful Sagala, *Konsep dan Makna Pembelajaran*, h. 64.

menjejalkan pengetahuan kepada peserta didik tanpa perencanaan yang jelas.

Selanjutnya Syaiful Sagala menyebutkan bahwa pembelajaran mempunyai dua karakteristik, yaitu: *Pertama*, proses pembelajaran melibatkan proses mental siswa secara maksimal, bukan hanya menuntut siswa sekedar mendengar, mencatat, tetapi menghendaki aktivitas siswa dalam proses berpikir. *Kedua*, dalam proses pembelajaran dibangun suasana dialogis dan proses tanya jawab terus menerus yang diarahkan untuk memperbaiki dan meningkatkan kemampuan berpikir siswa, yang pada gilirannya kemampuan berpikir itu dapat membantunya untuk memperoleh pengetahuan yang mereka konstruksi sendiri.¹⁴

Pembelajaran mempunyai beberapa komponen, yaitu komponen: tujuan pengajaran, bahan ajaran, metode pembelajaran, media dan evaluasi pengajaran. Pengajaran yang bercirikan sistem menekankan keterpaduan antara keseluruhan komponen, komponen yang satu berhubungan erat dengan komponen lainnya. Dalam pembelajaran sebagai sistem, tujuan memegang peranan-peranan utama. Tujuan pembelajaran menjadi acuan bagi keempat kompponen pembelajaran lainnya. Sebagai suatu acuan, maka dalam penyusunan program pembelajaran, tujuan menjadi komponen pertama yang perlu dirumuskan. Selanjutnya,

¹⁴Syaiful Sagala, *Konsep dan Makna Pembelajaran*, h. 64.

pemilihan dan perumusan komponen lainnya mengacu pada tujuan.¹⁵

Ciri dari pembelajaran sebagai sistem adalah penekanan kepada perilaku yang dapat diukur dan diamati. Dalam pembelajaran sebagai sistem, tujuan-tujuan yang bersifat umum (tujuan institusional atau tujuan kurikuler) dijabarkan dan dirinci menjadi tujuan-tujuan yang lebih khusus (tujuan instruksional umum dan khusus).¹⁶

Dalam pandangan Oemar Hamalik, model pembelajaran terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut:

- a. Tujuan instruksional (Kompetensi Dasar dan Kompetensi Inti): tujuan-tujuan tertentu yang hendak dicapai dalam jangka waktu pertemuan kelas yang ditetapkan secara tepat dan operasional.
- b. Material: bahan-bahan instruksional yang akan digunakan selama pelajaran dijelaskan dalam kaitannya dengan maksud dan cara yang diintegrasikan ke dalam pelajaran.
- c. Motivasi: deskripsi tentang cara pendidik merangsang hasrat dan minat peserta didik pada kegiatan permulaan dan selama berlangsungnya pelajaran tersebut.
- d. Prosedur: langkah-langkah dalam urutan instruksional yang disediakan, yang meliputi peranan pendidik dan peranan peserta didik. Komponen ini memuat tingkah laku pendidik dan tingkah laku peserta didik selama berlangsungnya pembelajaran.
- e. Perkiraan waktu: pencatatan yang seksama tentang jumlah waktu yang dijadwalkan bagi setiap tahap

¹⁵Syaiful Sagala, *Konsep dan Makna Pembelajaran*, h. 52.

¹⁶Syaiful Sagala, *Konsep dan Makna Pembelajaran*, h.52.

- urutan belajar yang harus disediakan dalam rencana.
- f. Penilaian: kerangka pertanyaan-pertanyaan dan topik-topik untuk menilai kebaikan dan kelemahan pelajaran. Kesempatan bagi siswa untuk menilai pelajaran dapat juga disediakan.
 - g. Kerja mandiri dan tingkat lanjut: penugasan sebagai tindak lanjut dijelaskan dalam rencana. Misalnya kegiatan-kegiatan melakukan kunjungan ke pusat-pusat belajar dan perpustakaan, tugas pekerjaan rumah berdasarkan tujuan-tujuan pelajaran dan sebagainya.¹⁷

Dalam pelaksanaan pembelajaran, pendidik memegang posisi dan peranan utama. Pendidik harus mengantar peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran dan mengembangkan segenap potensi pedagogisnya dalam mencapai tujuan pembelajaran. Abdullah Idi¹⁸ menjelaskan peranan pendidik dalam melaksanakan proses pembelajaran sebagai berikut:

1. Merencanakan unit pengajaran.
2. Mendiagnosis kesulitan belajar peserta didik.
3. Menguraikan kegiatan belajar yang sesuai.
4. Menghubungkan pengalaman belajar dengan minat peserta didik secara individual.
5. Mengorganisasikan kurikulum.
6. Mengevaluasi kemajuan peserta didik.¹⁹

Dalam kegiatan pembelajaran, pendidik perlu

¹⁷Oemar Hamalik, *Pendekatan Baru Strategi Belajar Mengajar Berdasarkan CBSA*, h. 7-8.

¹⁸Abdullah Idi, *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktik* (Cet. II, Yogyakarta: Ar Ruz Media, 2007), h. 235.

¹⁹Abdullah Idi, *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktik*.

menentukan tujuan yang jelas mengenai apa yang hendak dicapai dan mempertimbangkan alasan mengajarkan hal itu, yakni alasan menyampaikan suatu pokok bahasan, sehingga arah pekerjaan pendidik terarah dan efektif. Karenanya, pelajaran yang disajikan harus mempunyai perencanaan, pengoreksian, atau kesesuaiannya dengan rencana pelajaran. Jelasnya, tujuan seorang pendidik dalam membuat rencana pelajaran adalah agar tercipta kondisi aktual sehingga dapat mendukung pencapaian tujuan pengajaran yang ditetapkan secara optimal, baik tujuan khusus maupun tujuan umum.²⁰

Dalam penyusunan program pembelajaran seorang pendidik harus menekankan terselenggaranya proses pembelajaran secara lebih lancar dan hasilnya lebih efektif. Olehnya itu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan program pengajaran, yaitu:

- a. Kurikulum; dalam perencanaan pengajaran atau penyusunan suatu program pengajaran, hal pertama yang perlu mendapat perhatian adalah kurikulum, terutama GBPP-nya. Dalam GBPP biasanya telah tercantum tujuan kurikuler, tujuan instruksional, pokok bahasan serta jam pelajaran untuk mengajarkan pokok bahasan tersebut.
- b. Kondisi sekolah; perencanaan pengajaran juga perlu memperhatikan keadaan sekolah, terutama tersedianya sarana-prasarana dan alat bantu pelajaran. Sarana-sarana dan alat bantu pelajaran ini menjadi pendukung terlaksananya berbagai aktivitas belajar siswa.

²⁰Abdullah Idi, *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktik*, h. 235.

- c. Kemampuan dan perkembangan peserta didik; dalam menyusun atau merencanakan program pengajaran komponen peserta didik juga perlu mendapat perhatian. Agar bahan dan cara belajar ini sesuai dengan kondisi peserta didik, maka penyusunan skenario/program pengajaran perlu disesuaikan dengan kemampuan dan perkembangan peserta didik, dalam hal ini keluasan dan kedalaman bahan ajaran perlu disesuaikan dengan kemampuan dan perkembangan peserta didik.

Keadaan pendidik; keadaan dan kemampuan pendidik sesungguhnya tidak perlu menjadi hal yang perlu diperhatikan, sebab pendidik dituntut memiliki kemampuan dalam segala hal yang berkenaan dengan pelaksanaan pendidikan dan pengajaran. Jika suatu saat ia merasa memiliki kekurangan, itu merupakan tuntutan baginya untuk belajar dan meningkatkan kompetensi dirinya dalam kapasitasnya sebagai pengajar dan pendidik.

Para pakar berbeda pendapat dalam menginterpretasikan pendidikan. Perbedaannya tak lain hanya terletak pada sudut pandang. Di antara mereka ada yang mendefinisikan dengan mengkonotasikan dengan peristilahan bahasa, keberadaan, dan hakekat kehidupan manusia di dunia ini, dan ada pula yang melihat dari segi proses kegiatan yang dilakukan dalam penyelenggaraan pendidikan.²¹ Tetapi semua pendapat itu

²¹Pendidikan pada dasarnya merupakan upaya pembinaan dan pengembangan potensi manusia agar tujuan kehadirannya di dunia ini sebagai hamba Allah dan sekaligus khalifah Allah Swt. tercapai sebaik mungkin potensi yang dimaksud meliputi potensi jasmani dan rohani.

bertemu dalam pandangan bahwa pendidikan adalah suatu proses mempersiapkan generasi muda untuk menjalankan kehidupan dan untuk memenuhi tujuan hidup secara efektif dan efisien.

Oleh karena itu, pendidikan benar-benar merupakan latihan fisik, mental, dan moral bagi individu-individu supaya mereka menjadi manusia yang berbudaya dan berkepribadian sosial. Sehingga mampu memenuhi tugasnya sebagai manusia dan menjadi warga negara yang berguna. Inilah yang kelihatannya merupakan pandangan yang kebanyakan dipegang oleh para ahli pendidikan terkemuka sepanjang zaman. John Dewey dalam Khursyid Ahmad, misalnya mengemukakan; bahwa pendidikan adalah proses pembentukan kecakapan fundamental, secara intelektual dan emosional, ke arah alam sesama manusia.²²

Mohammad Natsir menyatakan bahwa pendidikan adalah suatu bimbingan jasmani dan rohani yang menuju kepada kesempurnaan dan kelengkapan arti kemanusiaan

Dengan melalui kurikulum pendidikan merupakan jalan yang terbaik untuk mendidik dan meningkatkan kapabilitas generasi muda sehingga mampu mengembangkan bakat dan keterampilan yang mereka miliki untuk menjalankan hak dan kewajibannya, memikul tanggung jawab terhadap diri keluarga, dan turut serta secara aktif untuk kemajuan masyarakat dan bangsa. Lihat H. Abd, Rahman Getteng, *Pendidikan Islam dalam Pembangunan* (Ujung pandang: Yayasan al-Ahkam, 1997), h. 25.

²²Khursyid Ahmad, *Prinsip-prinsip Pendidikan Islam*, Terj., M. Hashem, h. 9.

dengan arti sesungguhnya.²³ Pengertian tersebut hampir sama dengan pengertian yang dipublikasikan oleh Ahmad D. Marimba, bahwa pendidikan adalah bimbingan secara sadar oleh si pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani si terdidik menuju terbentuknya kepribadian yang utama.²⁴

Dari beberapa pandangan ahli pendidikan di atas, jelaslah bahwa pendidikan adalah suatu proses belajar dan penyesuaian individu-individu secara terus-menerus terhadap nilai-nilai budaya dan cita-cita masyarakat.

Pendidikan di sekolah mengarah pada dua istilah yaitu pendidikan dan pengajaran. Terkait dengan dua istilah tersebut para praktisi pendidikan, umumnya sepakat pada istilah pendidikan, bukan pengajaran. Terkait dengan makna visi misi mata pelajaran PAI di sekolah yakni untuk membentuk kepribadian murid sebagai pribadi yang utuh diperlukan pendidikan agama bukan pengajaran agama. Namun yang terjadi di lapangan, pada umumnya makna pendidikan Islam lebih mengarah pada makna pengajaran Islam, karena para pengajar agama Islam disekolah lebih mementingkan nuansa kognitif peserta didik dibanding dengan orientasi pembentukan kerakter siswa maupun sikapnya yang implementasinya dapat dilihat pada kehidupan sehari-hari siswa berupa akhlaknya.

²³Muhammad Natsir, *Capita Selecta* (Bandung: Gravenhage, 1954), h.87.

²⁴Muhammad Natsir, *Capita Selecta*, h. 59.

Masalah moralitas siswa dan remaja dewasa ini menjadi problem umum dan merupakan masalah yang belum ada jalan keluarnya. Mengapa para siswa, sejak SMA, telah banyak di antara mereka yang mengkonsumsi norkoba, melakukan kejahatan seksual, gampang marah, sangat labil secara emosional dengan reaksi yang berlebihan terhadap lingkungan sekitarnya dan tidak lagi memiliki rasa hormat pada yang orang tua dan pada gurunya? Dan masih banyak lagi problem lainnya.

Masalah tersebut memicu berbagai spekulasi, di antaranya adalah mungkin telah terjadi *mal-edukasi*, baik di sekolah maupun di lingkungan keluarga. Ataukah sekolah selama ini telah kehilangan fungsinya sebagai lembaga edukasi dan berlaku hanya sebatas *transfer of knowledge*? dan mengabaikan pada kepentingan membentuk moral para peserta didik. dari sekian banyak spekulasi dalam masalah tersebut, menurut penulis adalah meluruskan kembali makna dari term pendidikan terutama apa yang dimaksud dengan pendidikan agama Islam di sekolah-sekolah.

Menurut Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 3 menyatakan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Mahan Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dalam

Penjelasan Umum Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ditegaskan bahwa strategi pertama dalam melaksanakan pembaruan sistem pendidikan nasional adalah “pelaksanaan pendidikan agama dan akhlak mulia”²⁵. Dengan alasan tersebut dikeluarkanlah PP RI Nomor. 55/2007 disebutkan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (3) berbunyi: “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang”. Atas dasar amanat Undang-Undang Dasar 1945.

Dasar pendidikan agama Islam identik dengan dasar pemikiran ajaran Islam. Keduanya berasal dari sumber yang sama yaitu Alquran dan hadis. Kemudian dasar tersebut dikembangkan dalam ijma yang diakui, ijtihad, dan tafsir yang benar dalam bentuk hasil pemikiran yang menyeluruh dan terpadu tentang jagad raya, manusia, masyarakat dan bangsa, pengetahuan kemanusiaan dan akhlak, dengan merujuk kepada kedua sumber yaitu Alquran dan hadis sebagai sumber utama²⁶.

²⁵ Lihat Undang-undang RI No.20 Tahun 2003 *Tentang Sistem Pendidikan Nasional* (Cet. III; Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2006), h. 5-6.

²⁶ Umar Muhammad al-Toumi al-Syaibani, *Filsafat Pendidikan Islam*, terj. Hasan langgulung (Jakarta: Bulan Bintang, 1999), h. 43.

Pada dasarnya tujuan didirikannya sekolah berangkat dari cita-cita luhur yang termaktub di dalam pembukaan Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia, yakni; mencerdaskan kehidupan bangsa. Dahulu, ketika hanya sekolah negeri yang menjadi pilihan, mungkin orang tua tidak begitu sulit dalam memutuskan kemana menyekolahkan anaknya. Ini karena persepsi bersekolah di sekolah negeri merupakan prioritas utama, sedang di sekolah swasta hanya menampung siswa-siswa yang tidak diterima pada sekolah negeri. Untuk ukuran di kota Pinrang sekolah negeri cukup bergengsi terutama pada sekolah yang mendapat sertifikat sebagai sekolah RSBI. Sedangkan sekolah swasta terkadang belum menunjukkan prestasi akademiknya. Namun seiring dengan menjamurnya sekolah-sekolah swasta dan juga terbaginya sekolah negeri menjadi sekolah negeri favorit dan tidak, maka otomatis para orang tua harus cermat dalam memilih. Karena bagaimanapun anak-anak adalah investasi dunia-akhirat. Maka tidak heran jika para orang tua calon murid berloma-lomba memberikan anak-anaknya les tambahan agar dapat diterima disekolah favorit baik negeri maupun swasta. Berbagai persepsi kemudian muncul pada setiap orangtua khususnya di Kabupaten Pinrang, ketika dihadapkan pada beberapa pilihan sekolah, baik biaya maupun fasilitas yang ditawarkan disetiap sekolah. Di Pinrang sendiri saat ini perbedaan anatar SMA negeri dengan SMA swasta lebih kepada biaya yang dikeluarkan setiap bulan

oleh orang tua siswa, sebab jika melihat fasilitas justru sekolah negeri jauh lebih bagus dibanding sekolah swasta.

Berdasarkan uraian teori yang telah dikemukakan tersebut di atas maka dapat diketahui bahwa esensi sebuah pendidikan Islam di SMA baik swasta maupun SMA negeri adalah bagaimana mengupayakan peningkatan mutu sekolah. Upaya untuk menjadikan sebagai lembaga pendidikan yang berprestasi, tentunya melibatkan beberapa komponen pendidikan sebagai suatu sistem yang saling berkaitan, antara lain: peningkatan sarana prasarana, peningkatan pelaku pendidikan (SDM), dan peningkatan proses pembelajaran. Dari sekian komponen pendidikan tersebut, guru adalah komponen pendidikan yang memiliki peranan yang paling strategis dan terpenting, sebab gurulah sebetulnya yang paling menentukan kualitas dari suatu proses pembelajaran.

Keberhasilan guru dalam melaksanakan tugasnya sangat ditentukan oleh diri pribadi guru yang bersangkutan. Unsur dalam diri yang terkait dengan orientasi profesi guru adalah tingkat komitmen. Komitmen yang dimiliki oleh guru akan memberi kekuatan dan mendorong guru meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap profesinya.

Inti dari tugas guru sebagai profesi adalah proses pembelajaran. Agar proses pembelajaran berlangsung dalam situasi edukatif dan mencapai tujuan yang diharapkan, maka guru harus memiliki komitmen profesi untuk menjalankan tugas dengan profesional. Kompetensi guru dalam proses

pembelajaran adalah kompetensi profesional yaitu kemampuan guru dalam penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan kepribadian untuk melaksanakan proses pembelajaran.

Komitmen profesi guru dan kompetensi profesional guru dalam pelaksanaan pembelajaran akan berdampak pada kualitas pembelajaran. Kualitas pembelajaran yang meningkat akan berdampak pada kualitas output, yang pada akhirnya akan mempengaruhi secara umum peningkatan mutu sekolah.

Nuchalis Madjid membedakan penyelenggaraan pendidikan agama pada dua aspek. Pertama pendidikan agama yang bertujuan mencetak ahli agama, kedua pendidikan agama yang bertujuan untuk memenuhi kewajiban setiap pemeluk agama yang bertujuan untuk memahami dan melaksanakan pesan-pesan agama.²⁷ Pada aspek kedua inilah pendidikan agama Islam diselenggarakan di sekolah-sekolah dari tingkatan SD, SLTP, SMA dan perguruan tinggi (sebagai MKDU).

Untuk itu pengertian PAI di sekolah adalah satu mata pelajaran yang bertujuan untuk menghasilkan para siswa, memiliki jiwa agama dan taat menjalankan perintah agamanya. Dari pengertian ini dapat dipahami bahwa pengetahuan agama Islam yang diajarkan di sekolah umum,

²⁷ Syahidin, *Moral dan Kognisi Islam* (Cet. III; Alfabeta: Bandung, 2009), h. 2.

seperti halnya di sekolah menengah atas, diberi nama PAI, karena titik beratnya ada pada pembinaan kepribadian siswa, selain pengembangan wawasan mereka terhadap agama. Sebab itu segala upaya yang dilakukan dalam rangka PAI di sekolah hendaknya mengarah pada pembinaan akhlak karimah.



Ruang Lingkup Pendidikan Agama Islam

Mengenai ruang lingkup pendidikan agama Islam dapat dilihat pada klasifikasi makna agama Islam secara umum. Oleh para ulama, umumnya mereka membagi Islam dengan tiga aspek; yaitu Tuhan, manusia dan alam. Pada pembelajaran agama Islam, pembagian tersebut tercakup sebagai ruang lingkup PAI yang diajarkan di sekolah-sekolah umum, ialah wawasan tentang Aqidah (Tuhan), manusia dan alam (sosial muamalah).¹

1. Kurikulum Pendidikan Agama Islam

Kajian tentang konsep kurikulum Pendidikan Agama Islam tidak terlepas dari beberapa bagian yang terintegrasi dalam pelaksanaan kurikulum PAI. Bagian tersebut meliputi (1) konsep muatan dan penyusunan kurikulum PAI (2) jenis

¹Muhammad Daud, *Pendidikan Agama Islam* (Cet.I; Jakarta: Raja Gafindo, 2006), h. 49.

dan struktur kurikulum PAI, dan (3) Struktur dan karakteristik mata pelajaran (PAI).

2. Konsep Muatan dan Penyusunan Kurikulum PAI

Menurut Ansyar bahwa isi kurikulum mencakup tiga komponen utama yaitu (1) ilmu pengetahuan, (2) proses dan, (3) Nilai.² Nilai yang dimaksud bisa berupa nilai etika, estetika, teologi dan rasional. Zaiz mengemukakan berbagai pengertian kurikulum yakni: (1) kurikulum sebagai program pelajaran, (2) kurikulum sebagai isi pelajaran, (3) kurikulum sebagai pengalaman belajar yang direncanakan, (4) kurikulum sebagai pengalaman di bawah tanggung jawab sekolah, dan (5) kurikulum sebagai suatu rencana tertulis untuk dilaksanakan.³ Dalam konteks kurikulum PAI merupakan bagian yang integral dari kurikulum nasional, sebab mata pelajaran PAI merupakan salah satu dari program pengajaran yang harus ada dalam kurikulum pada setiap jenis dan jenjang pendidikan sekolah.⁴

Dalam sistem pendidikan kita, khususnya penyusunan kurikulum pendidikan agama dibawahi oleh dua departemen. Departemen Pendidikan Nasional yang dulunya Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan

²Ansyar, *Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum* (Jakarta: Dekdikbut Dikti, 1989), h. 14.

³Zaiz, *Curriculum: Principle and Foundation* (New York, Harper Publisher, 1976), h. 76.

⁴UU RI No. 2 tahun 1989 pasal 39 ayat 2.

menetapkan suatu kurikulum khusus untuk pendidikan agama yang diajarkan di sekolah-sekolah umum, seperti SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK, dan perguruan tinggi umum. Sedangkan Kementerian Agama menyusun kurikulum PAI untuk sekolah-sekolah agama, seperti Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, dan perguruan tinggi agama Islam seperti IAIN dan STAIN. Dari segi konteks kurikulum pendidikan agama yang ditetapkan oleh Depdikbud, penyusunannya tetap bekerjasama dengan Departemen Agama.

Terlepas dari persoalan kebijakan kurikulum sebagai keputusan pemerintah, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam rangka penyusunan dan pengembangan kurikulum. Dalam konteks ini khusus yang berkaitan dengan kurikulum pendidikan agama adalah bagaimana mengembangkan pokok-pokok ajaran Islam yang bukan hanya berdimensi vertikal tetapi keseimbangan dengan yang berdimensi horizontal.

Bentuk keyakinan dan kewajiban pengamalan dalam Islam dapat diklasifikasi menjadi tiga bagian yakni *aqidah*, *syariah*, dan *akhlak*, dalam konteks komunikasi, ketiga dimensi tersebut dapat diorganisir ke dalam dua komunikasi yakni komunikasi vertical dan horizontal. Dalam perspektif Islam makna belajar bukan hanya sekedar upaya perubahan perilaku. Konsep belajar dalam Islam merupakan konsep belajar yang ideal karena sesuai dengan nilai-nilai ajaran

Islam. Tujuan belajar dalam Islam bukanlah mencari rezeki di dunia ini semata, tetapi untuk sampai pada hakikat, memperkuat akhlak, artinya mencari atau mencapai ilmu yang sebenarnya dan akhlak yang sempurna.⁵

Belajar merupakan jendela dunia. Karena dengan belajar orang bisa mengetahui banyak hal, oleh sebab itu Islam amat menekankan masalah belajar. Allah pun bertanya dalam QS. Al-Zumar 39: 9:

..... قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ
أُولُو الْأَلْبَابِ

Terjemahnya;

.....Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran.⁶

Jawaban pertanyaan Allah ini bisa kita temukan dalam QS. al-Mujadilah 58 : 11

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا
يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ
وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

⁵Atiyah Al-Abrasyi, *Attarbiyatul Islamiyah* (Cet. I; Beirut: Dar al-Syamiyah, 1992), h. 7.

⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Cet; XI; Semarang: Toha Putra, 1997) h. 891.

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majelis", maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁷

Nabi Muhammad saw. Sangat mendorong supaya belajar dengan memberikan contoh-contoh praktis dan dengan lisan dan perbuatan. Beliau telah membebaskan para tahanan dari kaum kafir yang terpelajar, apabila mereka dapat mengajar beberapa orang muslim untuk membaca dan menulis. Ini bertanda bahwa Rasulullah Saw. Berkeinginan keras supaya pendidikan merata dikalangan orang Islam.⁸

Dalam keseluruhan proses pendidikan di sekolah, termasuk pendidikan agama Islam di sekolah-sekolah umum, kegiatan belajar merupakan kegiatan yang paling pokok. Ini berarti bahwa berhasil tidaknya pencapaian tujuan pendidikan, banyak bergantung bagaimana proses belajar yang dialami oleh anak didik.⁹ Belajar merupakan *key term* (istilah kunci) yang paling vital dalam setiap usaha

⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 325.

⁸Atiyah Al-Abrasyi, *Attarbiyatul Islamiyah* (Cet. I; Beirut: Dar al-Syamiah, 1992), h. 8.

⁹Slameto, *Belajar dan Faktor yang Mempengaruhinya* (Cet. IV; Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h. 1.

pendidikan, sehingga tanpa belajar sesungguhnya tidak pernah ada pendidikan. Sebagai suatu proses, belajar hampir selalu mendapat tempat yang luas dalam berbagai disiplin ilmu yang berkaitan dengan upaya pendidikan. Sedemikian arti belajar dalam mencapai pemahaman yang luas dan mendalam mengenai proses perubahan manusia.

Dalam konteks lain, pengadaan orang luar yaitu salah seorang pakar C.Y. Glock and R. Stark dalam Ancok, hampir memiliki kesamaan konsep dengan pandangan Islam yaitu mengklasifikasi lima dimensi keberagaman seseorang yaitu: (1) dimensi keyakinan (ideologis), (2) pribadatan atau praktek agama (rituality), penghayatan (eksperiensial), pengalaman (konsekwensial) dan (5) pengetahuan agama (intelektual).¹⁰

Klasifikasi dimensi keberagaman dalam Islam seperti yang disebutkan di atas telah dikembangkan menjadi beberapa disiplin ilmu keagamaan dalam Islam, misalnya ilmu tafsir, ilmu musthalah hadis, akhlak/tasawuf, dan ilmu fiqhi. Disiplin ilmu keislaman seperti itu menjadi bahan dalam penyusunan kurikulum pendidikan agama Islam baik ditingkatan sekolah agama maupun pada tingkatan sekolah umum pada jenjang sekolah. Ketika pengklasifikasian diatas dijabarkan dalam suatu kurikulum, maka akan melahirkan berbagai jenis kurikulum yang disesuaikan tingkat, jenis, dan perkembangan moral dan kepercayaan pengguna kurikulum.

¹⁰Ancok dan Suroso, *Psikologi Islam* (cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994), h. 54.

Dari sisi penyusunan kurikulum pendidikan agama Islam secara keilmuan terkait dengan persoalan tahap kematangan berpikir, tahap perkembangan, moral, dan tahap perkembangan kepercayaan anak. Menurut Fowler perkembangan tingkat kematangan kepercayaan seseorang, di bagi atas 7 tahap yaitu; (1) tahap kepercayaan awal dan elementer pada lingkungan, (2) kepercayaan intuitif proyektif, (3) tahap mitis harpiah, (4) tahap sintetis konvensional, (5) tahap kepercayaan individuatif reflektif, (6) tahap kepercayaan konjungtif, dan (7) tahap kepercayaan orientasi universal. kemudian perkembangan pertimbangan moral menurut Kohlberg terdapat 7 tahap yaitu (1) orientasi hukuman dan kepatuhan, (2) relativis instrumental, (3) orientasi kesepakatan antar pribadi, (4) orientasi hukum dan ketertiban, (5) orientasi kontrak sosial legalistik, (6) orientasi prinsip etika, dan orientasi prinsip etika universal¹¹. Dan tahap perkembangan intelektual anak seperti yang dikemukakan piaget ada 4 tingkat (1) tingkat sensori motor (kosong sampai 2 tahun), (2) tingkat pra operasional (2 sampai 7 tahun), tingkat operasional kongkrit (7 sampai 11 tahun), dan (4) tingkat operasional formal.¹²

¹¹Fowler J.W., *Teori Perkembangan Kepercayaan* (Cet.I; Yogyakarta: Kanisius, 1995), h. 78.

¹²Tohirin, *Psikologi Pembelajaran Pendidikan Islam* (cet III; Jakarta: Raja Grafindo, 2008), h. 130.

Perpaduan antara konsep isi atau substansi nilai ajaran agama Islam dengan pengurutan isi berdasarkan konsep perkembangan kematangan seseorang akan melahirkan suatu rancangan kurikulum pendidikan agama Islam yang efektif dan berdaya guna pada pembelajaran.

3. Kurikulum PAI di Lingkungan SMA

Di bawah ini penulis kemukakan jenis dan struktur kurikulum PAI :

1. Pengertian Kurikulum Pendidikan agama Islam.
2. Fungsi pendidikan Agama Islam yang meliputi: pengembangan, penyaluran, perbaikan, pencegahan, penyesuaian, sumber nilai dan pengajaran.
3. Tujuan pendidikan Agama Islam.
4. Ruang lingkup Pendidikan Agama Islam yang meliputi: hubungan manusia dengan Allah swt, hubungan manusia sesama manusia, hubungan manusia dengan dirinya sendiri, dan hubungan manusia dengan makhluk lain/ lingkungannya.
5. Ruang lingkup pengajaran yang terjabarkan ke dalam pokok-pokok bahasan yaitu: keimanan, ibadah, al-Quran, Akhlak, Muamalah, Syariah, dan Tarikh.
6. Pendekatan-pendekatan pembelajaran seperti pendekatan pengalaman, pembiasaan, emosional, rasional dan fungsional.
7. Kompetensi siswa setelah mengikuti program pembelajaran PAI.
8. Alokasi waktu.
9. Pola pembinaan.

10. Program pembelajaran.¹³

Dengan memperhatikan kesepuluh komponen yang ada dalam GBPP dapat dikemukakan, bahwa struktur kurikulum PAI mengikuti pola keterurutan (*sequence*) yang memiliki unsur pensintesis (*synheze*) yang memberikan indikator dalam perancangan pembelajaran PAI.

Pengertian PAI mengacu kepada usaha terencana dan terbimbing, melalui peoses pembelajaran yang kondusif untuk menyiapkan siswa supaya mampu meyakini, memahami dan mengamalkan ajaran agama Islam. Selain itu ditanamkan sikap-sikap mau menghargai pluralitas masyarakat yang ada disekelilingnya untuk mewujudkan persatuan nasional¹⁴. Dalam konteks pengertian PAI memberikan indikator betapa pentingnya fungsi pengalaman ajaran Islam. Terhadap kehidupan pribadi dan kemasyarakatan siswa. Mengacu kepada pengertian tersebut maka dalam GBPP PAI (1994) disebutkan bahwa peserta didik pada jenjang pendidikan menengah memiliki landasan iman yang benar dengan ditandai (1) taat beridrah, berzikir, berdoa, dan mampu menjadi imam; (2) mampu membaca al-qur'an dan menulisnya dengan benar, serta memahami kandungan makna, terutama yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek); (3) memiliki kepribadian yang muslim

¹³Tohirin, *Psikologi Pembelajaran Pendidikan Islam* (cet III; Jakarta: Raja Grafindo, 2008), h. 131.

¹⁴GBPP PAI 1994.

(berakhlak mulia); (4) memahami, menghayati dan mengambil manfaat tarikh Islam; dan (5) mampu menerapkan prinsip-prinsip muamalah dan syariah Islam dengan baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berdasarkan pancasila dan UUD 1945.¹⁵

Setelah memahami pengertian dan fungsi PAI dan kapabilitas siswa yang diharapkan seperti di atas, maka langkah selanjutnya merumuskan tujuan orientatif dan sekaligus tujuan pendukung PAI. Tujuan orientatif PAI adalah meningkatkan keimanan, pemahaman penghayatan dan pengamalan siswa tentang agama Islam, sehingga menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah swt serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut diperlukan berbagai konsep yang komprehensif. Konsep komprehensif tersebut meliputi (1) dimensi etika, (2) dimensi konten. Dimensi etika terkait dengan kode etik yang harus dimiliki oleh guru agama secara umum dan secara khusus guru agama Islam. Majid Irsan al-Kailani mengemukakan bahwa kode etik guru agama pada umumnya adalah (1) saling tolong menolong atas kebajikan dan takwa; (2) menjadi teladan bagi peserta didik dalam kebenaran, dan berusaha memelihara akhlak dan nilai-nilai Islam; (3) berusaha keras untuk menyebarkan ilmunya

¹⁵ GBPP PAI 1994.

dan tidak menganggap remeh; dan (4) berusaha mendalami dan mengembangkan ilmu¹⁶. Dalam konteks yang sama Muhammad Athiyah al-Abrasyi mengemukakan bahwa sifat-sifat yang harus dimiliki oleh guru agama adalah (1) bersikap zuhud, dan mengajar karena mencari keredahan Allah; (2) bersih atau suci, dalam arti bersih jasmani dan anggota badannya, jauh dari dosa, suci jiwanya, bebas dari dosa besar, riyak, hasad, permusuhan, perselisihan dan sifat-sifat tercela lainnya; (3) ikhlas dalam bekerja, dalam arti mengamalkan apa yang diucapkan, selaras antara ucapan dan perbuatan, tidak merasa malu untuk mengatakan “saya tidak tahu, jika ia tidak tahu”, merasa butuh untuk menambah ilmu, dan tidak segan-segan untuk menggali ilmu dari peserta didiknya; (4) suka pemaaf, yakni pemaaf terhadap peserta didik, mampu menahan diri, menahan amarah, lapang dada, sabar dan tidak mudah marah karena sebab-sebab sepele; (5) menjaga harga diri dan kehormatan; (6) mencintai peserta didik sebagaimana cintanya kepada anaknya sendiri; (7) memahami minat, minat dan kebiasaan, perasaan dan kemampuan peserta didik; dan (8) menguasai bidang yang diajarkan, serta senantiasa mendalaminya agar pengajarannya tidak dangkal¹⁷. Menurut Brikan al Qurasyi bahwa sifat-sifat guru adalah (1) dalam

¹⁶Majid Irsal al-Kailani, *Alfikir al-Tarbawi ibn Taimiyah* (Madinah: Maktabah Dar Alturats, 1986), h. 87.

¹⁷Muhammad Athiyah Al-Abrasyi, *Al-tarbiyah fi Al-Islam wa Falasifatuha*, (Mesir: Alhalaby, 1969), h. 54.

setiap tindakan mengajar harus bertujuan untuk mencari keridhaan Allah; (2) menerapkan ilmunya dalam bentuk perbuatan; (3) amanah dalam mentransformasikan ilmu; (4) menguasai dan mengalami bidang ilmunya; (5) mempunyai kemampuan mengajar; (6) bersikap lemah lembut dan kasih sayang terhadap peserta didik, dan (7) memahami tabiat, kemampuan dan kesiapan peserta didik.¹⁸ Berdasarkan pada kode etik di atas dapat disimpulkan bahwa seorang guru agama harus ikhlas melaksanakan tugasnya baik sebagai pengajar maupun pendidik.

Dari sisi konten dikembangkan dalam empat komunikasi yang diambil dari konsep dan prinsip yang ada dalam bahan pembelajaran PAI yang meliputi keimanan yang memiliki implikasi transcendental yang bermuara pada pemahaman bahwa, sekecil apapun yang dilakukan siswa terhadap kebaikan dan keburukan, pasti akan mendapat ganjaran dari Allahswt baik di dunia maupun di hari akhir kelak (Q.S. Al Imran 148) ibadah sebagai komunikasi manusia dengan Allah juga memiliki implikasi sosial kemasyarakatan, seperti antara lain zakat dan puasa. Demikian pula halnya dengan bidang lain seperti akhlak, muamalah syariah dan sejarah Islam. Kesemuanya memiliki dimensi vertical dan horizontal secara berimbang.

¹⁸Al-Qurasyi, *Alqudah wa Dauraha fi Altarbiyah al-Nasy* (Makka: Maktabah al-Faisaly, 1984), h. 73.

Meskipun persoalan kode etik guru dan keluasan konten telah teratasi, maka faktor lain yang biasa mempengaruhi kurang efektifnya pembelajaran pendidikan agama Islam adalah faktor dimensi kondisional. Salah satu variabel kondisi yang perlu dicermati adalah seperti tujuan orientatif yang disebutkan sebelumnya. Tujuan-tujuan tersebut sudah dianggap “*given*” misalnya penetapan tujuan pembelajaran yang ideal dan penetapan alokasi waktu yang hanya 2 x 45 menit perminggu. Kelihatannya hal itu sulit untuk dilaksanakan oleh guru agama. Namun gambaran kondisi seperti itu sudah diantisipasi dengan konsep pembelajaran lintas mata pelajaran yang teritegrasi dengan mata pelajaran lintas mata pelajaran yang terintegrasi dengan mata pelajaran agama.

Salah satu bentuk integral penyajian agama adalah adanya kebijakan pemerintah. Dalam konteks ini departemen Pendidikan dan Kebudayaan telah menyusun suplemen IMTAQ terhadap 10 mata pelajaran di SMP dan SMA. Kesimpulan suplemen itu adalah mata pelajaran; (1) PPKn, (2) Fisika, (3) Geografi, (4) Bahasa dan Sastra, (5) Kesenian, (6) Biologi, (7) Pendidikan Jasmani dan Kesehatan, (8) Sejarah, (9) Kimia, dan (10) Ekonomi.

Dengan adanya kesepuluh suplemen IMTAQ dimaksudkan agar supaya guru-guru mata pelajaran yang bukan guru agama diharapkan mampu mengintegrasikan nilai-nilai ajaran agama Islam ketika menyampaikan

pembelajaran selain mata pelajaran agama dikelas. Namun kenyataannya masih ada kendala yang dihadapi dalam mengintegrasikan suplemen IMTAQ ini yaitu, tidak semua guru bidang studi lain mempunyai kemampuan untuk mengintegrasikan nilai-nilai agama Islam ketika menjelaskan mata pelajaran mereka.



Karakteristik Pelajaran Pendidikan Agama Islam

Pendidikan agama Islam termasuk dalam kategori lintas disiplin keilmuan. Hal itu terlihat dari muatan yang ada dalam kurikulum PAI seperti pokok bahasan sejarah yang berupa fakta dan peristiwa, pokok bahasan syariah seperti perkawinan yang berupa konsep, pokok bahasan ibadah seperti shalat dan haji yang berupa prosedural dan prinsip, pokok bahasan keimanan seperti iman kepada hari akhir berupa prinsip.

Dengan demikian mata pelajaran pendidikan agama berbeda dengan mata pelajaran yang lain. Mata pelajaran PAI tidak semua pokok-pokok bahasan harus didekati dengan pendekatan ilmiah, tetapi ada pendekatan-pendekatan khusus yang harus dilakukan. Dalam konteks ini al-Gazali dalam kitabnya *Al-munqidz min dalal*, mengungkapkan "keadaan seperti ini tidak dicapai dengan perangkat argumentasi

maupun struktu pembicaraan, melainkan dengan cahaya yang dipancarkan oleh Allah swt. ke dalam dada. Cahaya itulah yang menjadi kunci pembuka kebanyakan pengetahuan. Oleh karena itu barang siapa yang menduga bahwa penemuan itu selalu bergantung pada argumentasi-argumentasi, berarti dia telah menyempitkan rahmat Allah yang Maha Esa¹.

Secara rinci, karakteristik mata pelajaran agama Islam di sekolah menengah adalah sebagai berikut:

1. PAI adalah mata pelajaran yang dikembangkan dari ajaran-ajaran Islam, sehingga PAI adalah bagian yang tidak terpisahkan dari ajaran Islam.
2. Ditinjau dari segi muatan pendidikannya, PAI merupakan mata pelajaran pokok yang menjadi satu komponen yang tidak dapat dipisahkan dengan mata pelajaran lain yang bertujuan untuk pengembangan moral dan kepribadian peserta didik. Semua mata pelajaran yang memiliki tujuan tersebut harus seiring dan sejalan dengan tujuan ingin dicapai oleh mata pelajaran PAI.
3. PAI di SMA, bertujuan untuk terbentuknya peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Allah swt., berbudi luhur, berakhlak mulia, dan memiliki pengetahuan yang cukup tentang Islam, terutama sumber ajaran dan sendi-sendi Islam lainnya, sehingga dapat dijadikan bekal untuk mempelajari berbagai bidang ilmu pengetahuan tanpa harus terbawa oleh pengaruh-pengaruh negatif yang mungkin ditimbulkan oleh ilmu dan mata pelajaran tersebut.

¹ Sulaiman, *Asas-Asas Ilmu Pengetahuan dalam Islam* (Cet.I; Jakarta: Pustaka, 1964), h. 37.

4. PAI adalah mata pelajaran yang tidak hanya mengantarkan peserta didik dapat menguasai berbagai kajian keilmuan, tetapi PAI lebih menekankan bagaimana peserta didik mampu menguasai kajian keIslaman tersebut sekaligus dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari ditengah-tengah masyarakat. Dengan demikian PAI tidak hanya menekankan pada aspek afektif dan psikomotorik.
5. Secara umum mata pelajaran PAI didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang ada pada Alquran dan Sunnah dan ijthiat yang telah dikembangkan oleh para ulama dalam bentuk fiqh dan detail-detail lainnya.
6. Prinsip-prinsip dasar PAI tertuang dalam tiga kerangka dasar Islam yaitu, aqidah, syariah dan muamalah. Dari tiga kerangka pokok inilah lalu berkembang ilmu-ilmu keIslaman lainnya.
7. Tujuan dari PAI di SMA adalah terbentuknya peserta didik yang berakhlak mulia. Tujuan ini sebenarnya misi utama dari kerasulan Nabi Muhammad Saw. Di samping juga PAI memperhatikan aspek-aspek jasmaniah lainnya.
8. PAI merupakan mata pelajaran wajib yang harus diikuti oleh setiap peserta didik, terutama yang beragama Islam.²

Itulah gambaran tentang karakteristik PAI di sekolah umum yang berimplikasi kepada tanggung jawab para peserta didik dengan pengembangan-pengembangan sepanjang tidak keluar dari karakteristik tersebut. Namun demikian

²Lihat, Depag RI, *Panduan Pengembangan Silabus Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam* (Jakarta: Direktorat jenderal manajemen pendidikan dasar dan menengah pembinaan sekolah menengah pertama, 2006), h. 2-3.

pembelajaran PAI tetap mengacu pada undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri yang berkompeten di bidangnya walaupun satuan pendidikan/sekolah sudah diberikan ototmi untuk menyusun KTSP.

Adapun komponen-komponen Pembelajaran PAI menurut Abuddin Nata yaitu;

- a. Penetapan perubahan yang diharapkan, kegiatan belajar ditandai oleh adanya usaha secara terencana dan sistematis yang ditujukan untuk mewujudkan adanya perubahan pada peserta didik, baik aspek wawasan, pemahaman, keterampilan, sikap dan sebagainya. Dalam menyusun strategi pembelajaran, berbagai perubahan tersebut harus ditetapkan secara spesifik, terencana dan terarah. Perubahan yang diharapkan selanjutnya harus dituangkan dalam tujuan pengajaran yang jelas dan kongret, menggunakan bahasa yang operasional dan dapat diperkirakan alokasi waktu dan lainnya yang dibutuhkan.³
- b. Penetapan pendekatan. Pendekatan adalah sebuah kerangka analisis yang akan digunakan dalam memahami sesuatu masalah. Dalam pendekatan tersebut terkadang menggunakan tolak ukur sebuah disiplin ilmu pengetahuan, tujuan yang ingin dicapai, langkah-langkah yang akan digunakan, atau sasaran yang dituju. Langkah yang harus ditempuh dalam menetapkan strategi pembelajaran adalah berkaitan dengan cara pendekatan belajar mengajar yang dianggap paling tepat dan efektif untuk mencapai

³Depag RI, *Panduan Pengembangan Silabus Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam* (Jakarta: Direktorat jenderal manajemen pendidikan dasar dan menengah pembinaan sekolah menengah pertama, 2006), h. 210.

sasaran. Bagaimana cara guru memandang suatu persoalan, konsep, pengertian dan teori apa yang digunakan dalam memecahkan suatu kasus, akan sangat mempengaruhi hasilnya.⁴ Dengan demikian maka seorang guru harus memastikan terlebih dahulu pendekatan mana yang akan digunakan dalam kegiatan belajarnya, apakah pendekatan dari segi sasaran, tujuan dan sebagainya.

- c. Penetapan metode. Penetapan metode sangat penting dilakukan dengan prinsip bahwa metode tersebut harus mencakup guru dan peserta didik. Sesuai dengan paradigma pendidikan yang memberdayakan, maka metode pengajaran itu sebaiknya mampu mendorong motivasi, kreatifitas, inisiatif para peserta didik untuk berinovasi, berimajinasi dan berprestasi.⁵

Metode pembelajaran mengacu pada strategi penyampaian isi pembelajaran. Keseluruhan komponen yang ada dirancang sedemikian rupa sehingga dapat mempengaruhi keefektifan, keefisienan, dan daya tarik isi pembelajaran. Komponen metode penyampaian isi pembelajaran terkait langsung dengan tingkat kompetensi pelaksanaan pembelajaran.⁶ Membagi komponen/variable metode penyampaian menjadi tiga yaitu (1) media pembelajaran adalah komponen strategi penyampaian yang

⁴ Depag RI, *Panduan Pengembangan Silabus Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam*, h. 212.

⁵ Depag RI, *Panduan Pengembangan Silabus Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam*, h. 2-3.

⁶ Dengeng, *Ilmu Mengajar: Taksonomi Variabel* (Jakarta: Dedikbud, 1989), h. 21

dapat dimuati pesan-pesan yang akan disampaikan kepada siswa, apakah itu orang, latar, atau bahan, (2) interaksi sibelajar dengan media adalah komponen strategi penyampaian pembelajaran yang mengacu kepada kegiatan apa yang dilakukan oleh pebelajar dan bagaimana peran media dalam merancang kegiatan belajar tersebut, dan (3) struktur belajar mengajar adalah komponen strategi penyampaian pembelajaran yang mengacu kepada apakah pebelajar dalam kelompok besar, kelompok kecil, perseorangan atautakah mandiri.

Secara teknis operasional metode penyampaian isi pembelajaran juga mengacu pada cara-cara dalam menyampaikan pembelajaran (menguraikan, memberi contoh dan pemberian latihan) kepada pebelajar lewat ceramah, diskusi, tanya jawab dan lain sebagainya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Pemilihan metode, hendaknya memperhatikan pola-pola kegiatan belajar, karena pola ini merupakan dasar di dalam memilih strategi pembelajaran. Pola dasar itu, ditinjau dari segi jumlah pebelajar yang belajar, (1). Pembelajaran untuk kelompok besar, (2). Pembelajaran untuk kelompok kecil, dan (3). Pembelajaran secara individual.⁷ Mengemukakan ada tiga macam pola kegiatan pembelajaran, namun segi peninjauannya berbeda dengan pendapat tersebut di atas. Pola

⁷ Kemp, JE, *The Intruktional Desing Proses* (New York: Harfer and Row, 1985), h. 65.

kegiatan belajar mengajar menurut Kemp adalah; (1) presentasi: disini pengajar menyampaikan informasi kepada pembelajar dengan ceramah, berbicara secara informal, menulis dipapan tulis, menunjukkan sesuatu dengan memakai media pembelajaran, (2) studi independen: disini pembelajar bekerja sendiri, misalnya dengan membaca buku, memecahkan masalah, menulis laporan, menggunakan laboratorium, perpustakaan media elektronik dan lain sebagainya, (3) interaksi pengajar dengan pembelajar, disini pengajar dengan pembelajar bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil untuk diskusi, Tanya jawab, mengerjakan proyek tertentu, menulis laporan, dan lain sebagainya. Dari sisi tipe isi materi Mager, menyatakan bahwa untuk memilih metode perlu diketahui hal-hal seperti (1) memperhatikan tujuan pembelajaran. Metode yang dipilih adalah metode apa yang dikehendaki oleh TKP, (2) memilih tehnik yang membawa pembelajar untuk menunjukkan keterampilan sesuai dengan yang diharapkan setelah bekerja. Bila setelah bekerja,pekerjaannya menghendaki ia pandai bicara (3) Memilih teknik yang menyebabkan pembelajar dapat mengerjakan paling banyak kegiatan dalam waktu tertentu.

Metode belajar mengajar harus ditetapkan dan direncanakan dengan baik. Demikian pula berbagai alat, sumber belajar, persiapan, pelaksanaan, tindak lanjut dan sebagainya, sebagai akibat penggunaan metode tersebut harus dipersiapkan dengan baik.

Pengorganisasian pembelajaran PAI pada sekolah menengah atas yaitu;

1. Tingkat Mikro

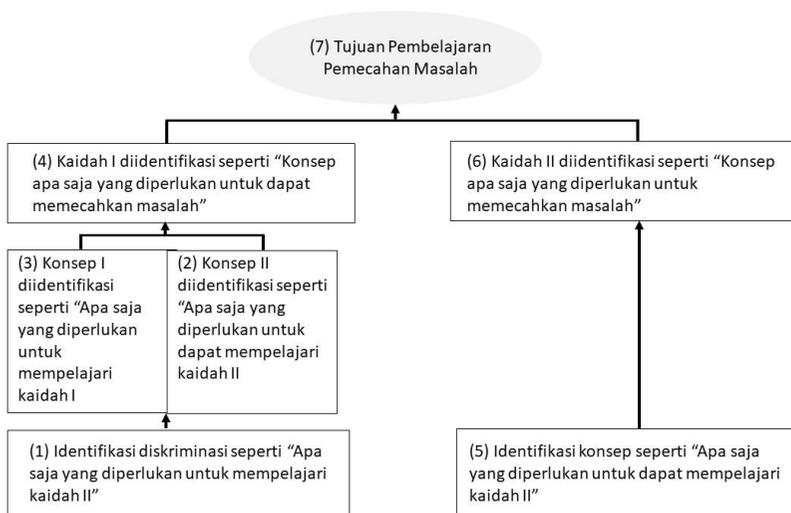
Strategi pengorganisasian pada tingkat mikro mengacu pada penataan isi pembelajaran terhadap satu konsep, prosedur, atau prinsip pada tingkat peristiwa pembelajaran⁸. Dewasa ini teori tentang pembelajaran khususnya yang berkaitan dengan rancangan isi pembelajaran sudah banyak dikembangkan, antara lain yang akan dijadikan model pengorganisasian seperti yang dikembangkan oleh Gagne tentang *Conditional learning*, teori tentang pembentukan konsep oleh Taba, dan teori pembelajaran pemahaman konsep oleh Bruner.

Pengorganisasian isi pembelajaran dapat dirancang dengan melalui peristiwa pembelajaran (*instruksional events*) atau dirancang dengan "*printed materials*" yang dapat digunakan untuk pembelajaran klasikal atau pembelajaran individual. Dalam konteks pengorganisasian pembelajaran pada peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam proses pembelajaran, Gagne (1992) mengorganisir pembelajaran berdasarkan klasifikasi ada tidaknya prasyarat belajar terhadap suatu kapabilitas belajar. Prasyarat belajar menurut Gagne, ada dua yakni prasyarat utama (*essential prerequisites*)

⁸ Gagne. RM, *The Condition off Learning*, (Ney York: Holt, Rinehart,1992), h. 81.

dan prasyarat pendukung, (*supportive prerequisites*)⁹.

Untuk kepentingan pengorganisasian, kapabilitas belajar intelektual diperlukan prasyarat dalam memperkenalkan keterampilan intelektual baru. Struktur belajar keterampilan intelektual menggunakan pendekatan struktur hirarki. Karakteristik struktur ini menggunakan pola pengurutan isi pembelajaran dari bawah ke atas (*bottom up*). Artinya tingkat pengetahuan yang lebih rendah dari pengetahuan baru yang akan diperkenalkan harus memperkenalkan dulu pengetahuan prasyarat utama atau prasyarat pendukung. Keterampilan intelektual yang paling tinggi atau keterampilan yang baru akan diperkenalkan kepada pebelajar diletakkan pada posisi paling atas sebagai acuan pencapaian tujuan khusus pembelajaran. Struktur



⁹Gagne. RM, *The Condition off Learning*, h. 92.

Kemudian untuk kapabilitas lainnya seperti strategi kognitif, sikap, dan keterampilan gerak juga memerlukan pengetahuan prasyarat baik utama maupun pendukung dari jenis kapabilitas lainnya. Bentuk dan jenis pengetahuan atau keterampilan tergantung kepada analisis pertanyaan “apa yang harus diketahui lebih awal oleh pembelajar dalam memahami suatu jenis kapabilitas belajar yang dikehendaki, kemudian pertanyaan berikutnya bagaimana mengurut atau mengelompokkan prasyarat belajar tersebut baik prasyarat utama maupun prasyarat pendukung. Untuk lebih mempertegas prasyarat-prasyarat dari kelima kapabilitas tersebut dapat dilihat pada prasyarat utama dan pendukung lima jenis hasil belajar yaitu:

No	Jenis hasil belajar	Prasyarat utama	Persyaratan pendukung
1	keterampilan intelektual	komponen keterampilan intelektual yang lebih sederhana	sikap, strategi, kognitif, informasi verbal
2	Strategi kognitif	keterampilan intelektual khusus	keterampilan intelektual informasi verbal, sikap
3	Informasi verbal	penataan kebermaknaan pengorganisasian informasi	keterampilan bahasa, strategi kognitif, sikap
4	Sikap	kadang keterampilan	sikap-sikap lain, informasi verbal

		intelektual dan informasi verbal	
5	keterampilan gerak	kadang keterampilan bagian dari kaedah prosedur	sikap-sikap

Sumber: Robert M Gagne, Lisle J. Briggs, Walter W. Wager, *Principle of Instructional Design*, New York: Holt, Rinehart and Winston. 1992.¹⁰

Pengorganisasian isi pembelajaran di atas telah dikembangkan oleh Gagne berdasarkan dengan jenis kapabilitas belajar yang dituntut dalam setiap peristiwa pembelajaran. Kemudian dari sisi isi pembelajaran khususnya isi pembelajaran konsep, secara khusus pengorganisasiannya dikembangkan oleh Taba dan Bruner.

Dalam pengorganisasian isi pembelajaran konsep yang dikembangkan oleh Taba, dikemukakan bahwa mengembangkan strategi pembelajaran konsep yang didasarkan pada pendekatan induktif dengan asumsi bahwa ada tiga postulat proses berpikir seseorang yaitu; (1) proses berfikir dapat dilatih atau diajarkan, (2) berfikir adalah transaksi aktif antara seseorang dengan lingkungan atau objek baik berupa benda, keadaan atau peristiwa , dan (3) proses

¹⁰Gagne. RM, *The Condition off Learning*, (Ney York: Holt, Rinehart,1992), h. 156

berfikir membutuhkan suatu keterurutan.¹¹ Ungkapan lain bahwa keterampilan berfikir seharusnya diajarkan dengan menggunakan strategi pembelajaran khusus yang dirancang untuk keperluan pembelajaran keterampilan berfikir. Untuk menjabarkan ketiga asumsi jenis strategi dalam pembelajaran pembentukan konsep, ketiga strategi itu adalah:

1. Pembentukan konsep yang meliputi tiga tahapan yaitu (1) identifikasi dan penyebutan satu-persatu dari data yang relevan dengan pokok permasalahan yang diperkenalkan kepada pebelajar, (2) pengelompokan contoh-contoh yang memiliki kesamaan karakteristik, dan (3) pengembangan kategori-kategori dan pemberian nama terhadap jenis pengelompokan tersebut.
2. Interpretasi data adalah proses operasi mental pebelajar dalam mencoba memberikan penafsiran, memberi pendapat, dan mengeneralisasi apa yang dilakukan pada tahapan awal. Kegiatan operasi mental yang tidak nampak ini meliputi (1) proses pemilahan, (2) pengkorelasian masing-masing soal-soal dan penentuan sebab dan dampak keterhubungannya, (3) melanjutkan apa yang telah diperoleh, implikasi penemuan dan meramalkan.
3. Penerapan konsep. Penerapan konsep merupakan strategi Taba dalam menerapkan prinsip-prinsip untuk menjelaskan fenomena baru yaitu memprediksi keterurutan dari kondisi-kondisi yang telah diperkenalkan kepada pebelajar. Kegiatan operasional yang Nampak pada diri pebelajar meliputi; (1) prediksi keterurutan berfikir pebelajar, penjelasan tentang

¹¹Taba H., *Teachers Handbook for Elementary Social Studies* (Reading: Addison Wesley,1980), h. 117.

fenomena yang berbeda dan pengajuan hipotesis, (2) penjelasan dan atau prediksi dan hipotesis pendukung.

Rancangan pembelajaran menurut batasan AECT, termasuk salah satu dari lima domain teknologi pembelajaran yaitu (1) desain, (2) pengembangan, (3) pemanfaatan, (4) pengelolaan, (5) evaluasi. Rancangan atau desain meliputi rancangan system pembelajaran, rancangan pesan, strategi pembelajaran dan karakteristik pebelajar. Khusus desain atau rancangan merupakan suatu proses mengspesifikasi kondisi pembelajar yang bertujuan menata strategi-strategi pembelajaran pada tataran makro dan mikro¹². Pada tataran makro meliputi perancangan program dan kurikulum dan pada tataran mikro meliputi program satuan pelajaran dan modul atau buku paket pembelajaran.

Dalam pelaksanaan pembelajaran, secara eksplisit terlihat bahwa ada rancangan pengorganisasian bahan ajar berupa buku teks, langkah-langkah penyampaian pembelajaran, dan evaluasi hasil pembelajaran. Konteks ini akan diuraikan komponen-komponen rancangan pembelajaran yang diasumsikan berpengaruh besar pada perolehan hasil belajar. Komponen-komponen tersebut meliputi (1) tujuan pembelajaran, (2) pembuatan epitome, (3) penyusunan isi pembelajaran.

¹²AECT, *Defenisis Teknologi Pendidikan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), h. 43.

a. Menyusun tujuan pembelajaran

Tujuan pembelajaran hakekatnya mengacu pada hasil pembelajaran. Berbagai pendapat ahli pembelajaran tentang pengertian tujuan pembelajaran, dapat dilihat dari beberapa sisi, yaitu (1) peran pembelajaran, (2) kepentingan pebelajar, dan (3) bentuknya.

Pada umumnya tujuan pembelajaran dapat diklasifikasi menjadi dua jenis, yakni tujuan umum pembelajaran (TUP) dan tujuan khusus pembelajaran (TKP).

1) Tujuan umum pembelajaran.

Tujuan umum pembelajaran, istilah lainnya adalah "goal" atau "terminal objective".¹³ Cakupannya luas dan merupakan pernyataan tentang perilaku akhir yang dapat dicapai oleh pebelajar setelah menyelesaikan satu pokok bahasan. Menurut Soekarwati TUP juga dapat dikatakan tujuan pembelajaran pokok-pokok bahasan.¹⁴ Menurut Degeng untuk mempreskripsikan strategi pengorganisasian pembelajaran yang optimal, TUP dapat dipilih menjadi dua, yaitu tujuan orientatif dan tujuan pendukung¹⁵. Tujuan umum yang bersifat orientasi dapat diklasifikasi menjadi (1) tujuan orientatif

¹³Gagne. RM, *The Condition off Learning*, (Ney York: Holt, Rinehart,1992), h.75.

¹⁴Soekarwati at.al, *peningkatan Rancangan Intriksional untuk Memperbaiki Kualitas Belajar Mengajar* (Cet. I; Malang: Unibraw, 1995), h. 62.

¹⁵Degeng, *Desain Pembelajaran* (Cet. I Malang: Ikip Malang, 1990), h. 89.

konseptual, (2) tujuan orientatif procedural, (3) tujuan orientatif teoritik. Tujuan pendukung dapat diklasifikasi menjadi tujuan pendukung prasyarat dan tujuan pendukung konteks.

2) Tujuan Khusus Pembelajaran

Penyusunan TKP dalam rancangan pembelajaran merupakan penguraian yang lebih rinci dan nyata dari suatu TUP, menyangkut sub-sub pokok bahasan tertentu. Dick dan Carey mengemukakan bahwa TKP adalah deskripsi rinci tentang apa yang dilakukan oleh pembelajar setelah selesai mengikuti unit pembelajaran tertentu¹⁶. Pernyataan ini yang mendasari pengertian TKP yang menjelaskan bahwa dalam TKP terkandung kemampuan khusus yang akan dicapai pembelajar setelah mengikuti pelajaran tertentu. Dick dan Carey menegaskan bahwa TKP merupakan komponen kunci dari suatu program pembelajaran.¹⁷ TKP dikembangkan dari keterampilan-keterampilan yang ada dalam analisis pembelajaran. Dengan demikian, rumusan TKP merupakan petunjuk bagi upaya memilih materi, pengstrukturian kegiatan belajar mengajar serta menjadi referensi pada saat mengembangkan instrumen evaluasi.

Inti pemberian TKP dalam penyusunan rancangan pembelajaran sebenarnya adalah apa yang harus dicapai

¹⁶Degeng, *Desain Pembelajaran*, h. 85.

¹⁷Degeng, *Desain Pembelajaran*, h. 86.

pembelajar pada akhir pengajaran. TKP dimaksudkan untuk membangun harapan-harapan dalam diri pembelajar tentang hal-hal yang harus dikuasai setelah belajar. Dick dan Carey mengemukakan bahwa penyusunan TKP harus mengandung tiga komponen seperti standar yang dilakukan oleh Mager, yaitu (1) menggambarkan keterampilan-keterampilan atau perilaku yang sudah teridentifikasi dalam analisis pembelajaran, (2) menggambarkan kondisi-kondisi yang ada ketika pembelajar sedang menyelesaikan tugasnya, dan (3) menggambarkan criteria yang akan digunakan untuk mengevaluasi unjuk kerja pembelajar yang sesuai dengan TKP.¹⁸

Terdapat beberapa keuntungan dalam menggunakan tujuan pembelajaran khusus kedalam TKP. Tentang hal ini dijelaskan oleh Percival dan Ellington (1998) bahwa (1) metode dan strategi mengajar dapat disesuaikan dengan tujuan yang akan dicapai, (2) pengajar dapat menentukan strategi penilaian dengan tepat karena tujuan pembelajaran telah diketahui dengan jelas, (3) pengajar dapat berlatih untuk mengembangkan diri dalam mengemukakan tujuan pengajarannya¹⁹ pencantuman TKP dalam rancangan

¹⁸Degeng, *Desain Pembelajaran*, h. 104.

¹⁹Percival dan Ellington, *Teknologi Pendidikan, terjemahan, Sudjarwo*, (Jakarta: Erlangga, 1988), h. 97.

pembelajaran penting sekali, karena memiliki fungsi. TKP mempunyai fungsi (1) dapat mengubah orientasi pembelajaran dari apa saja yang harus dikerjakan pembelajar sebagai hasil pembelajarannya, (2) memberikan arah kesesuaian pengembangan dan urutan pengajaran yang efektif, (3) dapat memberikan kemudahan pembelajar untuk belajar dengan efisien (4) menyediakan landasan untuk menciptakan hubungan baik dalam pengajaran, dan (5) memberikan kemungkinan pembelajar melakukan evaluasi diri, karena telah mengetahui apa yang harus dilakukan (6) memberikan kemudahan pembelajar dalam belajar dengan efisien.²⁰

Ciri-ciri tujuan pembelajaran yang baik menurut Percival dan Ellington (1988) adalah (1) maksud dan tujuan dan pesan harus jelas dan terinci, (2) pesan harus berisi perilaku pelajar, yang diharapkan dapat tercapai setelah pembelajar mengikuti proses belajar, (3) tujuan pembelajaran sebaiknya dinyatakan dengan kata kerja aktif yang operasional. Yaitu kata-kata yang dapat menunjukkan perbuatan yang dapat diamati dan hasil kegiatannya dapat diukur, (4) kata kerja aktif yang operasional biasanya bersifat spesifik, oleh karena itu kata kerja tersebut sering ditafsirkan seolah-olah

²⁰Percival dan Ellington, *Teknologi Pendidikan, terjemahan, Sudjarwo*, h. 45.

mengandung arti yang sempit dan kecil, (5) tujuan pembelajaran sebaiknya dipakai untuk menentukan strategi belajar, (6) tujuan pembelajaran dapat memudahkan pengajaran dalam menyusun tes dan pengukuran keberhasilan pembelajar dan belajar, dan (7) tujuan pembelajaran sebaiknya berorientasi pada pembelajar.²¹

Berdasarkan kajian teori mengenai hal ini, dapat dipahami bahwa penyusunan dan pemberitahuan tujuan pembelajaran dimaksudkan untuk mengarahkan perilaku belajar pembelajar. Sasaran akhir adalah tercapainya tujuan pembelajaran itu, yaitu pembelajar dapat menampilkan perilaku seperti yang dispesifikasikan dalam tujuan belajar²².

b. Menyusun kerangka isi (epitome)

Kerangka isi atau epitome hanya mencakup sebagian kecil isi bidang studi yang amat penting, yang nantinya akan berfungsi sebagai konteks atau kerangka dari isi-isi bidang studi yang lebih rinci.²³

Pola penyusunan kerangka isi dapat berbentuk struktur konseptual, struktur prosedural, atau struktur teoritik. Fungsi kerangka isi pada fase pertama untuk

²¹Percival dan Ellington, *Teknologi Pendidikan, terjemahan, Sudjarwo*, (Jakarta: Erlangga, 1988), h. 56.

²²Degeng, *Desain Pembelajaran*, h. 85.

²³Degeng, *Desain Pembelajaran*, h. 5.

menyediakan *ideational scaffolding* atau *Anchoring knowledge* bagi isi yang lebih rinci yang dipelajari kemudian. Dalam mempelajari informasi verbal, seperti fakta-fakta dan nama, kerangka isi dapat berfungsi sebagai konteks bagi informasi-informasi yang lebih rinci. Hal ini juga sejalan dengan konsepsi Ausabel yang menyatakan bahwa untuk belajar informasi baru, diperlukan adanya struktur kognitif. Dengan menggunakan konsepsi *memory theorist*,²⁴ epitome dapat berfungsi sebagai skema bagi asimilasi konsep-konsep atau informasi baru. Dengan kata lain penyajian epitome dapat berfungsi sebagai unit konseptual yang berupa skema.

Kalau berpijak pada teori *schema*, kerangka isi yang disajikan pada awal pembelajaran akan berfungsi sebagai *schemata* bagi asimilasi konsep-konsep atau informasi baru. Struktur kognitif abstrak pembaca merupakan *ideational scaffolding* untuk memperoleh informasi-informasi dalam teks. Hal ini berdasarkan asumsi bahwa *schemata/script/frames* menjadi celah/tambahan beberapa informasi yang disajikan dalam teks. Belajar dengan jaringan *network* hasilnya lebih baik dari pada hanya dengan deskripsi verbal saja. Dalam pembelajaran, bahan-bahan disajikan sebagai sebuah jaringan kerja (*network*), sehingga terjadi semacam kerangka yang menyediakan

²⁴Quillian, *Semantic Memory dalam Minsky (ed), Sematic Information: Processing: Canbridge* (Cet. I; Jakarta: MIT Press), h. 1968.

format-format untuk informasi baru dan layanan pencarian informasi baru lainnya yang terkait.²⁵

Penyusunan kerangka isi pada rancangan pembelajaran disusun dengan menyesuaikan dengan pokok bahasan yang akan disajikan. Sehingga sub-sub pokok bahasan tersebut merupakan perincian dari kerangka isi yang disajikan. Dengan penyajian kerangka isi diasumsikan pebelajar akan lebih mudah belajar sesuai dengan urutan yang dipelajari.

c. Menyusun Isi Pembelajaran

Berkaitan dengan isi pembelajaran, berbagai temuan penelitian mengungkapkan, bahwa pengorganisasian isi dengan urutan yang logis akan lebih efektif pada tingkatan peristiwa belajar, dan dapat membentuk hubungan peningkatan pemahaman dan ingatan terhadap isi bahasan. Salah satu bentuk akhir dari penyusunan isi pembelajaran adalah berbentuk materi dan bahan ajar. Materi bahan ajar bisa berbentuk modul, buku teks atau suplemen bahan-bahan cetakan yang terkait dengan pokok bahasan. Dick dan Reiser mengemukakan bahwa ada empat kriteria yang menjadi penilaian dalam penyusunan buku teks yaitu (1) konten, (2) penyajian, (3) rancangan pembelajaran, dan (4) penggunaan di kelas.²⁶

²⁵Hewson, *The Use Schema Theori In The Design*, (Nederland: Publisher, 1984), h. 139.

²⁶Degeng, *Desain Pembelajaran*, h. 89.

Dari sisi kriteria penyajian buku teks mengacu pada teori-teori motivasional, yaitu mendorong pebelajar tertarik untuk membaca dan mempelajari, sehingga memudahkan pebelajar untuk memahami konsep-konsep, prosedur, dan prinsip yang ada dalam buku teks. Indikator yang dapat dijadikan pedoman untuk menata penyajian buku teks adalah (1) materi disesuaikan dengan tingkat perkembangan intelektual pebelajar, (2) setiap bab-bab sebaiknya mengacu pada satu ide, (3) model penulisan yang sistematis berdasarkan prinsip-prinsip pengorganisasian bahan ajar. Pada tingkat mikro, pengorganisasian isi pembelajaran merupakan langkah awal dalam penyusunan sebuah buku teks.

Pembelajaran dapat meningkat hasilnya jika isi atau prosedur pembelajaran diorganisasi menjadi urutan-urutan yang bermakna. Bahan disajikan untuk belajar dalam besarnya bagian-bagian yang tergantung pada kerumitan dan kesulitan yang logis.

d. Penetapan Norma Keberhasilan.

Penetapan norma keberhasilan adalah evaluasi terhadap sasaran dan tujuan yang ingin dicapai. Dengan demikian maka sistem penilaian dalam kegiatan belajar mengajar adalah bagian dari strategi pembelajaran.



Model-model Pengembangan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam

Joyce mengemukakan ada empat rumpun model pembelajaran yang dapat dikembangkan sebagai model alternatif dalam dunia pendidikan yakni; [1] rumpun model interaksi sosial, yang lebih berorientasi pada kemampuan memecahkan berbagai persoalan sosial kemasyarakatan. [2] Model pemrosesan informasi, yakni rumpun pembelajaran yang lebih berorientasi pada penguasaan disiplin ilmu. [3] Model pengembangan pribadi, rumpun model ini lebih berorientasi pada pengembangan kepribadian peserta belajar. Selanjutnya model [4] behaviorism yakni model yang berorientasi pada perubahan perilaku.¹

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan terhadap beberapa model pembelajaran yang dapat meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran pendidikan agama

¹Syahidin, *Menelusuri Metode Pendidikan Dalam Alqur'an* (cet. I; Bandung: Alfabeta, 2009), h. 40-42.

Islam, diantaranya yang dianggap tepat adalah: model *classroom meeting*, *cooperative learning*, *integrated learning*, *constructive teaming*, *inquiry learning*, dan *quantum learning*.² Pembahasan lebih lanjut terhadap model-model tersebut, disajikan pada bagian berikut ini.

A. Model Classroom Meeting

Ahli yang menyusun model ini adalah William Glasser. Menurut Glasser dalam Moejiono sekolah umumnya berhasil membina perilaku ilmiah, meskipun demikian adakalanya sekolah gagal membina kehangatan hubungan antar pribadi. Kehangatan hubungan pribadi bermanfaat bagi keberhasilan belajar, agar sekolah dapat membina kehangatan hubungan antar pribadi, maka dipersyaratkan; [a] guru memiliki rasa keterlibatan yang mendalam, [b] guru dan siswa harus berani menghadapi realitas, dan berani menolak perilaku yang tidak bertanggung jawab, dan [c] siswa mau belajar cara-cara berperilaku yang lebih baik. Agar siswa dapat membina kehangatan hubungan antara pribadi, guru perlu menggunakan strategi mengajar yang khusus.³

²Abuddin Nata menyebutkan beberapa model pembelajaran dalam bukunya antara lain, Model Quantum Teaching, Model Problem Base Learning dan Model Kooperatif dan Interaktif Learning. Lihat Abuddin Nata, *Perspektif Islam Tentang Strategi Pembelajaran* (cet. I; Jakarta: Kencana, 2009), 233-279.

³Mudjiono, *Strategi Belajar Mengajar* (Jakarta: Depdikbud Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Proyek Pembinaan Tenaga Kependidikan, (1991/1992)) h. 155.

Model pertemuan tatap muka adalah pola belajar mengajar yang dirancang untuk mengembangkan pemahaman diri sendiri, dan rasa tanggung jawab pada diri sendiri dan kelompok. Strategi mengajar model ini mendorong siswa belajar secara aktif.⁴ Kelemahan model ini terletak pada kedalaman dan keluasan pembahasan materi, karena lebih berorientasi pada proses, sedangkan PAI di samping menekankan pada proses, juga menekankan pada penguasaan materi, sehingga materi perlu dikaji secara mendalam agar dapat dipahami dan dihayati serta diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

B. Model Cooperative Learning

Era global bukan hanya menuntut kualitas kemampuan memecahkan masalah, tetapi juga menuntut kemampuan untuk bekerja sama. Untuk mengembangkan kemampuan bekerja sama dan memecahkan masalah dapat menggunakan model *cooperative learning*.

Model ini dikembangkan salah satunya oleh Robert E, Slavin⁵ dengan membagi siswa dalam kelompok-kelompok diskusi, satu kelompok terdiri dari 4 atau

⁴Mudjiono. *Strategi Belajar Mengajar* (Jakarta: Depdikbud Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Proyek Pembinaan Tenaga Kependidikan, (1991/1992)), 156.

⁵Abuddin Nata, *Perspektif Islam tentang Strategi Pembelajaran*, h. 277-278. Lihat juga Collin, G. dan Dixon, *Integrated Learning, Australia*: (Cet. Australia: Bookshelf Publishing, 1991), h. 75.

5 orang, masing-masing kelompok bertugas menyelesaikan/memecahkan suatu permasalahan yang dipilih.

Beberapa karakteristik pendekatan *cooperative learning*, antara lain:

- 1) *Individual Accountability*, yaitu; bahwa setiap individu di dalam kelompok mempunyai tanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh kelompok, sehingga keberhasilan kelompok sangat ditentukan oleh tanggung jawab setiap anggota.
- 2) *Social Skills*, meliputi seluruh hidup sosial, kepekaan sosial dan mendidik siswa untuk menumbuhkan pengendalian diri dan pengarahan diri demi kepentingan kelompok. Keterampilan ini mengajarkan siswa untuk belajar memberi dan menerima, mengambil dan menerima tanggung jawab, menghormati hak orang lain dan membentuk kesadaran sosial.
- 3) *Positive Interdependence*, adalah sifat yang menunjukkan saling ketergantungan satu terhadap yang lain di dalam kelompok secara positif. Keberhasilan kelompok sangat ditentukan oleh peran serta anggota kelompok, karena siswa berkolaborasi bukan berkompetisi.
- 4) *Group Processing*, proses perolehan jawaban permasalahan dikerjakan oleh kelompok secara bersama-sama.⁶

Langkah-langkahnya:

- a) Guru merancang pembelajaran, mempertimbangkan dan menetapkan target pembelajaran yang ingin dicapai dalam pembelajaran. Guru juga menetapkan sikap dan

⁶Mudjiono. *Strategi Belajar Mengajar*, h. 76.

keterampilan-keterampilan sosial yang diharapkan dapat dikembangkan dan dipertahankan oleh siswa selama berlangsungnya pembelajaran. Guru dalam merancang materi tugas-tugas yang dikejakan bersama-sama dalam dimensi kerja kelompok.

- b) Dalam aplikasi pembelajaran di kelas, guru merancang lembar observasi kegiatan dalam belajar secara bersama-sama dalam kelompok kecil. Dalam menyampaikan materi, pemahaman dan pendalamannya akan dilakukan siswa ketika belajar secara bersamasama dalam kelompok. Pemahaman dan konsepsi guru terhadap siswa secara individu sangat menentukan kebersamaan dari kelompok yang terbentuk.
- c) Dalam melakukan observasi kegiatan siswa, guru mengarahkan dan membimbing siswa baik secara individual maupun kelompok, dalam pemahaman materi maupun mengenai sikap dan perilaku siswa selama kegiatan belajar.
- d) Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk mempresentasikan hasil kerjanya.⁷ Langka penerapan model cooperative learning mengharuskan guru memberikan beberapa penekanan terhadap nilai, sikap, dan perilaku sosial yang harus dikembangkan dan dilatihkan kepada para siswa.

C. Model Integrated Learning

Hakikat model pembelajaran terpadu menisbahkan suatu sistem pembelajaran yang memungkinkan siswa, baik secara individual maupun kelompok untuk aktif mencari, menggali dan menemukan konsep serta prinsip keilmuan

⁷Lihat, Mudjiono. *Strategi Belajar Mengajar*, h. 77.

secara holistik, bermakna dan otentik. Pembelajaran terpadu akan terjadi apabila peristiwa-peristiwa otentik atau eksplorasi topik/tema menjadi pengendali di dalam kegiatan belajar sekaligus proses dan isi berbagai disiplin ilmu/mata pelajaran/pokok bahasan secara serempak dibahas. Konsep tersebut sesuai dengan beberapa tokoh yang mengemukakan tentang model pembelajaran terpadu seperti berikut ini:

Rancangan pembelajaran terpadu secara eksplisit merumuskan tujuan pembelajaran. Dampak dari tujuan pengajaran dan pengiringnya secara langsung dapat terlihat dalam rumusan tujuan tersebut. Pada dampak pengiring umumnya, akan membuahkan perubahan dalam perkembangan sikap dan kemampuan berfikir logis, kreatif, prediktif, imajinatif.⁸

Pembelajaran terpadu salah satu diantara maksudnya adalah memadukan pokok bahasan atau sub pokok bahasan antara bidang studi, atau yang disebut juga lintas kurikulum, atau lintas bidang studi atau *interdisciplnery programe* mengemukakan tt.. *integration as the horizontal relationship of curriculum experiences*" dan "*...learning is more effective when facts and principles from one field can related to another, especially when applying this knowledge...*"⁹ Pembelajaran akan lebih efektif apabila guru dapat menghubungkan atau mengintegrasikan

⁸Depdiknas, *Pendekatan Kontekstual dalam Pembelajaran*. Jakarta: Depdiknas, (Diknas: Jakarta, 2002), h. 3.

⁹Depdiknas, *Pendekatan Kontekstual dalam Pembelajaran*, h. 4.

antara pelaksanaa pembelajaran di sekolah dengan temuan di lapangan. Oleh karena itu tugas guru adalah "*Curriculum workers should concern themselves with the problem of integrating subject matter.*"¹⁰

Ciri-ciri pembelajaran terpadu:

- 1) Holistik, suatu peristiwa yang menjadi pusat perhatian dalam pembelajaran terpadu dikaji dari beberapa bidang studi/pokok bahasan sekaligus untuk memahami fenomena dari segala sisi.
- 2) Bermakna, keterkaitan antara konsep-konsep lain akan menambah kebermaknaan konsep yang dipelajari dan diharapkan siswa mampu menerapkan perolehan belajarnya untuk memecahkan masalah-masalah yang nyata di dalam kehidupannya.
- 3) Aktif, pembelajaran terpadu dikembangkan melalui pendekatan diskoveri inkuiri. Siswa terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran, yang tidak secara langsung dapat memotivasi siswa untuk belajar.¹¹

Prinsip untuk menggali tema: *petama*, Tema hendaknya tidak terlalu luas, namun dengan mudah dapat digunakan untuk memadukan banyak bidang studi/pokok bahasan, *kedua*, Tema harus sesuai dengan tingkat perkembangan psikologi pembelajar, *ketiga*, Tema dipilih mempertimbangkan ketersediaan sumber belajar, *keempat* Tema harus bermakna artinya yang dipilih untuk dikaji harus memberikan bekal bagi siswa untuk belajar selanjutnya.

¹⁰Depdiknas, *Pendekatan Kontekstual dalam Pembelajaran*, h. 4.

¹¹Depdiknas, *Pendekatan Kontekstual dalam Pembelajaran*, h. 5.

Evaluasi yang menggunakan tes bentuk formal dimaksudkan untuk menentukan sejauhmana siswa telah menghafal suatu fakta. Pembelajaran yang efektif sebaiknya menekankan pemahaman konsep dan kemampuan di bidang kognitif, keterampilan, sosial dan afektif. Beberapa alternatif evaluasi pembelajaran terpadu antara lain:

- 1) Sebaiknya berbasis unjuk kerja sehingga selain memanfaatkan penilaian produk, penilaian terhadap proses, perlu mendapat perhatian yang lebih besar.
- 2) Setiap langkah evaluasi hendaknya siswa dilibatkan
- 3) Evaluasi dilakukan secara terus menerus, oleh karena itu hendaknya dimanfaatkan *portofolio assessment*.
- 4) Penilaian pembelajaran terpadu hendaknya memandang siswa sebagai satu kesatuan yang utuh.
- 5) Evaluasi hendaknya bersifat komprehensif dan sistematis.¹²

D. Model Constructivist Learning

Model konstruktivisme adalah salah satu pandangan tentang proses pembelajaran yang menyatakan bahwa dalam proses belajar (perolehan pengetahuan) diawali dengan terjadinya konflik kognitif. Konflik kognitif ini hanya dapat diatasi melalui pengetahuan diri (*self-regulation*). Dan akhirnya proses belajar, pengetahuan akan dibangun sendiri oleh anak melalui pengalamannya dari hasil interaksi dengan lingkungannya.

¹² Depdiknas, *Pendekatan Kontekstual dalam Pembelajaran* (Diknas: Jakarta, 2002), h. 7.

Konflik kognitif tersebut terjadi saat interaksi antara konsepsi awal yang telah dimiliki siswa dengan fenomena baru yang dapat diintegrasikan begitu saja, sehingga diperlukan perubahan/modifikasi struktur kognitif untuk mencapai keseimbangan. Peristiwa ini akan terjadi secara berkelanjutan selama siswa menerima pengetahuan baru.

Perolehan pengetahuan siswa diawali dengan diadopsinya hal yang baru sebagai hasil interaksi dengan lingkungannya. Kemudian hal baru tersebut dibandingkan dengan konsepsi awal yang telah dimiliki sebelumnya. Jika hal baru tersebut tidak sesuai dengan konsep awal siswa, maka akan terjadi konflik kognitif yang mengakibatkan adanya ketidakseimbangan dalam struktur kognisinya. Melalui proses akomodasi dalam kegiatan pembelajaran, siswa dapat memodifikasi struktur kognisinya menuju keseimbangan sehingga terjadi asimilasi. Namun tidak menutup kemungkinan siswa mengalami "jalan buntu" (tidak mengerti) karena ketidak-mampuan berakomodasi. Pada kondisi ini diperlukan alternatif strategi lain.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan guru dalam merancang model pembelajaran konstruktivisme adalah:

- a) Mengakui adanya konsep awal yang dimiliki siswa melalui pengalaman sebelumnya.
- b) Menekankan pada kemampuan *minds-on* dan *hands-on*.
- c) Mengakui bahwa dalam proses pembelajaran terjadi perubahan konseptual.

- d) Mengakui bahwa pengetahuan tidak dapat diperoleh secara pasif.
- e) Mengutamakan terjadinya interaksi sosial¹³

Tahapan model pembelajaran ini, meliputi:

Tahap *pertama*, siswa didorong agar mengemukakan pengetahuan awalnya tentang konsep yang akan dibahas. Bila perlu guru memancing dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan problematik tentang fenomena yang sering ditemui sehari-hari dengan mengkaitkan konsep yang akan dibahas. Siswa diheri kesempatan untuk mengkomunikasikan, mengilustrasikan pemahamannya tentang konsep itu.

Tahap *kedua*, siswa diberi kesempatan untuk menyelidiki dan menemukan konsep melalui pengumpulan, pengorganisasian, dan penginter-pretasian data dalam suatu kegiatan yang telah dirancang guru. Secara berkelompok didiskusikan dengan kelompok lain. Secara keseluruhan, tahap ini akan memenuhi rasa kengintahuan siswa tentang fenomena alam disekelilingnya.

Tahap *ketiga*, siswa memberikan penjelasan dan solusi yang didasarkan pada hasil observasinya ditambah dengan penguatan guru, maka siswa membangun pemahaman baru tentang konsep yang sedang dipelajari. Hal ini menjadikan siswa tidak ragu-ragu lagi tentang konsepnya.

¹³Depdiknas, *Pendekatan Kontekstual dalam Pembelajaran*, h. 8.

Tahap *keempat*, guru berusaha menciptakan iklim pembelajaran yang memungkinkan siswa dapat mengaplikasikan pemahaman konseptualnya, baik melalui kegiatan atau pemunculan dan pemecahan masalah-masalah yang berkaitan dengan isu-isu di lingkungannya.

E. Model Inquiry Learning

Model inkuiri dapat dilakukan melalui tujuh langkah yaitu: [a] merumuskan masalah, [b] merumuskan hipotesis, [c] mendefinisikan istilah [konseptualisasi], [d] mcngumpulkan data, [e] penyajian dan analisis data, [f]menguji hipotesis, [g] memulai inkuiri baru.¹⁴ Selain dari pendapat para ahli di atas mengenai langkah-langkah model inkuiri sosial, Joyce mengemukakan bahwa langkah-langkah penerapan inkuiri pada pokoknya adalah [a] orientasi. [b] hipotesis, [c] definisi, [d] eksplorasi, [e] pembuktian, [f] generalisasi. Pendapat Joyce mengenai langkah-langkah inkuiri sosial tersebut dapatdijelaskan sebagai berikut:

Tahap pertama menetapkan masalah sebagai pokok bahasan yang dirumuskan dalam bentuk pernyataan atau pertanyaan dan dibatasi dalam ruang lingkup yang tidak luas. Tahap kedua mencari beberapa hipotesis dan merumuskan hipotesis yang diajukan sebagai acuan. Tahap ketiga, definisi, eksprimen, menjelaskan dan menguraikan istilah-istiiah yang ada. Tahap keempat, eksplorasi, menguji hipotisis dengan

¹⁴Depdiknas, *Pendekatan Kontekstual dalam Pembelajaran*, h. 8.

logika deduksi. Tahap ke lima, pembuktian. Membuktikan hipotesis dengan fakta-fakta. Tahap keenam, generalisasi; menyatakan pemecahan yang dapat digunakan.¹⁵

F. Model Quantum Learning

Quantum Learning merupakan perubahan berbagai interaksi yang ada pada momen belajar. Interaksi-interaksi ini mencakup unsur-unsur belajar yang efektif yang mempengaruhi kesuksesan siswa.¹⁶ Dari kutipan tersebut diperoleh pengertian bahwa pembelajaran quantum merupakan upaya pengorganisasian bermacam-macam interaksi yang ada di sekitar momen belajar. Pembelajaran dikiaskan sebagai suatu simponi yang terdiri dari berbagai alat musik sebagai unsumya dan guru merupakan konduktor sebuah simfoni.

Prinsip-Prinsip pembelajaran Quantum:

- 1) Segalanya berbicara. Segala sesuatu yang ada di lingkungan kelas sampai *body language* dapat digunakan untuk pembelajaran. Mulai dan kertas yang dibagikan kepada siswa hingga rancangan pelajaran dapat digunakan untuk mengirim pesan belajar.
- 2) Segalanya bertujuan. Semua yang terjadi di kelas atau dalam proses perubahan, memiliki tujuan.
- 3) Pengalaman sebelum pemberian nama. Otak manusia berkembang karena adanya rangsangan yang kompleks,

¹⁵Collin, G. dan Dixon, *Integrated Learning* (Cet. Australia: Bookshelf Publishing, 1991), h. 110.

¹⁶Abuddin Nata, *Manajemen Pendidikan Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: PT. Prenada Media, 2001), h. 22.

yang mendorong rasa ingin tahu. Pembelajaran yang baik adalah yang diawali rasa ingin tahu, di mana anak memperoleh informasi tentang sesuatu sebelum mengetahui namanya.

- 4) Akui setiap saat. Pembelajaran merupakan proses yang mengandung resiko karena mempelajari sesuatu yang baru, biasanya tidak nyaman dan ketika mereka mulai jangka untuk belajar, mereka harus dihargai.
- 5) Jika layak dipelajari, maka layak pula diselenggarakan. Perayaan adalah sarapan pelajar juara. Dari prinsip ini tersirat bahwa keceriaan para siswa sejak awal masuk kelas dapat mendorong kemajuan dan meningkatkan asosiasi emosi positif dengan belajar.¹⁷

Model ini sebenarnya adalah model yang mengangakat potensi multi *Intelegence*. Mitos bahwa intelegensi manusia tidak berubah ternyata dibuktikan salah oleh Gardner dari Harvard setelah melakukan riset tentang kecerdasan manusia. Ia menyatakan bahwa IQ hanyalah salah satu kecerdasan manusia karena manusia memiliki multi intelegensi sebagai potensi yang sangat besar. Potensi itu terdiri dari kecerdasan logis-matematis, kecerdasan linguistik, verbal, kecerdasan kinestik, kecerdasan emosional [*interpersonal* dan *intrapersonal*], kecerdasan *naturalist*, kecerdasan intuisi, kecerdasan moral, kecerdasan eksistensial, kecerdasan spiritual. Namun dalam pendekatan quantum semua potensi itu harus digunakan seperti menurut Zohar dalam Vella,

¹⁷Abuddin, *Nata Manajemen Pendidikan Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di Indonesia*, h. 233.

"Quantum learning is that which uses all of the neural networks in the brain, putting things together in idiosyncratic and personal ways to make significant meaning."¹⁸ Dapat dibayangkan begitu banyaknya potensi yang terkandung pada diri siswa namun betapa tidak mudahnya untuk mengenalinya, apalagi menggunakannya untuk mengakses keberhasilan mereka di dalam kelas.

¹⁸Didownload di <http://www.puskur.or.id/kurikulum.shtml> pada tanggal 15 Januari 2010



Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam

Dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 045/U/2002, kompetensi diartikan sebagai perangkat tindakan cerdas dan penuh tanggungjawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan pekerjaan tertentu.¹

A. Pengertian Kompetensi Guru

Dalam kamus umum Bahasa Indonesia, istilah kompetensi berasal dari bahasa Inggris *competence* sama dengan *being competent, having ability, power, authority, skill, knowledge, attitude*, dll.² Hal senada dinyatakan oleh Houston yang

¹Kumpulan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah RI tentang Pendidikan (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, 2007), h. 277.

²Tim Reality, *Kamus Bahasa Indonesia* (Surabaya: Reality Publisher, 2008), h. 183.

dikutip oleh Samana bahwa kompetensi adalah kemampuan yang ditampilkan oleh guru dalam melaksanakan kewajibannya memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat.³ Oleh karena itu dapat dikatakan pengertian dasar kompetensi adalah kemampuan dan kecakapan. Seseorang yang dinyatakan kompeten di bidang tertentu adalah yang menguasai kecakapan kerja atau keahlian selaras dengan tuntutan bidang kerja yang bersangkutan, dengan kata lain kompetensi merujuk pada kinerja seseorang dalam suatu pekerjaan yang dibuktikan dengan sikap dan perilakunya.

Seseorang memiliki kompetensi apabila dapat melakukan sesuatu. Hal ini sesuai dengan pendapat Munandar bahwa kompetensi merupakan daya untuk melakukan sesuatu tindakan sebagai hasil dari pembawaan dan latihan.⁴ Pendapat Munandar ini, menginformasikan dua faktor yang mempengaruhi terbentuknya kompetensi, yakni (a) faktor bawaan, seperti bakat, dan (b) faktor latihan seperti hasil belajar.

³Lebih lanjut baca, menurut Littrell, kompetensi adalah kekuatan mental dan fisik untuk melakukan tugas atau keterampilan yang dipelajari melalui latihan dan praktik. Sedangkan menurut Stephen J. Kenezevich, kompetensi adalah kemampuan-kemampuan untuk mencapai tujuan organisasi. Kemampuan menurut Kenezevich merupakan hasil dari kemampuan-kemampuan yang banyak jenisnya, dapat berupa pengetahuan, keterampilan kepemimpinan, kecerdasan, dan lain-lain yang dimiliki seseorang untuk mencapai tujuan organisasi. A. Samana, *Profesionalisme Keguruan* (Yogyakarta: Kanisius, 1994), h. 44.

⁴Utami Munandar, *Mengembangkan Bakat dan Kreativitas Anak Sekolah (Petunjuk bagi para guru dan orang tua)* (Jakarta: Grasindo, 1992), h. 17.

Kompetensi guru adalah salah satu faktor yang mempengaruhi tercapainya tujuan pembelajaran dan pendidikan di sekolah/madrasah karena kompetensi guru pada hakikatnya tidak bisa dilepaskan dari konsep hakikat guru dan hakikat tugas guru. Kompetensi guru mencerminkan tugas dan kewajiban guru yang harus dilakukan sehubungan dengan tugas jabatan guru.

Kompetensi guru bukan merupakan istilah asing dalam dunia pendidikan. Secara sederhana, profesional berasal dari kata profesi yang berarti jabatan.⁵ Orang yang profesional adalah orang yang mampu melaksanakan tugas jabatannya secara maksimal, baik secara konseptual maupun aplikatif,⁶ dengan demikian dapat dikatakan guru yang profesional adalah guru yang memiliki kemampuan yang maksimal dalam melaksanakan tugas jabatan guru.

Bila ditinjau secara lebih detail, ada beberapa karakteristik kompetensi guru. Rebore dalam Kunandar mengemukakan bahwa karakteristik profesionalisme guru bisa ditinjau dari enam komponen, yaitu: (1) pemahaman dan penerimaan dalam melaksanakan tugas, (2) kemauan melakukan kerjasama secara efektif dengan peserta didik, guru, orang tua peserta didik, dan masyarakat, (3) kemampuan mengembangkan visi dan pertumbuhan jabatan secara terus

⁵M. Pidarta, *Manajemen Pendidikan Indonesia* (Edisi Revisi, Jakarta: Bina Aksara, 2008), h. 128.

⁶M. Pidarta, *Manajemen Pendidikan Indonesia*, h. 128.

menerus, (4) mengutamakan pelayanan dalam tugas, (5) mengarahkan, menekan dan menumbuhkan pola perilaku peserta didik, serta (6) melaksanakan kode etik jabatan.⁷

Di sisi lain, Glickman dalam Bafadal memberikan ciri kompetensi guru dari dua sisi, yaitu kemampuan berpikir abstrak (*abstraction*) dan komitmen (*commitment*) guru. Guru yang profesional memiliki tingkat berpikir abstrak yang tinggi, yaitu mampu merumuskan konsep, menangkap, mengidentifikasi, dan memecahkan berbagai macam persoalan yang dihadapi dalam tugas, dan juga memiliki komitmen yang tinggi dalam melaksanakan tugas.⁸ Dengan kata lain bahwa komitmen adalah kemauan kuat untuk melaksanakan tugas yang didasari dengan rasa penuh tanggung jawab.

Lebih lanjut, Welker dalam Saud mengemukakan bahwa kompetensi guru dapat dicapai bila guru ahli (*expert*), dalam melaksanakan tugas, dan selalu mengembangkan diri (*growth*).⁹ Demikian pula Glatthorn mengemukakan bahwa dalam melihat kompetensi guru, disamping kemampuan dalam melaksanakan tugas, juga perlu mempertimbangkan aspek komitmen dan tanggung jawab (*responsibility*), serta

⁷Utami Munandar, *Mengembangkan Bakat dan Kreativitas Anak Sekolah (Petunjuk bagi para guru dan orang tua)*, h. 114.

⁸Utami Munandar, *Mengembangkan Bakat dan Kreativitas Anak Sekolah (Petunjuk bagi para guru dan orang tua)*, h. 69.

⁹Udin Syaefuddin Saud, *Pengembangan Profesi Guru* (Bandung: CV.Alfabeta, 2010), h. 85.

kemandirian (*autonomy*).¹⁰ Bila ditelaah dari unsur-unsurnya, pada dasarnya ada dua aspek yang menentukan tingkat kompetensi guru dalam melaksanakan tugas, yaitu aspek kemampuan dan komitmen. Guru yang profesional adalah guru yang memiliki kemampuan dan komitmen dalam melaksanakan tugas-tugas jabatan. Dengan kata lain, memiliki komitmen dan semangat kerja yang baik dalam melaksanakan tugas. Untuk itu, dalam meningkatkan profesionalisme guru, perlu didukung dengan kemampuan yang baik dan semangat kerja yang tinggi.

Kompetensi guru menurut pakar pendidikan Soedijarto menyatakan, sebagai seorang guru agar mampu menganalisis, mendiagnosis, dan memprognosis situasi pendidikan.¹¹ Lebih lanjut Soedijarto mengemukakan bahwa guru yang memiliki kompetensi profesional perlu menguasai antara lain: (a) disiplin ilmu pengetahuan, (b) bahan ajar yang diajarkan, (c) pengetahuan tentang karakteristik peserta didik, (d) pengetahuan tentang filsafat dan tujuan pendidikan, (e) pengetahuan serta penguasaan metode dan model pembelajaran, (f) penguasaan terhadap prinsip-prinsip

¹⁰Udin Syaefuddin Saud, *Pengembangan Profesi Guru*.

¹¹Lebih lanjut baca, kompetensi guru berkaitan dengan profesionalisme, yaitu guru yang profesional adalah guru yang kompeten (berkemampuan) karena itu, kompetensi profesionalisme guru dapat diartikan sebagai kemampuan dan kewenangan guru dalam menjalankan profesi keguruannya dengan kemampuan tinggi. Soedijarto, *Memantapkan Sistem Pendidikan Nasional* (Jakarta: Gramedia Widiasarana, 1993), h. 60.

teknologi pembelajaran, (g) pengetahuan terhadap penilaian, dan mampu merencanakan pembelajaran, guna kelancaran proses pendidikan.¹²

Tuntutan atas berbagai kompetensi ini mendorong guru untuk memperoleh informasi yang dapat memperkaya kemampuan agar tidak mengalami ketinggalan dalam kompetensi profesionalnya. Kompetensi guru merupakan gambaran hakikat kualitatif dari perilaku guru atau tenaga kependidikan yang tampak sangat berarti.¹³ Dengan demikian, kompetensi guru merupakan kapasitas yang dimiliki guru dalam melaksanakan tugas profesinya. Tugas profesional guru bisa diukur dari seberapa jauh guru mendorong proses pembelajaran yang efektif dan efisien.

Cooper dalam Sudjana, mengemukakan empat kompetensi guru, yakni (1) mempunyai pengetahuan tentang belajar dan tingkah laku manusia, (2) mempunyai pengetahuan dan menguasai bidang studi yang dibinanya, (3) mempunyai sikap yang tepat tentang diri sendiri, sekolah, dan teman sejawat, serta (4) mempunyai keterampilan teknik pembelajaran.¹⁴ Pendapat yang hampir sama dikemukakan oleh Grasser dalam Sudjana, bahwa ada empat hal yang harus

¹²Soedijarto, *Memantapkan Sistem Pendidikan Nasional* (Jakarta: Gramedia Widiasarana, 2003), h. 61.

¹³Soedijarto, *Memantapkan Sistem Pendidikan*, h. 71.

¹⁴Nana Sudjana, *Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar* (Bandung: Sinar Baru, 2009.) h. 116.

dikuasai guru, yakni: menguasai bahan pelajaran, kemampuan mendiagnosis tingkah laku peserta didik, kemampuan melaksanakan proses pembelajaran, dan kemampuan mengukur hasil belajar peserta didik.¹⁵ Sementara itu, Sudjana telah membagi kompetensi guru dalam tiga bagian, yaitu sebagai berikut:

1. Kompetensi bidang kognitif, artinya kemampuan intelektual, seperti penguasaan mata pelajaran, pengetahuan mengenai mengajar, pengetahuan tentang belajar dan tingkah laku individu, pengetahuan tentang bimbingan penyuluhan, pengetahuan tentang administrasi kelas, pengetahuan tentang cara menilai hasil belajar peserta didik, pengetahuan tentang masyarakat, serta pengetahuan umum lainnya.
2. Kompetensi bidang sikap, artinya kesiapan dan kesediaan guru terhadap berbagai hal berkenaan dengan tugas dan profesinya. Misalnya, sikap menghargai pekerjaannya, mencintai dan memiliki perasaan senang terhadap mata pelajaran yang dibinanya, sikap toleransi terhadap sesama teman profesinya, memiliki kemauan yang keras untuk meningkatkan hasil pekerjaannya.
3. Kompetensi perilaku/performance, artinya kemampuan guru dalam berbagai keterampilan/berperilaku, seperti keterampilan dalam membimbing, menilai, menggunakan alat bantu pembelajaran, bergaul atau berkomunikasi dengan peserta didik, keterampilan menumbuhkan semangat belajar peserta didik, keterampilan menyusun persiapan perencanaan

¹⁵Nana Sudjana, *Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar*.

pembelajaran, keterampilan melaksanakan administrasi kelas, dan lain-lain.¹⁶

Ketiga bidang kompetensi di atas tidak berdiri sendiri, tetapi saling berhubungan dan saling mempengaruhi satu sama lain karena ketiga bidang tersebut (kognitif, sikap dan perilaku) mempunyai hubungan hirarkis, artinya saling mendasari satu sama lain, kompetensi yang satu mendasari kompetensi lainnya.

B. Macam-Macam Kompetensi Guru

Menurut Rusyan, macam-macam kompetensi yang harus dimiliki oleh guru yaitu:

1. Kompetensi profesional, artinya guru harus memiliki pengetahuan yang luas dari *subject matter* (bidang studi) yang akan diajarkan serta penguasaan metodologi dalam arti memiliki konsep teoritis dalam memilih metode dalam proses pembelajaran.
2. Kompetensi personal, artinya sikap pribadi yang mantap sehingga mampu menjadi sumber intensifikasi bagi subjek. Dalam hal ini berarti memiliki kepribadian yang pantas diteladani, mampu melaksanakan kepemimpinan seperti yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu "*Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangun karso, Tut Wuri Handayani*".
3. Kompetensi sosial, artinya guru harus menunjukkan atau mampu berinteraksi sosial, baik dengan peserta didiknya maupun dengan sesama guru dan kepala sekolah, bahkan dengan masyarakat luas.

¹⁶Nana Sudjana, *Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar*, h. 122.

4. Kompetensi untuk melakukan pembelajaran yang sebaik-baiknya yang berarti mengutamakan nilai-nilai sosial dari nilai material.¹⁷

Dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dikemukakan bahwa pendidikan harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.¹⁸ Selanjutnya dalam penjelasannya dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan pendidikan sebagai agen pembelajaran (*learning agent*) adalah peran pendidik antara lain sebagai fasilitator, pemacu, dan pemberi inspirasi belajar bagi peserta didik.

Sehubungan dengan pernyataan di atas, guru atau pendidik sebagai agen pembelajaran maka guru harus memiliki empat jenis kompetensi, yakni kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial. Dalam konteks itu maka kompetensi guru dapat diartikan sebagai kebulatan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diwujudkan dalam bentuk perangkat tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab. Keempat jenis kompetensi guru yang dipersyaratkan beserta subkompetensi dan indikator essensialnya diuraikan sebagai berikut:

¹⁷Tabrani Rusyan, *Pendekatan dalam Proses Belajar Mengajar* (Bandung: CV. Remaja Karya, 1998), h. 76.

¹⁸Peraturan Pemerintah RI Nomor 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 28.

Pertama, Kompetensi pedagogik. Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dikemukakan bahwa kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.¹⁹

Secara substantif kompetensi ini mencakup hal-hal berikut: (1) memahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip perkembangan kognitif, prinsip kepribadian, dan mengidentifikasi pemahaman awal peserta didik. (2) merancang pembelajaran; menerapkan teori belajar dan pembelajaran, menentukan strategi pembelajaran berdasarkan karakteristik peserta didik, kompetensi yang ingin dicapai, dan materi ajar serta menyusun rancangan pembelajaran berdasarkan strategi yang dipilih, (3) melaksanakan pembelajaran yang kondusif. (4) merancang dan melaksanakan evaluasi (*assesement*) proses dan hasil belajar secara berkesinambungan dengan berbagai metode; menganalisis hasil belajar untuk menentukan tingkat ketuntasan belajar (*mastery level*), memanfaatkan hasil penilaian pembelajaran untuk perbaikan kualitas program

¹⁹Departemen Agama, *Kumpulan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah RI tentang Pendidikan*, Penjelasan pasal 28 ayat (3) butir a, h. 230.

pembelajaran secara umum. (5) mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi; memfasilitasi peserta didik untuk pengembangan berbagai potensi akademik dan memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan berbagai potensi non akademik.²⁰

Kedua, Kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia.²¹ Pribadi guru memiliki andil yang sangat besar terhadap keberhasilan pendidikan, khususnya dalam kegiatan pembelajaran. Pribadi guru juga sangat berperan dalam membentuk pribadi peserta didik, karena manusia merupakan makhluk yang suka mencontoh termasuk mencontoh pribadi gurunya dalam membentuk pribadi peserta didik.

Secara rinci setiap elemen kepribadian tersebut dapat dijabarkan sub-kompetensi dan indikator esensialnya sebagai berikut: (1) memiliki kepribadian yang mantap dan stabil: bertindak sesuai dengan norma hukum, norma sosial, bangga sebagai pendidik, dan memiliki konsistensi dalam bertindak sesuai dengan norma, (2) memiliki kepribadian yang dewasa: menampilkan kemandirian dalam bertindak sebagai pendidik

²⁰Oemar Hamalik, *Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), h. 104.

²¹Departemen Agama, *Kumpulan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah RI tentang Pendidikan*, Penjelasan pasal 28 ayat (3) butir b, h. 230.

dan memiliki etos kerja sebagai pendidik. (3) memiliki kepribadian yang arif: menampilkan tindakan yang yang berdasarkan pada kemamfaatan peserta didik, sekolah, dan masyarakat dan menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dan bertindak. (4) memiliki kepribadian yang berwibawa: memiliki prilaku yang berpengaruh positif terhadap peserta didik dan memiliki perilaku yang disegani. (5) memiliki akhlak mulia dan dapat menjadi teladan: bertindak sesuai dengan norma religious (imtaq, jujur, ikhlas, suka menolong), dan memiliki perilaku yang diteladani peserta didik.²²

Dalam rangka menumbuhkan kompetensi kepribadian ini, Mulyasa merancang sebuah konsep budaya pendidikan yang diharapkan akan menjadi ajang pembangunan karakter bangsa (*nation building*), budaya pendidikan yang sedang dirancang tersebut adalah budaya malu, budaya mutu, budaya kerja, budaya disiplin, dan budaya ibadah.²³

Kinerja guru yang ditunjukkan dapat diamati dari kemampuan guru dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang tentunya sudah dapat mencerminkan suatu pola kerja yang dapat meningkatkan mutu pendidikan ke arah yang lebih baik. Seseorang akan bekerja secara profesional bilamana memiliki kemampuan kerja yang tinggi dan

²²Oemar Hamalik, *Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi*, h. 108.

²³E. Mulyasa, *Menjadi Guru Profesional (Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan)*, h. 131.

kesungguhan hati untuk mengerjakan dengan sebaik-baiknya. Jadi betapapun tingginya kemampuan seseorang, ia tidak akan bekerja secara profesional apabila tidak memiliki kepribadian dan dedikasi dalam bekerja yang tinggi.

Guru yang memiliki kinerja yang baik tentunya memiliki komitmen yang tinggi dalam pribadinya, artinya tercermin suatu kepribadian dan dedikasi yang paripurna. Guru yang memiliki komitmen yang rendah biasanya kurang memberikan perhatian kepada peserta didik, demikian pula waktu dan tenaga yang dikeluarkan untuk meningkatkan mutu pembelajaran yang sangat sedikit. Sebaliknya, seorang guru yang memiliki komitmen yang tinggi biasanya tinggi sekali perhatiannya dalam bekerja. Demikian pula waktu yang disediakan untuk peningkatan mutu pendidikan sangat banyak.

Ketiga, Kompetensi Sosial. Kompetensi sosial berkenaan dengan kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.²⁴ Kompetensi ini memiliki subkompetensi dengan indikator esensial yaitu: (1) mampu berkomunikasi dan bergaul sesama secara efektif dengan peserta didik, (2) mampu berkomunikasi dan bergaul sesama pendidik dan tenaga kependidikan, dan (3) mampu

²⁴Departemen Agama, *Kumpulan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah RI tentang Pendidikan*, Penjelasan pasal 28 ayat (3) butir d, h. 230.

berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan orang tua/wali peserta didik dan masyarakat sekitar.²⁵ Guru adalah makhluk sosial, yang dalam kehidupannya tidak bisa terlepas dari kehidupan sosial masyarakat dan lingkungannya. Guru dalam menjalani kehidupan seringkali menjadi tokoh panutan, dan identifikasi bagi peserta didik dan lingkungannya. Ashraf mengungkapkan bahwa Imam Al-Gazali menempatkan profesi guru pada posisi tertinggi dan termulia dalam berbagai tingkat pekerjaan masyarakat.²⁶

Keempat, Kompetensi Profesional. Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan.²⁷

Secara umum kompetensi guru dapat diidentifikasi pada ruang lingkup kompetensi profesional guru sebagai berikut: (1) mengerti dan dapat menerapkan landasan kependidikan

²⁵Oemar Hamalik, *Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi*, h. 115.

²⁶Ali Ashraf, *Horison Baru Pendidikan Islam* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), h. 226.

²⁷Departemen Agama, *Kumpulan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah RI tentang Pendidikan*, *op.cit.*, Penjelasan pasal 28 ayat (3) butir c, h. 230.

baik filosofi, psikologis, sosiologis, dan sebagainya, (2) mengerti dan dapat menerapkan teori belajar sesuai taraf perkembangan peserta didik, (3) mampu menangani dan mengembangkan bidang studi yang menjadi tanggungjawabnya, (4) mengerti dan dapat menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi, (5) mampu mengembangkan dan menggunakan berbagai alat, media dan sumber belajar yang relevan, (6) mampu mengorganisasikan dan melaksanakan program pembelajaran, (7) mampu melaksanakan evaluasi hasil belajar peserta didik, (8) mampu menumbuhkan kepribadian peserta didik.²⁸

Adapun Crow dan Crow dalam Hamalik menyatakan kompetensi guru dalam melaksanakan pembelajaran meliputi: penguasaan *subjectmatter* yang akan diajarkan; keadaan fisik dan kesehatannya; sifat-sifat pribadi dan kontrol emosinya; memahami sifat, hakikat dan perkembangan manusia; pengetahuan dan kemampuannya untuk menerapkan prinsip-prinsip belajar; kepekaan dan aspirasinya terhadap perbedaan-perbedaan kebudayaan, agama, dan etnis; minatnya terhadap perbaikan profesional dan pengayaan kultural yang terus menerus dilakukan.²⁹

²⁸Oemar Hamalik, *Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi*, h. h. 112.

²⁹Oemar Hamalik, *Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi*, h. 82.

Dalam kegiatan profesionalnya, guru harus memiliki kemampuan untuk merencanakan program pembelajaran dan kemampuan untuk melaksanakan pembelajaran. Kedua kemampuan ini diperoleh melalui latihan yang berkesinambungan, baik pada masa pendidikan perajabatan maupun pada masa pendidikan dalam jabatan. Untuk itu, perlu disusun alat penilai kemampuan guru (APKG), alat ini berfungsi untuk mengukur kemampuan guru,³⁰

Adapun penyusunan alat penilaian kemampuan Guru, yaitu;

1. Kemampuan membuat perencanaan pembelajaran yang meliputi; Perencanaan pengorganisasian bahan pembelajaran, pengelolaan kegiatan pembelajaran, pengelolaan kelas, penggunaan media dan sumber belajar, dan penilaian hasil pembelajaran.
2. Untuk kemampuan pembelajaran dalam kelas meliputi: penggunaan metode, media, dan bahan latihan, berinteraksi dengan peserta didik, mendemonstrasikan khazanah metode pembelajaran, mendorong dan mengarahkan ketertiban peserta didik dalam kelas, mendemonstrasikan penguasaan materi, mengorganisasikan waktu, ruang, dan bahan perlengkapan, serta melakukan evaluasi hasil belajar.

³⁰Lebih lanjut baca APKG adalah suatu alat untuk mengukur tingkat kualitas kemampuan guru yang bersifat *generic essentials*. Dikatakan *generic* karena kemampuan tersebut secara umum harus dimiliki oleh setiap guru mata pelajaran. Adapun APKG ini terdiri dari dua bagian, yaitu APKG I digunakan untuk menilai kemampuan guru dalam merencanakan pembelajaran, sedangkan APKG II digunakan untuk menilai kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran. Sudarwan Danim, *Profesionalisasi dan Etika Profesi Guru* (Bandung: Cv. Alfabeta, 2011), h. 126.

3. Kemampuan mengadakan hubungan antara pribadi peserta didik meliputi: Membantu mengembangkan sikap positif pada diri peserta didik, bersikap terbuka dan luwes terhadap peserta didik dan orang lain, serta menampilkan kegairahan dan kesanggupan dalam kegiatan pembelajaran.³¹

Pendapat senada oleh Agung yang menjabarkan APKG ke dalam dua dimensi (aspek) kemampuan guru dengan indikator-indikatornya, yaitu: Kemampuan membuat rencana pembelajaran, yang terdiri dari: mengorganisasikan bahan pembelajaran, merencanakan pengelolaan kegiatan pembelajaran, pengelolaan kelas, merencanakan penggunaan media dan sumber pembelajaran, merencanakan penilaian presetas peserta didik untuk kepentingan pembelajaran, dan kemampuan dalam praktik pembelajaran, terdiri atas: Penggunaan metode, media, dan bahan latihan sesuai dengan tujuan pembelajaran, berkomunikasi dengan peserta didik, men-demonstrasikan khazanah metode pembelajaran, mendorong dan menggalakkan keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran, mendemonstrasikan penguasaan mata pelajaran dan relevansinya, mengorganisasi waktu, ruang, bahan, dan perlengkapan pembelajaran, serta melaksanakan evaluasi pencapaian peserta didik dalam proses pembelajaran.³²

³¹Sudarwan Danim, *Profesionalisasi dan Etika Profesi Guru*, h. 129.

³²Iskandar Agung, *Peningkatan Kreativitas Pembelajaran bagi Guru* (Jakarta: Bestari Buana Murni, 2010), h. 74.

Salah satu faktor yang paling menentukan dalam proses pembelajaran di kelas adalah guru. Tugas guru yang paling utama adalah mengajar dan mendidik. Sebagai pengajar, guru berperanan aktif (medium) antara peserta didik dengan ilmu pengetahuan.³³ Secara umum dapat dikatakan bahwa tugas dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh guru adalah mengajak orang lain berbuat baik. Tugas tersebut identik dengan dakwah islamiyah yang bertujuan mengajak umat Islam untuk berbuat baik.

Profesi seorang guru juga dapat dikatakan sebagai penolong orang lain, karena dia menyampaikan hal-hal yang baik sesuai dengan ajaran Islam agar orang lain dapat melaksanakan ajaran Islam. Dengan demikian, akan tertolonglah orang lain dalam memahami ajaran Islam.

Agama datang menuntun manusia dan memperkenalkan mana yang makruf dan mana yang munkar. Oleh karena itu, hendaklah guru menggerakkan peserta didik kepada yang makruf dan menjauhi yang munkar supaya mereka bertambah tinggi nilainya, baik di sisi manusia maupun di hadapan Allah swt.

Bila diperhatikan lebih jauh, tugas dan tanggung jawab yang mestinya dilaksanakan oleh guru yang telah dijelaskan pada firman Allah swt. di atas intinya adalah mengajak manusia melaksanakan perintah Allah swt. dan menjauhi

³³Muhaimin dkk., *Strategi Belajar Mengajar (Penerapan dalam Pendidikan Agama)* (Surabaya: Citra Media, 1996), h. 54.

larangan-Nya. M. Ja'far menegaskan, "Tugas dan tanggung jawab guru menurut agama Islam dapat diidentifikasi sebagai tugas yang harus dilakukan oleh ulama, yaitu menyuruh yang makruf dan mencegah yang munkar.³⁴ Hal ini menunjukkan adanya kesamaan tugas yang dilaksanakan oleh guru dan *muballigh/da'i*, melaksanakan tugasnya melalui jalur pendidikan non formal. Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَلِّغُوا عَنِّي
وَلَوْ آيَةً (رواه البخارى)³⁵

Artinya: Dari Abdullah bin Amr, dia berkata, 'Nabi saw. bersabda, "Sampaikanlah dari ajaranku walaupun satu ayat." (HR. al-Bukhari)

Berdasarkan hadis di atas dapat dipahami bahwa tugas dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh orang yang mengetahui, termasuk pendidik/guru, adalah menyampaikan apa yang dipahami dan diketahuinya (ilmu) untuk ditransfer kepada orang-orang yang belum mengetahui. Hal tersebut merupakan suatu wujud pertanggungjawaban sosial seorang guru pada lingkungan sosial dimana dia berada. Sebagai seorang pendidik, guru merupakan pemimpin pendidikan dalam melaksanakan proses pembelajaran yang mana

³⁴M. Ja'far, *Beberapa Aspek Pendidikan Islam* (Surabaya: Al-Ikhlâs, 1992), h. 272.

³⁵Abu 'Abdillah Muhammad ibn Isma'il ibn Ibrahim ibn al-Mugirah ibn Bardarbah al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, (CD Mausuh al-Hadis\al-Syarif, Kitab Al-Hadis al-Anbiya', nomor 3202)

kepemimpinan tersebut harus dipertanggung jawabkan kepadapemerintah sebagai penanggung jawab pendidikan dan kepada Allah swt sebagai titik kulminasi pertanggung jawaban normatif seorang hamba atas kepemimpinannya sebagaimana sabda Rasulullah saw yang berbunyi sebagai berikut:

عَبْدَ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ
كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ³⁶

Artinya:

Abdullah bin Umar berkata, 'Saya mendengar Rasulullah saw. bersabda, "Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. (H.R. al-Bukhari)

Berdasarkan hadis di atas dapat dipahami bahwa tanggung jawab dalam Islam bersifat pribadi dan sosial. Dalam pendidikan formal, guru adalah pemimpin di dalam kelas yang bertanggung jawab tidak hanya terhadap perbuatannya, tetapi juga terhadap perbuatan orang-orang yang berada di bawah perintah dan pengawasannya yaitu peserta didik.

Apabila dilihat dari rincian tugas dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh guru, al-Abrasyi yang mengutip pendapat al-Ghazali mengemukakan bahwa:

³⁶*Ibid.*, Kitab al-Jum'ah, nomor 844.

- a. Guru harus menaruh rasa kasih sayang terhadap siswanya dan memberlakukan mereka seperti perlakuan anak sendiri.
- b. Tidak mengharapkan balas jasa ataupun ucapan terima kasih, tetapi bermaksud dengan mengajar itu mencari keridaan Allah dan mendekatkan diri kepada Tuhan.
- c. Memberikan nasehat kepada peserta didik pada tiap kesempatan, bahkan menggunakan setiap kesempatan itu untuk menasehati dan menunjukinya.
- d. Mencegah peserta didik dari akhlak yang tidak baik dengan jalan sindiran jika mungkin dan dengan jalan terus terang, dengan jalan halus, dan tidak mencela.
- e. Seorang guru harus menjalankan ilmunya dan jangan berlainan kata dengan perbuatannya.³⁷

Ahmad Tafsir membagi tugas-tugas yang dilaksanakan oleh guru yaitu:

- a. Wajib mengemukakan pembawaan yang ada pada anak dengan berbagai cara seperti observasi, wawancara, melalui pergaulan, angket dan sebagainya;
- b. Berusaha menolong peserta didik mengembangkan pembawaan yang baik dan menekankan pembawaan yang buruk agar tidak berkembang;
- c. Memperlihatkan kepada peserta didik tugas orang dewasa dengan cara memperkenalkan berbagai keahlian dan keterampilan agar mereka memilikinya dengan cepat;
- d. Mengadakan evaluasi setiap waktu untuk mengetahui apakah perkembangan peserta didik berjalan dengan baik;

³⁷Muhammad Athiyah al-Abrasyi, *Al-Tarbiyyah al-Islamiyyah*, ter. Bustami A. Gani dan Djohar Bahry, *Dasar-dasar Pokok Pendidikan Islam* (Cet. IV; Jakarta: Bulan Bintang, 1979), h. 150-151.

- e. Memberikan bimbingan dan penyuluhan tatkala peserta didik melalui kesulitan dalam mengembangkan potensinya.³⁸

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan di atas dapat diketahui bahwa tugas dan tanggung jawab guru bukan hanya mengajar atau menyampaikan kewajiban kepada peserta didik, akan tetapi juga membimbing mereka secara keseluruhan sehingga terbentuk kepribadian muslim.

Sehubungan dengan hal itu, Zainal Abidin menegaskan bahwa tugas dan tanggung jawab utama yang harus dilaksanakan oleh guru, terutama guru pendidikan agama Islam adalah membimbing dan mengajarkan seluruh perkembangan kepribadian peserta didik pada ajaran Islam.³⁹ Menurut al-Gazali, guru harus memiliki akhlak yang baik karena peserta didik selalu melihat pendidiknya sebagai contoh yang harus diikutinya.⁴⁰

Sedangkan Nur Uhbiyati mengemukakan tugas dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh pendidik (guru) antara lain:

- a. Membimbing peserta didik kepada jalan yang sesuai dengan ajaran agama Islam;
- b. Menciptakan situasi pendidikan keagamaan yaitu suatu keadaan di mana tindakan-tindakan pendidikan dapat

³⁸Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994), h. 79.

³⁹Zainal Abidin, *Kepribadian Muslim* (Semarang: Aneka Ilmu, 1989), h. 29.

⁴⁰Zuhairini dkk, *Filsafat Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), h. 170.

berlangsung dengan hasil yang memuaskan sesuai dengan tuntutan ajaran Islam.⁴¹

Pada sisi lain, Samsul Nizar mengungkapkan rangkaian tugas guru dalam mendidik, yaitu 'rangkaian mengajar, memberikan dorongan, memuji, menghukum, memberikan contoh, dan membiasakan'.⁴² Imam Barnadib menambahkan bahwa tugas guru terkait dengan perintah, larangan, menasehati, hadiah, pemberian kesempatan, dan menutup kesempatan.⁴³ Dengan demikian, dapat dipahami bahwa tugas guru bukan hanya sekedar mengajar. Di samping itu, ia bertugas sebagai motivator dan fasilitator dalam proses pembelajaran sehingga seluruh potensi peserta didik dapat teraktualisasi secara baik dan dinamis.

Guru sebagai jabatan profesional yang dituntut memiliki keahlian khusus, diharapkan betul-betul mengarahkan seluruh perhatiannya agar selalu dapat melaksanakan tugas profesionalnya dengan penuh tanggung jawab. Untuk itu, guru harus diberikan hak-hak tertentu sehingga mereka dapat memenuhi tugas dan tanggung jawabnya.

Memahami uraian di atas, nampak bahwa kompetensi profesional merupakan kompetensi yang harus dikuasai guru

⁴¹Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 1997), h. 72.

⁴²Samsul Nizar, *Filsafat Pendidikan Islam, Pendekatan Teoritis dan Praktis* (Jakarta: Ciputat Pers, 1993), h. 44.

⁴³Sutari Imam Barnadib, *Pengantar Ilmu Pendidikan Sistematis* (Yogyakarta: Andi Offset, 1993), h. 40.

dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas utama guru di sekolah/madrasah, beberapa hal penting yang harus dimiliki guru adalah kemampuan menjabarkan materi standar dalam kurikulum. Untuk kepentingan tersebut guru harus mampu menentukan secara tepat materi yang relevan dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik. Sedikitnya terdapat tiga tipe materi pembelajaran yang menyangkut peranan guru dalam kompetensi profesional, yaitu:

Pertama, jika guru mendesain dan mengembangkan materi pembelajaran individual, peran guru penyampaian materi bersifat pasif, tugas guru adalah memonitor dan membimbing kemajuan peserta didik dalam penyelesaian materi, dan membentuk kompetensi. Kedua, guru memilih materi pembelajaran yang telah ada dan menyesuaikan dengan strategi pembelajaran yang digunakan, peranan guru menjadi lebih efektif dalam penyampaian materi, dan pembentukan kompetensi. Ketiga, pembelajaran sangat bergantung kepada guru. Guru menyampaikan semua materi pembelajaran menurut strategi yang telah dikembangkan. Dalam tipe ini, guru selalu dapat menyajikan secara *up-to-date* tetapi sebagian besar waktu habis untuk menyampaikan kepada seluruh kelompok dan sedikit waktu untuk membantu perorangan bagi peserta didik yang memerlukan.⁴⁴

⁴⁴Sutari Imam Barnadib, *Pengantar Ilmu Pendidikan Sistematis*, h. 82.

Selain dari pada itu agar pembelajaran dapat dilakukan secara efektif dan menyenangkan, materi pembelajaran harus diurutkan sedemikian rupa serta dijelas-kan mengenai batasan dan ruang lingkupnya. Hal ini dapat dilakukan dengan, menyusun standar kompetensi dan kompetensi dasar (SKKD) sebagai konsensus nasional, yang dikembangkan dalam standar isi dan standar kompetensi untuk setiap kelompok mata pelajaran yang akan dikembangkan, menjabarkan SKKD ke dalam indikator, sebagai langkah awal untuk mengembangkan materi standar untuk membentuk kompetensi tersebut, mengembangkan ruang lingkup dan urutan setiap kompetensi.

C. Kompetensi Profesional Guru dalam Proses Pembelajaran

Proses pembelajaran melibatkan aktivitas yang kompleks, bukan sekedar *transfer of knowledge* dari pendidik kepada peserta didik secara tekstual. Dalam se-tiap pembelajaran, harus diupayakan untuk dapat mengantarkan peserta didik pada penguasaan kompetensi yang dicanangkan, termasuk nilai-nilai dan sikap yang me-landasinya.

Menurut Danim, beberapa hal yang menjadi pertimbangan guru dalam memilih strategi pembelajaran, yaitu: Pertama, berkaitan dengan kemampuan guru atau penguasaannya terhadap teori, metode dan praktik pembelajaran. Kedua, berkaitan dengan motivasi dan kreativitas guru. Ketiga, terkait dengan ketersediaan sarana

dan prasarana yang dibutuhkan. Dari ketiga hal tersebut, faktor pertama dan kedua merupakan pra syarat yang utama. Tanpa kemampuan, motivasi, dan kreativitas guru akan cenderung mengajar secara tradisional, yaitu hanya menyampaikan materi yang ada pada buku pelajaran.⁴⁵Guru dalam proses pembelajaran memiliki peran yang sangat penting. Bagaimanapun hebatnya kemajuan teknologi, peran guru akan tetap diperlukan. Teknologi yang dapat memudahkan manusia mencari dan mendapatkan informasi dan pengetahuan, tidak mungkin bisa mengganti peran guru.

Keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal, seperti menunjukkan sikap tanggap, memberikan perhatian, memusatkan perhatian kelompok, memberikan petunjuk yang jelas, menegur bila peserta didik melakukan tindakan menyimpang, memberikan penguatan (*reinforcement*). Keterampilan yang berhubungan dengan pengembalian kondisi belajar yang optimal, yaitu berkaitan dengan respon guru terhadap gangguan peserta didik yang berkelanjutan dengan maksud agar guru dapat melakukan tindakan remedial untuk mengembalikan kondisi belajar yang optimal.

Di samping dua jenis keterampilan di atas, hal lain yang perlu diperhatikan oleh guru dalam pengelolaan kelas adalah menganalisis tingkah laku peserta didik yang mengalami

⁴⁵Sudarwan Danim, *Profesionalisasi dan Etika Profesi*, h. 67.

masalah/kesulitan dan berusaha memodifikasi tingkah laku tersebut dengan mengaplikasikan pemberian penguatan secara sistematis, menghindari campur tangan yang berlebihan, menghentikan penjelasan tanpa alasan, ketidaktepatan memulai dan mengakhiri kegiatan, penyimpangan, dan sikap yang membingungkan.

D. Faktor yang Mempengaruhi Kompetensi Guru PAI

Guru merupakan ujung tombak keberhasilan pendidikan dan dianggap sebagai orang yang berperanan penting dalam pencapaian tujuan pendidikan yang merupakan pencerminan mutu pendidikan. Keberadaan guru dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya tidak lepas dari pengaruh faktor internal dan faktor eksternal yang membawa dampak pada perubahan kinerja guru. Suherman menjelaskan beberapa faktor yang mempengaruhi motivasi kerja guru yang dapat diungkap, yaitu:

1. Kepribadian dan dedikasi

Setiap guru memiliki pribadi masing-masing sesuai ciri-ciri pribadi mereka miliki. Ciri-ciri inilah yang membedakan seorang guru dari guru lainnya. Kepribadian sebenarnya adalah suatu masalah abstrak, hal ini dipertegas Darajat bahwa kepribadian yang sesungguhnya adalah abstrak, sukar dilihat atau diketahui secara nyata, yang dapat diketahui adalah penampilan atau bekasnya dalam segala segi dan aspek kehidupan, misalnya dalam tindakan,

ucapan, caranya bergaul, berpakaian, dan dalam menghadapi setiap persoalan atau masalah, baik yang ringan maupun yang berat.⁴⁶

Kepribadian adalah keseluruhan dari individu yang terdiri dari unsur psikis dan fisik, artinya seluruh sikap dan perbuatan seseorang merupakan suatu gambaran dari kepribadian orang itu, dengan kata lain baik tidaknya citra seseorang ditentukan oleh kepribadiannya.⁴⁷ Lebih lanjut Darajat mengemukakan bahwa faktor terpenting bagi seorang guru adalah kepribadiannya.⁴⁸ Kepribadian inilah yang akan menentukan apakah ia menjadi pendidik atau pembina yang baik bagi peserta didiknya ataukah sebaliknya, terutama bagi peserta didik yang masih muda dan mereka yang sedang mengalami kegoncangan jiwa.

Kepribadian adalah suatu cerminan dari citra seorang guru dan akan mempengaruhi interaksi antara guru dan peserta didik. Oleh karena itu, kepribadian merupakan faktor yang menentukan tinggi rendahnya komitmen guru dalam menjalankan keprofesionalannya.

Kepribadian guru akan tercermin dalam sikap dan perbuatannya dalam membina dan membimbing peserta didik. Semakin baik kepribadian seorang guru diharapkan

⁴⁶Zakiah Daradjat, *Kepribadian Guru* (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), h. 106.

⁴⁷Zakiah Daradjat, *Kepribadian Guru*.

⁴⁸Zakiah Daradjat, *Kepribadian Guru*, h. 107.

semakin baik pula dedikasinya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai guru, ini berarti tercermin suatu dedikasi yang tinggi dari guru dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pendidik. Klages dalam Suryabrata mengemukakan bahwa ada tiga aspek kepribadian, yaitu (1) materi atau bahan, yaitu semua kemampuan (daya) pembawaan beserta keistimewaan-keistimewaannya, (2) struktur, yaitu sifat-sifat bentuknya atau normalnya, dan (3) kualitas atau sifat, yaitu sistem dorongan-dorongan.⁴⁹

Aspek-aspek tersebut merupakan kompetensi kepribadian sebagai syarat mutlak yang harus dimiliki oleh seorang guru dalam melaksanakan profesinya. Karena tanpa aspek tersebut sulit bagi guru untuk dapat melaksanakan tugas sesuai dengan harapan. Kepribadian dan dedikasi yang tinggi dapat meningkatkan kesadaran akan pekerjaan dan mampu menunjukkan kinerja yang memuaskan seseorang atau kelompok dalam suatu organisasi. Guru yang memiliki kepribadian yang baik dapat membangkitkan keamauan untuk giat memajukan profesinya dan meningkatkan dedikasi dalam melakukan pekerjaan mendidik sehingga dapat dikatakan guru tersebut memiliki komitmen yang baik dalam menjalankan profesinya.

⁴⁹Suryabrata, *Psikologi Kepribadian* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), h. 129.

2. Pengembangan Profesi

Profesi guru kian hari menjadi perhatian seiring dengan perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menuntut kesiapan agar tidak ketinggalan. Menurut Pidarta bahwa profesi ialah suatu jabatan atau pekerjaan biasa seperti halnya dengan pekerjaan-pekerjaan lain, tetapi pekerjaan itu harus diterapkan pada masyarakat untuk kepentingan masyarakat umum, bukan untuk kepentingan individual, kelompok, atau golongan tertentu.⁵⁰ Lebih lanjut, Pidarta mengemukakan ciri-ciri profesi sebagai berikut:

1. Pilihan jabatan itu didasari oleh motivasi yang kuat dan merupakan panggilan hidup orang bersangkutan,
2. Telah memiliki ilmu pengetahuan dan keterampilan khusus yang bersifat dinamis dan berkembang terus,
3. Ilmu pengetahuan dan keterampilan khusus tersebut di atas diperoleh melalui studi dalam jangka waktu lama di perguruan tinggi,
4. Punya otonomi dalam bertindak ketika melayani klien,
5. Mengabdikan kepada masyarakat atau berorientasi kepada layanan sosial, bukan untuk mendapatkan keuntungan finansial,
6. Menjadi anggota profesi,
7. Organisasi profesi tersebut menentukan persyaratan penerimaan anggota, membina profesi anggota, mengawasi perilaku anggota, memberikan sanksi, dan memperjuangkan kesejahteraan anggota.⁵¹

⁵⁰M. Pidarta, *Manajemen Pendidikan Indonesia*, h. 112.

⁵¹M. Pidarta, *Manajemen Pendidikan Indonesia*, h. 117.

Pengembangan profesi guru merupakan hal penting untuk diperhatikan guna mengantisipasi perubahan dan beratnya tuntutan terhadap profesi guru. Pengembangan profesionalisme guru menekankan kepada penguasaan ilmu pengetahuan atau kemampuan manajemen beserta strategi penerapannya. Tuntutan memenuhi standar profesionalisme bagi guru sebagai wujud dari keinginan menghasilkan guru yang mampu membina peserta didik sesuai dengan tuntutan masyarakat, disamping sebagai tuntutan yang harus dipenuhi guru dalam meraih predikat guru yang profesional sebagaimana yang dijelaskan dalam *Educational Leadership* dalam Supriadi bahwa untuk menjadi profesional, seorang guru dituntut untuk memiliki lima hal, yaitu:

- a. Guru harus mempunyai komitmen,
- b. Guru menguasai secara mendalam bahan/materi mata pelajaran yang diajarkannya serta cara mengajarnya kepada peserta didik,
- c. Guru bertanggung jawab memantau hasil belajar peserta didik melalui berbagai cara evaluasi,
- d. Guru mampu berpikir sistematis tentang apa yang dilakukannya dan belajar dari pengalamannya,
- e. Guru seyogyanya merupakan bagian dari masyarakat belajar dalam lingkungan profesinya.⁵²

Sebaliknya menurut Supriadi penyebab rendahnya profesionalisme guru, yaitu:

- a. Masih banyak guru yang tidak menekuni profesinya secara total.

⁵²Supriadi, *Mengangkat Citra dan Martabat Guru*, h. 42.

- b. Rentan dan rendahnya kepatuhan guru terhadap norma dan etika profesi.
- c. Pengakuan terhadap ilmu pengetahuan dan keguruan masih setengah hati dari pengambilan kebijakan dan pihak-pihak terlibat.
- d. Masih belum *smoothnya* perbedaan pendapat tentang proporsi materi ajar atau kurikulum yang diberikan kepada calon guru.
- e. Masih belum berfungsinya PGRI sebagai organisasi profesi yang berupaya secara maksimal meningkatkan profesionalisme anggotanya.⁵³

Menyadari akan profesi merupakan wujud eksistensi guru sebagai komponen yang bertanggung jawab dalam keberhasilan pendidikan maka menjadi satu tuntutan bahwa guru harus sadar akan peran dan fungsinya sebagai pendidik. Hal ini dipertegas Pidarta bahwa kesadaran diri merupakan inti dari dinamika gerak laju perkembangan profesi, merupakan sumber dari kebutuhan mengaktualisasi diri.⁵⁴

Makin tinggi kesadaran seseorang makin kuat keinginannya meningkatkan profesi, artinya semakin sering profesi guru dikembangkan melalui berbagai kegiatan maka semakin mendekatkan guru pada pencapaian predikat guru yang profesional dalam menjalankan tugasnya sehingga harapan kinerja guru yang lebih baik akan tercapai.

⁵³Supriadi, *Mengangkat Citra dan Martabat Guru*, h. 44.

⁵⁴Supriadi, *Mengangkat Citra dan Martabat Guru*, h. 120.

3. Kemampuan mengajar

Guru dalam melaksanakan tugas profesi mengajar memerlukan kemampuan, sebagaimana Cooper dalam Agung mengemukakan bahwa guru harus memiliki kemampuan merencanakan pembelajaran, memberikan pertanyaan kepada peserta didik, mengajarkan konsep, berkomunikasi dengan peserta didik, mengamati kelas, dan mengevaluasi hasil pembelajaran.⁵⁵

Salah satu kompetensi guru adalah kemampuan atau kesanggupan guru dalam mengelola pembelajaran. Danim menyatakan bahwa titik tekan dari kompetensi guru adalah kemampuan guru dalam pembelajaran, guru dituntut mampu menciptakan dan menggunakan keadaan positif untuk membawa mereka ke dalam pembelajaran agar peserta didik dapat mengembangkan kompetensinya.⁵⁶

Hal senada diungkapkan Sutadipura bahwa aspek-aspek teladan mental guru berdampak besar terhadap iklim belajar dan pemikiran peserta didik yang diciptakan guru, guru harus memahami bahwa perasaan dan sikap peserta didik akan terlibat dan berpengaruh kuat pada proses belajarnya, oleh karena itu guru harus mampu berkompetensi, harus memiliki jiwa inovatif, kreatif dan kapabel, meninggalkan

⁵⁵Iskandar Agung, *Peningkatan Kreativitas Pembelajaran bagi Guru* (Jakarta: Bestari Buana Murni, 2010), h. 85.

⁵⁶Sudarwan Danim, *Profesionalisasi dan Etika Profesi Guru* (Bandung: Cv. Alfabeta, 2011), h. 73.

sikap konservatif, tidak bersifat defensif, tetapi mampu membuat peserta didik lebih bersifat ofensif.⁵⁷

Dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 tahun 2008 tentang Guru menyebutkan, kompetensi profesional merupakan kemampuan Guru dalam menguasai pengetahuan bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan budaya yang diampunya yang sekurang-kurangnya meliputi penguasaan: a. materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai dengan standar isi program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu; dan b. konsep dan metode disiplin keilmuan, teknologi, atau seni yang relevan, yang secara konseptual menaungi atau koheren dengan program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu.⁵⁸ Dapat dikatakan, kompetensi profesional adalah penguasaan terhadap kemampuan berkaitan dengan proses pembelajaran.

Kompetensi yang dimaksud meliputi kemampuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran, kemampuan dalam menganalisis, menyusun program perbaikan dan pengayaan, serta menyusun program bimbingan dan konseling. Sedangkan kompetensi penguasaan pengetahuan adalah penguasaan terhadap

⁵⁷Sutadipura, *Kompetensi Guru dan Kesehatan Mental* (Bandung: Angkasa, 1994), h. 89.

⁵⁸PP RI No. 41 tahun 2008 tentang Guru, Bab.I, pasal.3, ayat:7.

kemampuan yang berkaitan dengan keluasan dan kedalaman pengetahuan, meliputi pemahaman terhadap wawasan pendidikan, pengembangan diri dan profesi, pengembangan potensi peserta didik, dan penguasaan akademik.⁵⁹

Kemampuan mengajar guru yang sesuai dengan tuntutan standar tugas yang diemban memberikan efek positif bagi hasil yang ingin dicapai, seperti perubahan akademik, sikap, dan keterampilan peserta didik, serta perubahan pola kerja guru yang makin meningkat. Sebaliknya jika kemampuan mengajar yang dimiliki guru sangat sedikit akan berakibat bukan saja menurunkan prestasi belajar peserta didik tetapi juga menurunkan tingkat kinerja guru itu sendiri. Oleh karena itu, kemampuan mengajar guru menjadi sangat penting dan menjadi keharusan bagi guru untuk dimiliki dalam menjalankan tugas dan fungsinya, tanpa kemampuan mengajar yang baik sangat tidak mungkin guru mampu melakukan inovasi atau kreasi dari materi yang ada dalam kurikulum yang pada gilirannya memberikan rasa bosan bagi guru maupun peserta didik untuk menjalankan tugas dan fungsi masing-masing.

⁵⁹Asrorun Ni'am Sholeh, *Membangun Profesionalitas Guru (Analisis Kronologis atas Lahirnya UUU Guru dan Dosen)* (Jakarta: Elsas, 2006), h. 58.

a. Komunikasi

Komunikasi merupakan aktivitas dasar manusia, manusia dapat saling berhubungan satu sama lain dalam kehidupan sehari-hari di rumah tangga, di tempat kerja, dalam masyarakat atau dimana saja manusia berada. Pentingnya komunikasi bagi organisasi tidak dapat dipungkiri, adanya komunikasi yang baik suatu organisasi dapat berjalan dengan lancar dan berhasil, begitu pula sebaliknya. Misalnya, Kepala Madrasah tidak menginformasikan kepada guru mengenai kapan proses pembelajaran dimulai sesudah libur maka besar kemungkinan guru tidak datang mengajar. Contoh tersebut menandakan betapa pentingnya komunikasi. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Muhammad bahwa kelupaan informasi dapat memberikan efek yang lebih besar terhadap kelangsungan kegiatan.⁶⁰

Guru dalam proses pelaksanaan tugasnya perlu memperhatikan hubungan dan komunikasi baik antara guru dengan kepala madrasah, guru dengan guru, guru dengan peserta didik, dan guru dengan warga madrasah lainnya. Hubungan dan komunikasi yang baik membawa konsekuensi terjalinnya interaksi seluruh komponen yang ada dalam sistem di madrasah.

Kegiatan pembelajaran yang dilakukan guru akan

⁶⁰A. Muhammad, *Komunikasi Organisasi* (Ed.1, Cet.4, Jakarta: Bumi Aksara, 2001), h. 12.

berhasil jika ada hubungan dan komunikasi dengan komponen yang diajar. Kinerja guru akan meningkat seiring adanya kondisi hubungan yang sehat di antara kedua komponen tersebut sebab dengan pola hubungan dan komunikasi yang lancar dan baik mendorong pribadi seseorang untuk melakukan tugas dengan baik.⁶¹

Terbinanya hubungan dan komunikasi di dalam lingkungan madrasah memungkinkan guru dapat mengembangkan kreativitasnya sebab ada jalan terjadinya interaksi dan ada respon balik dari komponen lain di madrasah atas kreativitas dan inovasi tersebut. Hal ini menjadi motor penggerak bagi guru untuk terus meningkatkan daya inovasi dan kreativitasnya. Ini berarti bahwa pembinaan hubungan dan komunikasi yang baik di antara komponen dalam madrasah menjadi suatu keharusan dalam menunjang peningkatan kinerja. Untuk itu, semakin baik pembinaan hubungan dan komunikasi dibina maka respon yang muncul semakin baik pula yang pada gilirannya mendorong peningkatan kinerja.

b. Hubungan dengan masyarakat

Madrasah atau sekolah merupakan lembaga sosial yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat lingkungannya, sebaliknya demikian sebab keduanya memiliki kepentingan, madrasah merupakan lembaga

⁶¹*Ibid.*, h. 17.

formal yang disertai mandat untuk mendidik, melatih, dan membimbing generasi muda bagi peranannya di masa depan, sementara masyarakat merupakan pengguna jasa pendidikan itu. Menurut Pidarta bahwa suatu lembaga pendidikan tidak dibenarkan mengisolasi diri dari masyarakat, ia tidak boleh melaksanakan idenya sendiri dengan tidak mau tahu akan aspirasi masyarakat, bila hal ini dilakukan berarti ia menuju ke ambang kematian.⁶²

Hubungan madrasah dengan masyarakat adalah suatu proses komunikasi untuk meningkatkan pengertian masyarakat tentang kebutuhan serta kegiatan pendidikan serta mendorong minat dan kerja sama dalam peningkatan dan pengembangan madrasah. Hal ini dipertegas Mulyasa bahwa tujuan hubungan sekolah dengan masyarakat dapat ditinjau dari dua dimensi, yaitu kepentingan sekolah dan kebutuhan masyarakat.⁶³ Ditambahkan oleh Mulyasa bahwa tujuan hubungan masyarakat berdasarkan dimensi kepentingan sekolah yaitu: memelihara kelangsungan hidup sekolah, meningkatkan mutu pendidikan di sekolah, memperlancar kegiatan pembelajaran, memperoleh bantuan dan dukungan dari masyarakat dalam rangka pengembangan dan pelaksanaan program-program

⁶²Pidarta, *Pemikiran tentang Supervisi Pendidikan*, h. 28.

⁶³E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah (Konsep, Strategi, dan Implementasi)* (Bandung: PT. Remaja Rosda karya, 2003), h. 72.

sekolah.⁶⁴

Soetjipto menambahkan bahwa dalam melaksanakan hubungan sekolah dengan masyarakat perlu dianut beberapa prinsip sebagai pedoman dan arah bagi guru dan kepala sekolah agar mencapai sasaran yang diinginkan, prinsip-prinsip hubungan tersebut, yaitu:

- a. Prinsip otoritas, yaitu bahwa hubungan sekolah-masyarakat harus dilakukan oleh orang yang mempunyai otoritas karena pengetahuan dan tanggung jawabnya dalam penyelenggaraan sekolah.
- b. Prinsip kesederhanaan, yaitu bahwa program-program hubungan sekolah dengan masyarakat harus sederhana dan jelas.
- c. Prinsip sensitivitas, yaitu bahwa dalam menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan masyarakat, sekolah harus sensitif terhadap kebutuhan serta harapan masyarakat.
- d. Prinsip kejujuran, yaitu bahwa apa yang disampaikan kepada masyarakat haruslah sesuatu apa adanya dan disampaikan secara jujur.
- e. Prinsip ketepatan, yaitu bahwa apa yang disampaikan sekolah kepada masyarakat harus tepat, baik dilihat dari segi isi, waktu, media yang digunakan, serta tujuan yang ingin dicapai.⁶⁵

Hubungan guru dengan masyarakat perlu terjalin baik dan berlangsung secara kontinu, oleh karenanya diperlukan peningkatan profesi guru dalam hal

⁶⁴E. Mulyasa, *Menjadi Guru Profesional (Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan)*, h. 55.

⁶⁵Departemen Agama RI, *Pedoman Manajemen Berbasis*, h. 74.

berhubungan dengan masyarakat. Guru di samping mampu melakukan tugasnya di sekolah/madrasah, mereka juga diharapkan dapat dan mampu melakukan tugas-tugas hubungan dengan masyarakat. Untuk mencapai hal itu diperlukan kompetensi dan perilaku dari guru yang cocok dengan struktur sosial masyarakat setempat, sebab ketika kompetensi dan perilaku guru tidak cocok dengan struktur sosial dalam masyarakat maka akan terjadi benturan pemahaman dan salah pengertian terhadap program yang dilaksanakan madrasah dan berakibat tidak adanya dukungan masyarakat terhadap madrasah, padahal madrasah dan masyarakat memiliki kepentingan yang sama dan peran yang strategis dalam mendidik dan menghasilkan peserta didik yang berkualitas. Kemampuan guru membawa diri, baik di sekolah maupun di tengah masyarakat dapat mempengaruhi penilaian masyarakat terhadap guru. Guru harus bersikap sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat, responsif dan komunikatif terhadap masyarakat, toleran dan menghargai pendapat mereka. Pidarta menguraikan bahwa dalam mendukung hubungan sekolah dengan masyarakat, yang dapat dilakukan yaitu:

- a. Membantu sekolah dalam melaksanakan teknik-teknik hubungan sekolah dengan masyarakat dengan cara: guru hendaknya selalu berpartisipasi dalam lembaga dan organisasi di masyarakat, dan guru

hendaknya membantu memecahkan masalah yang timbul dalam masyarakat.

- b. Membuat dirinya lebih baik lagi dalam masyarakat melalui penyesuaian diri dengan adat istiadat masyarakat karena guru adalah tokoh milik masyarakat. Tingkah laku guru di sekolah dan di masyarakat menjadi panutan yang pada akhirnya masyarakat memberikan dukungan pada sekolah.
- c. Guru harus melaksanakan kode etiknya karena kode etik merupakan seperangkat aturan atau pedoman dalam melaksanakan tugas profesinya.⁶⁶

Manfaat hubungan guru dengan masyarakat sangat besar bagi peningkatan kinerja guru melalui peningkatan aktivitas bersama, komunikasi yang kontinu dan proses saling memberi dan saling menerima. Setiap aktivitas profesi guru dapat diketahui oleh masyarakat sehingga guru akan berupaya menampilkan kinerja yang lebih baik.

c. Kedisiplinan

Kedisiplinan guru sangat perlu dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai pengajar, pendidik, dan pembimbing peserta didik. Disiplin yang tinggi akan mampu membangun kinerja yang profesional sebab dengan pemahaman disiplin yang baik, guru mampu mencermati aturan-aturan dan langkah strategis dalam melaksanakan proses pembelajaran. Kemampuan guru dalam memahami aturan dan melaksanakan aturan yang tepat, baik dalam hubungan dengan personalia lain di

⁶⁶Pidarta, *Pemikiran tentang Supervisi pendidikan*, h. 118.

madrasah maupun dalam proses pembelajaran di kelas sangat membantu upaya membelajarkan peserta didik ke arah yang lebih baik. Kedisiplinan bagi guru merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan tugas dan kewajibannya.

Tujuan disiplin menurut Saud yaitu, agar kegiatan sekolah dapat berlangsung secara efektif dalam suasana tenang, tenteram, dan guru beserta seluruh warga sekolah merasa puas karena terpenuhi kebutuhannya.⁶⁷ Sedangkan dalam Depdiknas membagi disiplin menjadi dua bagian, yaitu: Tujuan umum adalah agar terlaksana-nya kurikulum secara baik yang menunjang peningkatan mutu pendidikan, dan tujuan khusus yaitu (a) agar kepala sekolah dapat menciptakan suasana kerja yang menggairahkan bagi seluruh peserta warga sekolah, (b) agar guru dapat melaksana-kan proses pembelajaran seoptimal mungkin dengan semua sumber yang ada di sekolah dan di luar sekolah, (c) agar tercipta kerja sama yang erat antara sekolah dengan orang tua dan sekolah dengan masyarakat untuk mengemban tugas pendidikan.⁶⁸ Dengan demikian, kedisiplinan seorang guru menjadi tuntutan yang sangat penting untuk dimiliki dalam upaya

⁶⁷Udin Syaefuddin Saud, *Pengembangan Profesi Guru* (Bandung: CV. Alfabeta, 2010), h. 101.

⁶⁸Ditjen Dikdasmen Depdiknas, *Pendekatan Kontekstual (Contextual Teaching and Learning, CTL)* (Jakarta: Ditjen Dikdasmen, 2002), h. 24.

menunjang dan meningkatkan kinerja dan di sisi lain akan memberikan teladan bagi peserta didik bahwa disiplin sangat penting bagi siapapun apabila ingin sukses.

Hamalik menjelaskan lebih detail tentang keempat kompetensi tersebut sebagai berikut;

- a. Kompetensi pedagogik, terdiri atas: a) pemahaman wawasan atau landasan kependidikan; b) pemahaman terhadap peserta didik; c) pengembangan kurikulum/silabus; d) perancangan pembelajaran; e) pelaksanaan pembelajaran; f) evaluasi hasil belajar; dan g) pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan potensi yang dimilikinya.
- b. Kompetensi kepribadian, terdiri atas: a) mantap; b) stabil, c) dewasa; d) arif dan bijaksana; e) berwibawa; f) berakhlak mulia; g) menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat; h) mengevaluasi kinerja sendiri; dan i) mengembangkan diri secara berkelanjutan.
- c. Kompetensi profesional, meliputi konsep, struktur, dan metode keilmuan/teknologi/seni yang menaungi/ koheren dengan materi ajar; materi ajar yang ada dalam kurikulum; hubungan konsep antar mata pelajaran terkait; penerapan konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari; dan kompetisi secara profesional dalam konteks global dengan tetap melestarikan nilai dan budaya nasional.
- d. Kompetensi sosial
 - Berkomunikasi lisan dan tulisan;
 - Menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional;

- Bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orangtua/wali peserta didik; dan
- Bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar.⁶⁹

Faktor kesejahteraan menjadi salah satu yang berpengaruh terhadap kinerja guru di dalam meningkatkan kualitasnya. Mulyasa menegaskan bahwa terpenuhinya berbagai macam kebutuhan manusia, akan menimbulkan kepuasan dalam melaksanakan apapun tugasnya.⁷⁰ Profesionalisme guru tidak saja dilihat dari kemampuan guru dalam mengembangkan dan memberikan pembelajaran yang baik kepada peserta didik, tetapi juga harus mendapat perhatian oleh pemerintah dengan cara memberikan gaji yang pantas serta berkelayakan. Untuk memaksimalkan kinerja guru, salah satu langkah strategis yang dilakukan pemerintah, yaitu memberikan kesejahteraan yang layak sesuai volume kerja guru, selain itu memberikan insentif pendukung sebagai jaminan bagi pemenuhan kebutuhan hidup guru dan keluarganya.

Program peningkatan mutu pendidikan apapun yang akan diterapkan pemerintah, jika kesejahteraan guru masih rendah maka besar kemungkinan program tersebut tidak akan mencapai hasil yang maksimal, tetapi dengan adanya

⁶⁹Oemar Hamalik, *Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi*, h. 94.

⁷⁰Oemar Hamalik, *Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi*, h. 83.

jaminan kehidupan yang layak bagi guru dapat memotivasi untuk selalu bekerja dan meningkatkan kreativitas sehingga diharapkan kinerja guru selalu meningkat setiap waktu.



Perbandingan Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Menengah Negeri/Swasta

A. Gambaran Umum SMA Negeri dan SMA Swasta

Penulis mengambil sampel pelaksanaan pendidikan agama Islam pada sekolah menengah atas di Kabupaten Pinrang. Ada empat klasifikasi sekolah, yaitu sekolah rintisan, sekolah unggulan, sekolah potensial, dan sekolah berstandar nasional.

Sekolah rintisan adalah sekolah yang belum memenuhi standar nasional pendidikan (SNP). Sekolah potensial adalah sekolah yang sudah mendekati pemenuhan SNP, dan Sekolah standar nasional adalah sekolah yang sudah memenuhi SNP. Kemudian sekolah unggulan adalah sekolah yang sudah memenuhi SNP + X. Simbol X Merupakan penguatan, pengayaan, perluasan, pendalaman, penambahan, dan atau pengembangan terhadap SNP melalui adaptasi atau adopsi terhadap mutu Pendidikan yang berlaku secara nasional.

Selain itu, X juga dapat ditambahkan, misalnya bahasa asing, ICT dan Budaya lintas bangsa.

Seperti diketahui, standar nasional pendidikan sesuai Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 adalah terdiri dari 8 standar.

1. Standar isi/kurikulum.
2. Standar proses.
3. Standar Kompetensi Lulusan.
4. Standar Penilaian.
5. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
6. Standar Sarana dan Prasarana.
7. Standar Pengelolaan.
8. Standar Pembiayaan.¹

Jadi pada dasarnya SMA Negeri adalah sekolah nasional yang menyelenggarakan pendidikan berdasar SNP dan kualitas mutu yang standar. Kualitas pendidikan pada SMA Negeri diukur dengan SNP dan kualitas luaran diukur dengan kriteria-kriteria pendidikan secara nasional yang dikaji secara seksama melalui persandingan SNP dengan standar/criteria, mutu nasional,² pertukaran informasi, studi banding dan sebagainya. Jadi kualitas pendidikan SMA Negeri di Kabupaten Pinrang Khususnya SMAN 1 dan SMAN Unggulan serta SMA Islam Swasta Al Mazaakhirah Baramuli merupakan satuan Pendidikan yang ada di Pinrang

¹Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang *Standar Nasional Pendidikan* (Cet. I; Jakarta Dep.Diknas RI, 2005), h. 14.

²Profil SMA Negeri dan Swasta Pinrang di Kabupaten Pinrang.

memenuhi standar nasional pendidikan (SNP), baik berupa kualitas penguatan, Pendalaman, pengayaan, perluasan maupun penambahan terhadap SNP.

Adaptasi, dimaksudkan pada SMA Negeri di Kabupaten Pinrang sebagai penyesuaian SNP terhadap mutu pendidikan nasional yang dilakukan melalui pengayaan/pendalaman SNP. Jadi yang akan diadaptasi sudah ada di SNP, tetapi perlu diperkaya/diperdalam. Adopsi dapat diartikan sebagai pengambilan sesuatu dari mutu pendidikan nasional karena di SNP belum ada. Atau dengan kata lain, adopsi lebih cenderung penambahan sesuatu terhadap SNP.

Fungsi manajemen sekolah sebagai suatu karakteristik dari pendidikan muncul dari kebutuhan untuk memberikan arah pada perkembangan, baik secara kualitatif maupun kuantitatif dalam operasional sekolah. Usaha manajemen sekolah meliputi berbagai bidang kegiatan yaitu bidang kegiatan akademik yang berkenaan dengan proses pembelajaran, bidang kesiswaan, dan bidang ketatausahaan yang meliputi administrasi keuangan dan kepegawaian.

Pengelolaan sekolah menengah atas baik pada negeri maupun swasta mencakup spektrum yang luas meliputi berbagai ruang lingkup antara lain bangunan dan lokasi sekolah, fasilitas atau sarana prasarana sekolah, proses pembelajaran, kondisi peserta didik, kondisi guru, hubungan internal dan eksternal, kepemimpinan kepala sekolah, serta pembinaan pengawas pendidikan di sekolah. Semua aspek

tersebut sebaiknya berjalan dalam suatu sistem untuk mencapai tujuan sekolah oleh karena inti kegiatan proses pendidikan di sekolah adalah bagaimana efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran bisa berlangsung secara maksimal.³

Standar SMA di Kabupaten Pinrang ada tiga. *Pertama*, output/lulusan memiliki kemampuan bertaraf regional maupun nasional. *Kedua*, proses penyelenggaraan SMA Negeri dan swasta di Kabupaten Pinrang mampu mengakrabkan dan menerapkan nilai, norma dan standar pendidikan nasional serta etika global yang menuntut kemampuan bekerjasama lintas budaya bangsa. *Ketiga*, input adalah segala hal yang diperlukan untuk berlangsungnya proses dan harus memiliki tingkat kesiapan yang memadai secara nasional (kurikulum, guru, kepala Sekolah, sarana prasarana, dana dan sebagainya.) Dari uraian ini, maka sangat perlu untuk membuka jejaring dengan sekolah-sekolah dari luar daerah, dalam rangka untuk memperluas wawasan kebangsaan dan keagamaan.

B. Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada SMA Negeri

Pelaksanaan pembelajaran pendidikan agama Islam pada SMA Negeri meliputi;

³Profil SMA Negeri dan Swasta Pinrang di Kabupaten Pinrang.

1. Standar Kompetensi Lulusan

Standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan pada SMA Negeri yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan (Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Bab I Pasal 1 Poin 1).

Menurut hasil observasi yang dilakukan peneliti mengenai Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada SMA Negeri dan SMA Islam Swasta di Kabupaten Pinrang adalah pengurangan mata pelajaran dan penambahan jam belajar. Secara mendasar, ada empat elemen perubahan yang di dapatkan peneliti, yakni pertama, Standar Kompetensi Lulusan, kedua, Standar Isi (kompetensi inti dan kompetensi dasar), ketiga, Standar Proses, dan keempat Standar Penilaian.

Melalui hasil wawancara dengan Abdul Muin Guru SMA 3 Unggulan Pinrang mengemukakan bahwa Penyempurnaan Standar Kompetensi Lulusan pada Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada SMA Negeri di Kabupaten Pinrang memperhatikan pengembangan nilai, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu dengan fokus pada pencapaian kompetensi.⁴ Pada Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada SMA Negeri di Kabupaten Pinrang, rumusan empat kompetensi inti (penghayatan dan pengamalan agama,

⁴Abdul Muin, SMA Negeri 3 Unggulan Pinrang, Wawancara 22 Oktober 2014.

sikap, keterampilan, dan pengetahuan) menjadi landasan pengembangan kompetensi dasar pada setiap kelas. Perubahan Standar Isi dari kurikulum sebelumnya yang mengembangkan kompetensi dari mata pelajaran menjadi fokus pada kompetensi yang dikembangkan menjadi mata pelajaran melalui pendekatan tematik-integratif (Standar Proses).⁵

Sedangkan menurut Abdul Samad guru SMA 1 Pinrang mengatakan bahwa Perubahan pada Standar Proses berarti perubahan strategi pembelajaran. Guru wajib merancang dan mengelola proses pembelajaran aktif yang menyenangkan. Peserta didik difasilitasi untuk mengamati, menanya, mengolah, menyajikan, menyimpulkan, dan mencipta.⁶

Perubahan Struktur pembelajaran telah memancing reaksi pro-kontra terkait pengintegrasian mata pelajaran Agama, dan pelajaran umum (IPA dan IPS). Integrasi kompetensi dasar yang biasanya diwadahi dalam mata pelajaran IPA atau IPS ke dalam mata pelajaran agama menuntut guru terus mengembangkan kompetensi profesional dan pedagogik mereka agar proses pembelajaran agama tematik-integratif bisa mengantarkan peserta didik mencapai standar kompetensi lulusan. Sebagai bagian

⁵Abdul Muin, SMA Negeri 3 Unggulan Pinrang, Wawancara 22 Oktober 2014.

⁶Abdul Samad, SMA Negeri 1 Pinrang, Wawancara 21 Oktober 2014.

penting dalam rangkaian desain pembelajaran , Standar Penilaian pun seyogianya berubah pula di kemudian hari. Penilaian yang mengukur hanya hasil pencapaian kompetensi harus bergeser menjadi penilaian otentik yang mengukur kompetensi sikap, keterampilan, serta pengetahuan berdasarkan hasil dan proses.

Proses panjang dan intensif dalam pengembangan pembelajaran pada tingkat SMA dalam meramu dan mengolah Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, dan Standar Penilaian. Tentu saja adu argumentasi di antara anggota tim pengarah, tim inti, dan tim teknis pengembangan selama proses tidak bisa dihindari dan justru memperkaya dan mematangkan desain pembelajaran yang baru, maka dengan rasa kepemilikan ini akan mendorong keberhasilan pencapaian tujuan pembelajaran pada SMA Negeri Kabupaten Pinrang dengan lebih efektif dibandingkan dengan imposisi dari otoritas pendidikan terhadap satuan pendidikan dan masyarakat. Tentu saja, rancangan pembelajaran dengan berpatokan pada kurikulum 2013 tidak mungkin memuaskan semua pihak secara optimal khususnya masyarakat di kabupaten Pinrang. Demikian pula, tidak semua anggota masyarakat di Pinrang yang mempunyai aspirasi terhadap sistem pendidikan nasional bisa dilibatkan dalam kegiatan uji publik. Di daerah yang sedang memperjuangkan dan memelihara demokrasi,

ada banyak saluran penyampaian aspirasi di luar kegiatan uji publik.

Menurut penulis bahwa kecemasan dan kritik bisa dianggap sebagai bentuk kepedulian dan keterlibatan masyarakat pinrang terhadap sistem pendidikan nasional. Masukan yang diharapkan dari publik mencakup tetapi tidak terbatas pada perspektif tentang kompetensi inti yang melandasi penjabaran kompetensi dasar pada setiap jenjang, struktur kurikulum, pengintegrasian ilmu agama dan ilmu umum pada jenjang SMA, penambahan jam belajar, penghapusan penjurusan di SMA, serta optimalisasi potensi keberhasilan pembelajaran. Dalam teori pembelajaran, keberhasilan suatu pembelajaran merupakan proses panjang, mulai dari kristalisasi berbagai gagasan dan konsep ideal tentang pendidikan, perumusan desain kurikulum, persiapan pendidik dan tenaga kependidikan serta sarana dan prasarana, tata kelola pelaksanaan pembelajaran dan penilaian pembelajaran dan kurikulum. Dalam konteks ini, keberhasilan ditentukan oleh komitmen pemegang otoritas pendidikan di tingkat daerah, pengembangan kapasitas guru pada tingkat SMA, dan desain penilaian belajar siswa.

Orientasi pembelajaran dengan kompetensi lulusan pada SMA Negeri Kabupaten Pinrang dengan mengharapkan terjadinya peningkatan dan keseimbangan antara kompetensi sikap (*attitude*), keterampilan (*skill*) dan pengetahuan (*knowledge*). Hal ini sejalan dengan amanat UU

No. 20 Tahun 2003 sebagaimana tersurat dalam penjelasan Pasal 35 bahwa kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati.

Hal ini sejalan pula dengan pengembangan kurikulum berbasis kompetensi yang telah dirintis pada tahun 2004 dengan mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu.

Alasan pengembangan pembelajaran dengan kurikulum 2013 adalah:

- a. Perubahan proses pembelajaran [dari siswa diberi tahu menjadi siswa mencari tahu] dan proses penilaian [dari berbasis output menjadi berbasis proses dan output] memerlukan penambahan jam pelajaran;
- b. Kecenderungan akhir-akhir ini kecenderungan penambahan jam pelajaran;
- c. Perbandingan dengan negara-negara lain menunjukkan jam pelajaran di Indonesia relatif lebih singkat.

2. Proses Pengelolaan Kegiatan Pembelajaran PAI

Keberhasilan suatu pembelajaran kemungkinan diawali dengan beberapa kegiatan informatif dari guru kepada siswa atau dari siswa kepada guru. Kegiatan informatif tersebut hendaknya dilakukan secara terorganisir pada awal pertemuan pertama atau dengan istilah tatap muka pertama, sehingga peserta didik mengetahui secara tepat kemampuan dan kapabilitas apa yang seharusnya peserta didik miliki

setelah mengikuti mata pelajaran PAI dalam satu kurun waktu tertentu. Sehingga kegiatan yang perlu diorganisir yaitu; *Pertama* Pendeteksian Karakteristik Siswa. *Kedua*, Penyampaian garis-garis besar program mata pelajaran PAI yang meliputi kerangka isi atau sering disebut epitome, secara tertulis, silabus dan RPP, buku teks pelajar dan lainnya.

Ketiga, Penyampaian indikator dan tujuan umum pembelajaran *keempat* Penyampaian strategi pembelajaran, untuk memperdalam materi pembelajaran yang menyangkut tentang standar kompetensi dan kompetensi dasar pendidikan agama Islam. Hal ini tergambar dalam pengamatan bahwa para guru pada SMA Negeri Pinrang menyampaikan kepada peserta didik bagaimana secara teknis memantapkan satu pokok bahasan. Pokok bahasan yang dimaksudkan adalah pokok bahasan kajian PAI. *Kelima*, Penyampaian tentang sistem penilaian. Penyampaian tentang teknik penilaian.

Pengorganisasian penyampaian pokok bahasan yang dimaksudkan adalah kegiatan rutin dalam melakukan rangkaian tahapan pembelajaran, ia menyebutkan dengan istilah "*instructional events*". Pada bagian ini secara berurut akan dikemukakan: (1) kegiatan pengorganisasian pada tahap pendahuluan pembelajaran, (2) kegiatan pengorganisasian pada inti pembelajaran, (3) kegiatan pengorganisasian penutupan pembelajaran, (4) sikap guru selama dalam proses pembelajaran, (5) penggunaan metode

mengajar dan pemanfaatan media, dan (6) suasana kelas ketika berlangsung pembelajaran.

SMA Negeri Kabupaten Pinrang merupakan salah satu kawah candra dimuka pengembangan sumberdaya manusia dan merupakan penyelenggaraan pendidikan. Dalam menyelenggarakan pendidikan agama Islam pada umumnya pengelola SMA Negeri berkeyakinan bahwa pendidikan harus menyuburkan dan mengembangkan eksistensi peserta didik seoptimal mungkin yang dilaksanakan melalui proses pendidikan yang bermartabat, kreatif, inovatif, experimentative, menumbuhkan dan mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan peserta didik.

Pendidikan agama Islam harus berfungsi dan relevan dengan kebutuhan, baik kebutuhan individu, keluarga maupun kebutuhan masyarakat khususnya di Kabupaten Pinrang serta berbagai sektor dan sub-sub sektornya baik lokal, nasional maupun Internasional. Terkait dengan tuntutan globalisasi, pendidikan harus menyiapkan sumberdaya manusia Indonesia yang mampu bersaing secara internasional

Dalam kerangka perwujudan fungsi ideal pendidikan untuk meningkatkan kualitas SDM tersebut, sistem pendidikan Islam haruslah senantiasa mengorientasikan diri kepada menjawab kebutuhan dan tantangan yang muncul dalam masyarakat kita sebagai konsekwensi logis dari perubahan. Pembangunan yang berlangsung

demikian cepat dalam beberapa dasawarsa terakhir telah mengantarkan Indonesia ke dalam barisan Negara-negara yang disebut NICS (*New Industrialized Countries*) atau Negara-negara industri baru. Meski Indonesia telah mencapai kemajuan seperti itu, pembangunan tentu saja belum berakhir, Bahkan sebaliknya, Indonesia harus semakin meningkatkan momentum pembangunannya. Untuk itu, tidak ada alternative lain, kecuali penyiapan SDM yang berkualitas tinggi dan dibarengi dengan nilai-nilai moralitas, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta keahlian dan keterampilan. Hanya dengan tersedianya SDM yang berkualitas tinggi itu, Indonesia bisa *survive* di tengah pertarungan ekonomi politik Internasional.

Dengan mempertimbangkan semua perkembangan itu, kurikulum pendidikan agama Islam jelas selain mesti berorientasi kepada pembinaan dan pengembangan nilai-nilai agama dalam diri peserta didik, seperti yang dilakukan selama ini, pendidik dalam hal ini guru pada SMA Negeri seharusnya memberikan penekanan khusus pada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berparadigma keagamaan (akhlak mulia). Dengan kata lain, setiap materi yang diberikan kepada peserta didik harus memenuhi dua tantangan pokok yaitu; pertama, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) kedua, penanaman pemahaman dan pengalaman ajaran

agama atau penanaman IMTAQ.

Tetapi dengan jujur harus diakui, pendidikan agama Islam hingga saat ini kelihatan sering terlambat merumuskan diri untuk merespon perubahan dan kecenderungan perkembangan masyarakat kita sekarang dan masa datang. Sistem pendidikan agama Islam kebanyakan masih lebih cenderung mengorientasikan diri pada bidang-bidang humaniora dan ilmu-ilmu social ketimbang ilmu-ilmu eksakta semacam fisika, kimia, biologi dan lain-lain. Pada hal ilmu-ilmu itu mutlak diperlukan dan pengembangan teknologi canggih. Ilmu-ilmu ini belum mendapat apresiasi dan tempat yang sepatutnya dalam sistem pendidikan agama Islam.

3. Kegiatan Pengorganisasian Isi Pembelajaran

Setiap guru pendidikan agama Islam pada SMA Negeri secara konseptual melakukan pengorganisasian isi pembelajaran baik secara mikro maupun makro. Secara administratif dalam kaitannya dengan pengorganisasian bahan ajar pada tingkat makro dapat ditelusuri lewat kurikulum PAI yang dijabarkan kedalam berbagai perangkat kurikulum seperti; penyusunan program tahunan yang disingkat PROTA, program semester yang disingkat PROCA, dan pada analisis mata pelajaran yang disingkat AMP.

Pengorganisasian dalam bentuk mikro ditemukan dalam rancangan pembelajaran yang lazim disebut Rencana

Pelaksanaan Pembelajaran yang disingkat dengan RPP. Pada umumnya bentuk dan komponen RPP yang dimiliki oleh semua informan sama. Kemudian bentuk penjabaran pengorganisasian isi pembelajaran tersebut dapat ditemukan dalam bahan ajar informan seperti “materi dan LKS” dan buku teks siswa. Materi dan LKS dalam bentuk diktat pada umumnya dimiliki oleh siswa. Sedangkan buku teks siswa hanya sebagian siswa yang memilikinya.

Pengorganisasian isi pembelajaran tingkat mikro, secara konseptual tidak ditemukan pada dokumen tertulis. Namun kalau dicermati apa yang ada pada AMP terlihat unsur-unsur yang berkaitan dengan prinsip-prinsip pengorganisasian isi pembelajaran makro. Jadwal waktu yang dimaksud adalah meliputi semester yang disebut PROTA. Selain itu juga dibuat matriks yang lebih terinci lagi khusus untuk semester yang disebut dengan PROCA. Untuk menggambarkan mekanisme pelaksanaan seluruh pokok dan sub pokok bahasan yang diprogramkan dalam PROTA, formatnya dikembangkan lagi dalam bentuk AMP yang didalamnya terinformasikan selain yang ada dalam PROCA yaitu metode dan sumber/sarana waktu setiap pokok bahasan dalam satu semester.

4. Evaluasi hasil pembelajaran

Evaluasi hasil pembelajaran siswa SMA Negeri pada umumnya mengacu pada ketentuan pedoman penilaian kurikulum KTSP. Selain itu secara umum gambaran tentang

tinggi rendahnya perolehan belajar dipengaruhi oleh berbagai aspek yang ada dalam komponen-komponen pembelajaran, khususnya yang berkaitan dengan penilaian mulai dari persiapan, pelaksanaan dan hasil perolehan belajar siswa. Mengingat banyaknya aspek yang berpengaruh terhadap tinggi rendahnya perolehan belajar maka setiap tahapan proses penilaian hanya dibatasi beberapa indikator. Indikator yang digolongkan pada tahapan persiapan meliputi (1) kesesuaian antara tujuan pembelajaran dan butir-butir soal penilaian, (2) kemampuan siswa memahami soal dilihat dari kemudahan bahasa dan kemungkinan adanya penafsiran ganda terhadap pernyataan soal, (3) pencantuman bobot skor dilihat dari sisi tingkat kesukaran penyesuaian soal. Indikator yang berkenaan dengan pelaksanaan meliputi (1) ketepatan waktu pelaksanaan penilaian, penataan ruangan dan kondisi kedisiplinan pelaksanaan penilaian, (3) bentuk dan proses pemerolehan hasil belajar, dan (4) indikator non formal yang dapat mempengaruhi tinggi rendahnya perolehan belajar siswa.

Untuk memperoleh gambaran sistematis tentang indikator yang terkait dengan persiapan penilaian yaitu;

1. Kesesuaian antara Tujuan Pembelajaran dan butir-butir soal penilaian
2. Ketepatan bahasa

Sisi lain dari pelaksanaan penilaian adalah yang berkenaan dengan bentuk-bentuk pengambilan nilai siswa. Penentuan perolehan nilai akhir siswa secara formal dibagi dalam tiga proses penilaian yang pertama proses penilaian ulangan harian, kedua proses penilaian pelaksanaan tugas, ketiga proses penilaian hasil ulangan akhir semester. Ketiga komponen penilaian tersebut diolah dalam satu rumus tertentu.

Komponen pelaksanaan pembelajaran pada SMA Negeri meliputi:

1. Tujuan pendidikan tingkat satuan Pendidikan dasar dan menengah.
 - a. Tujuan pendidikan dasar adalah meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia serta ketrampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.
 - b. Tujuan pendidikan menengah adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta ketrampilan untuk hidup mandiri, dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.
2. Struktur dan muatan kurikulum dalam pelaksanaan pembelajaran di SMA Negeri.

Struktur dan muatan kurikulum sekolah pada jenjang pendidikan menengah yang terutama dalam standar ismeliputi lima kelompok mata pelajaran sebagai berikut:

- a. Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia;
 - b. Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian;
 - c. Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. Kelompok mata pelajaran estetika;
 - e. Kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan;
3. Ketuntasan belajar

Ketuntasan belajar setiap indikator yang telah ditetapkan dalam suatu kompetensi dasar berkisar antara 0-100%. Kriteria ideal ketuntasan untuk masing-masing indikator 75%. Satuan pendidikan harus menentukan kriteria ketuntasan minimal dengan mempertimbangkan tingkat kemampuan rata-rata peserta didik, kompleksitas kompetensi, serta kemampuan sumber daya pendukung dalam penyelenggaraan.

4. Kenaikan kelas dan kelulusan

Kenaikan kelas dilaksanakan pada setiap akhir tahun pelajaran. Kriteria kenaikan kelas diatur oleh masing-masing direktorat teknis terkait, dan dinyatakan lulus dari satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah setelah:

- (a) menyelesaikan seluruh program pembelajaran;
- (b) memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran;
- (c) lulus ujian sekolah/madrasah;
- (d) Lulus Ujian nasional.

5. Pendidikan kecakapan hidup.

- a. Pendidikan kecakapan hidup dapat merupakan bagian integral dari pendidikan semua mata pelajaran dan/berupa paket/ modul yang direncanakan secara khusus.
- b. Pendidikan kecakapan hidup dapat diperoleh peserta didik dari satuan pendidikan yang bersangkutan dan/ dari satuan pendidikan formal lain dan/ non formal.

Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan dalam pelaksanaan pembelajaran pada SMA Negeri di Kabupaten Pinrang adalah:

1. Merumuskan tujuan Pembelajaran.
2. Merumuskan dan menyeleksi pengalaman-pengalaman belajar.
3. Mengorganisasikan pengalaman belajar.

C. Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Islam pada SMA Swasta Kabupaten Pinrang

Secara historis, kemunculan pendidikan swasta sudah ada sebelum Indonesia merdeka. Dalam pengamatan penulis bahwa format awal lembaga-lembaga pendidikan swasta di Indonesia lebih bersifat pesantren. Pesantren atau yang semisal dengannya bisa dikatakan sebagai bentuk awal lembaga pendidikan swasta yang bersifat keagamaan, di mana mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam banyak memanfaatkan lembaga ini sebagai sentral pendidikan

(agama). Walau mengambil bentuknya yang tidak formal, keberadaan pesantren, Madrasah, dan sekolah-sekolah Islam ini sebagai lembaga pendidikan dianggap berhasil dalam menciptakan pribadi-pribadi yang sadar secara agama dan berhasil membentuk watak masyarakat Indonesia. Namun pada saat itu, pondok pesantren hanya dianggap sebagai lembaga pendidikan jalur luar sekolah, sehingga out-put pesantren tidak diakui keberadaannya, selain pesantren, lahir pula lembaga pendidikan bernuansakan agama. Sekolah-sekolah swasta (khususnya sekolah/ madrasah berbasis Islam yang mendapat restu dari penjajah) pada masa ini mengalami transformasi dan bebas mengekspresikan diri untuk berkembang pada arah yang lebih maju.

Pada masa awal kemerdekaan, secara umum kondisi dan posisi pendidikan swasta dalam pendidikan nasional tidak jauh berbeda dengan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Menurut laporan Panitia Penyelidik Pengajaran pada waktu itu, pendidikan swasta diperlakukan secara wajar, bahkan dalam hal-hal tertentu disebutkan tanpa ada diskriminasi. Di antara, isi laporan tersebut yang tidak diskriminatif adalah tentang adanya persamaan dalam hal ijazah, di mana ijazah negeri dan swasta tidak dibedakan. Juga, dibolehkannya murid-murid sekolah swasta untuk berpindah atau melanjutkan pelajarannya di sekolah negeri.

Sekolah negeri dan sekolah Swasta dewasa ini, sekolah-sekolah swasta kian menjamur. Kualitasnya tidak kalah dari

sekolah negeri favorit tetapi khusus di Kabupaten Pinrang sekolah swasta tetap frekuensi kualitasnya masih tetap di bawah dari pada sekolah-sekolah negeri yang ada.

Dalam pengembangan profesionalisme pendidikan agama pada SMA Swasta khususnya pada Kabupaten Pinrang diperlukan pemantapan kompetensi keguruan dan pengembangan kurikulum Kompetensi itu tergambar di dalam pelaksanaan tugas guru sehari-hari yang bercirikan pada tiga kemampuan profesionalisme yaitu:

1. Kepribadian guru yang unik dapat mempengaruhi murid yang dikembangkan terus menerus sehingga ia benar-benar terampil dalam tugasnya yaitu:
 - a. Memahami dan menghargai tiap kompetensi dari tiap murid.
 - b. Membina situasi sosial yang meliputi interaksi belajar mengajar yang mendorong murid dalam meningkatkan kemampuan memahami pentingnya kebersamaan dan kesepahaman arah pemikiran atau perbuatan di kalangan murid.
 - c. Membina perasaan saling mengerti, saling menghormati dan saling bertanggung jawab dan percaya mempercayai antara guru dan murid.
 - d. Penguasaan ilmu pengetahuan yang mengarah pada spesialisasi ilmu yang diajarkan pada murid.
 - e. Keterampilan dalam mengajarkanbaha pelajaran, terutama menyangkut perencanaan progam satua

pelajaran dan menyusun keseluruhan kegiatan untuk satuan pelajaran menurut waktu (semester, semester, atau tahun pelajaran).

Pengembangan kurikulum PAI pada SMA Swasta dilakukan oleh guru dan sekolah pada setiap satuan pendidikan harus memerhatikan prinsip-prinsip Pengembangan Kurikulum sebagaimana tertuang dalam peraturan Menteri Pendidikan Nasional, yaitu berpusat pada potensi perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya; beragam dan terpadu; tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; relevan dengan kebutuhan kehidupan; menyeluruh dan berkesinambungan; belajar sepanjang hayat; seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah.

Urgensi dalam memperhatikan dan menggunakan prinsip tersebut adalah agar Kurikulum PAI pada SMA Swasta yang dikembangkan benar-benar sesuai dengan kondisi peserta didik, sekolah, masyarakat, sehingga, tidak hanya berkisar pada masalah aqidah dan akhlaq saja, tetapi juga memuat semua ilmu yang berhubungan berbagai aspek kehidupan serta kebutuhan kehidupan manusia, seimbang antara kebutuhan dunia dan akhirat, jiwa dan raga, material dan spiritual. Ini sejalan dengan keyakinan umat Islam bahwa alam yang luas serta isinya, termasuk didalamnya ilmu pengetahuan, merupakan anugerah dan ciptaan Allah swt.

Pada bagian ini penulis mengemukakan pembahasan tentang pengelolaan pembelajaran pada SMA Swasta di Kabupaten Pinrang (fokus pada SMA Islam Muhammadiyah dan SMA Al-Mazakirah Baramuli Kabupaten Pinrang) yang berkaitan dengan yaitu; pertama, Pengelolaan kegiatan-kegiatan pada awal pembukaan mata pelajaran agama pada semester pertama, kedua, Penyampaian tahapan-tahapan pembelajaran pada setiap tatap muka, ketiga, Pengorganisasian isi pembelajara, dan keempat, Implikasi perolehan hasil belajar.

Pendidikan agama memiliki peran yang amat penting dalam kehidupan umat manusia. Pendidikan agama menjadi pemandu dalam upaya mewujudkan suatu kehidupan yang bermakna, damai dan bermartabat. Menyadari betapa pentingnya peran agama bagi kehidupan umat manusia maka internalisasi nilai-nilai agama dalam kehidupan setiap pribadi menjadi sebuah keniscayaan, yang di tempuh melalui pendidikan baik pendidikan di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat.

Pendidikan agama pada SMA Swasta di Kabupaten Pinrang pada standar kompetensi lulusan dimaksudkan untuk peningkatan potensi spiritual dan membentuk peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah dan berakhlak mulia. Akhlak mulia mencakup etika, budi pekerti dan moral sebagai perwujudan dari pendidikan agama. Peningkatan potensi spiritual mencakup

pengenalan, pemahaman, dan penanaman nilai-nilai keagamaan, serta pengalaman nilai-nilai tersebut dalam kehidupan individual ataupun kolektif kemasyarakatan bagi peserta didik. Peningkatan potensi spiritual tersebut pada akhirnya bertujuan pada optimalisasi berbagai potensi yang dimiliki manusia yang actualisasinya mencerminkan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Allah.

Standar kompetensi lulusan pada pembelajaran pendidikan agama Islam pada SMA swasta diberikan dengan memberikan tuntunan bahwa agama diajarkan kepada peserta didik dengan visi untuk mewujudkan manusia yang bertaqwa kepada Allah swt. dan berakhlaq mulia, serta bertujuan untuk menghasilkan manusia yang jujur, adil, berbudi pekerti, etis saling menghargai, disiplin, harmonis dan produktif, baik personal maupun sosial. Tuntutan ini mendorong dikembangkannya standar kompetensi sesuai dengan jenjang persekolahan yang secara nasional ditandai dengan ciri-ciri;

- a. Lebih menitikberatkan pencapaian kompetensi secara utuh selain penguasaan materi;
- b. Mengakomodasikan keragaman kebutuhan dan sumber daya pendidikan yang tersedia;
- c. Memberikan kebebasan yang lebih luas kepada pendidik di lapangan untuk mengembangkan strategi

dan program pembelanjaraan sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan sumber daya pendidikan.

Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi pendidikan Agama Islam pada SMA Swasta merupakan elemen yang sangat penting dalam suatu lembaga pendidikan, untuk mencapai tujuan pendidikan maka standar kompetensi lulusan maupun standar isi harus ditelaah secara kritis untuk pengembangan kurikulum pendidikan Agama Islam sehingga visi, misi dan tujuan sebuah lembaga pendidikan akan tercapai.

Era modern yang lebih maju seperti sekarang ini diharapkan sebuah lembaga pendidikan Islam dapat mendesain kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan yang dikembangkan dari standar isi agar hasilnya sesuai yang diharapkan dan mencapai standar kompetensi lulusan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan Islam. Oleh karena itu, dengan persaingan yang begitu ketat dalam dunia pendidikan, maka pendidikan agama Islam harus mempunyai terobosan-terobosan baru yang bersifat inovatif sehingga tidak kalah dengan lembaga pendidikan pada umumnya. Maka Seorang guru harus dapat mengukur sejauh mana standar isi itu dapat dikembangkan menjadi sebuah kurikulum untuk mencapai tujuan yang diharapkan oleh lembaga pendidikan Islam, sehingga konsumen dalam hal ini pelanggan yang menggunakan hasil lulusan lembaga pendidikan Islam menjadi puas. Di antara materi yang akan

dibahas dalam Telaah kritis kurikulum Pendidikan Agama Islam di sekolah yaitu:

1. Permendiknas No 22 Tahun 2006
2. Standar Kompetensi Lulusan PAI SMA
3. Standar isi PAI SMA.

Dalam peraturan pemerintah RI No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dikemukakan bahwa “Standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup pengetahuan, sikap dan keterampilan”, secara garis besar standar kompetensi lulusan dapat dideskripsikan sebagai berikut:

- a. Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik yang meliputi kompetensi untuk seluruh mata pelajaran serta mencakup aspek pengetahuan, aspek sikap dan aspek keterampilan.
- b. Standar kompetensi lulusan pada jenjang menengah bertujuan untuk meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia serta keterampilan untuk hidup mandiri dan pendidikan lebih lanjut.
- c. Standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan nonformal dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan peraturan menteri.

Adapun standar kompetensi lulusan pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam SMA Swasta di Pinrang

meliputi;

- a. Menghafal, dan Mengartikan surat-surat pendek dalam Al-Qur'an mulai surat Al Fatihah sampai surat al Qasyiah.
- b. Berperilaku terpuji dalam kehidupan sehari-hari serta menghindari perilaku tercela.
- c. Mengenal dan melaksanakan rukun Islam mulai dari bersuci (thaharah) sampai zakat serta mengetahui tata cara pelaksanaan ibadah haji dan mengurus jenazah.
- d. Menceritakan kisah nabi-nabi serta mengambil teladan dari kisah tersebut dan menceritakan kisah tokoh orang-orang tercela dalam kehidupan nabi.

Adapun standar isi pembelajaran PAI pada SMA Swasta adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu, yang dituangkan dalam kriteria kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran dan silabus pembelajaran. Standar isi tersebut memuat kerangka dasar, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan/ akademik.

Pendidikan Agama Islam khususnya pada SMA DDI Pinrang menekankan keseimbangan, keselarasan, dan keserasian antara hubungan manusia dengan Allah swt, hubungan manusia dengan sesama manusia, hubungan manusia dengan diri sendiri, dan hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Kompetensi dasar menjadi arah dan landasan

untuk mengembangkan materi pokok, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian. Dalam merancang kegiatan pembelajaran dan penilaian perlu memperhatikan Standar Proses dan Standar Penilaian.

Indikator-indikator kegiatan pembelajaran pada awal pembukaan mata pelajaran PAI yang dijadikan sebagai barometer pengamatan adalah (1) pendeteksian karakteristik siswa, (2) penyampaian garis-garis besar program mata pelajaran PAI. Pendeteksian karakteristik siswa meliputi pendeteksian tentang sejauhmana kemampuan baca tulis Al-Quran dan kemampuan pelaksanaan gerak dan bacaan shalat dan pengetahuan-pengetahuan lain tentang beberapa istilah dalam materi pelajaran PAI pada SMA Swasta. Penyampaian garis-garis besar program mata pelajaran PAI meliputi (1) penyampaian epitome atau kerangka dasar secara keseluruhan isi-isi/pokok-pokok bahasan mata pelajaran PAI dalam satu kurun semester pertama, (2) penyampaian orientasi pembelajaran mata pelajaran PAI atau penjabaran keseluruhan tujuan umum pembelajaran, (3) petunjuk-petunjuk praktis yang berkenaan dengan bagaimana mengembangkan dan memahami esensi dari unjuk kerja siswa selama semester pertama mengikuti mata pelajaran PAI, dan (5) penyampaian kepada siswa tentang berbagai sumber rujukan dalam memperluas wawasan pemahaman tentang pokok-pokok bahasan yang akan diberikan selama semester pertama.

Penyampaian tahapan pembelajaran pada SMA Swasta mengacu pada urutan-urutan kegiatan pembelajaran mulai dari awal sampai akhir pembelajaran. Tahapan-tahapan tersebut meliputi; (1) pendahuluan, (2) inti pembelajaran, (3) penutup. Setiap klasifikasi masing-masing memiliki indikator yang akan dijadikan sebagai objek pengamatan. Untuk tahapan pendahuluan indikatornya adalah (i) pengucapan salam, (ii) penarikan perhatian, (iii) penyampaian TPK, (iv) pembangkitan motivasi, dan (v) penjelasan singkat keterkaitan materi dengan materi sebelumnya.

Untuk tahapan inti pembelajaran meliputi (i) penyajian informasi yang diawali dengan pemberian kata kunci, (ii) pemberian informasi tentang contoh-contoh yang relevan dengan pokok permasalahan, (iii) petunjuk praktis mempelajari materi yang sedang diajarkan, (iv) pemfokusan siswa terhadap materi, (v) pemberian latihan-latihan dan (vi) umpan balik terhadap unjuk kerja yang ditampilkan siswa.

Untuk tahapan penutup meliputi; (i) pemberian rangkuman atau kesimpulan, (ii) pemberian tes formatif, (iii) pemberian umpan balik, (iv) pemberian tindak lanjut baik berupa remedial ataupun pengayaan, dan (v) pemberian motivasi ulang.

Untuk pemrosesan informasi, sebenarnya banyak teknik pendekatan yang dapat digunakan misalnya dengan ceramah, tanya jawab, dan diskusi. Teknik tersebut dapat

digunakan penjelasan dengan metode deduktif atau induktif pada umumnya pemrosesan informasi yang berupa konsep khusus dalam pembentukan dan pemahaman konsep dapat ditempuh dengan strategi induktif.

Untuk memperjelas suatu makna suatu isi materi yang berupa konsep, prosedur, dan prinsip diperlukan suatu ilustrasi atau contoh yang dapat memperjelas isi materi yang biasanya cenderung sifatnya teoritis. Dalam konteks ini Hewson mengemukakan bahwa semakin dekat contoh yang diberikan terhadap isi materi, maka akan semakin efektif penyajian informasi yang diberikan. Materi pendidikan agama Islam yang banyak memuat pesan-pesan moral, maka contoh-contoh negative dan positif diperlukan. Pemberian contoh-contoh positif dan negatif membantu proses pemahaman siswa secara kuantitas dan kualitas dalam memahami isi pembelajaran moral dan kaidah-kaidah.

Petunjuk praktis tentang bagaimana mempelajari setiap jenis pokok bahasan pada umumnya informan tidak menyampaikan kepada siswa, kecuali ada dua informan yang menyampaikan teknik mempelajari suatu pokok bahasan dan pokok bahasan itu hanya pada pokok bahasan Alquran. Secara umum strategi penyampaian tehnik mempelajari suatu isi materi berkaitan dengan strategi kognitif siswa. Petunjuk praktis atau bimbingan belajar sangat tergantung pada jenis tujuan belajar. Jika tujuannya adalah belajar informasi verbal, maka bimbingan belajar

yang diberikan bisa berupa konteks bermakna, jika yang dipelajari kaidah, bimbingannya bisa berupa pernyataan verbal yang mengisyaratkan urutan pengkombinasian kaidah yang lebih sederhana. Salah satu teknik yang dapat diterapkan dalam belajar bentuk ini antara lain yang disebut "nemorik." Yaitu pemberian latihan sebagai salah satu indikator penyajian inti.

Teks formatif senantiasa harus dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana hasil perolehan hasil belajar siswa pada setiap pokok bahasan. Pelaksanaan teks formatif tergolong memiliki intensitas yang tinggi diantara indikator yang ada di dalam kegiatan penutup.

Pemberian motivasi ulang merupakan satu rangkaian dengan kegiatan penutup yang berupa umpan balik dan tindak lanjut. Sikap atau *attitude* juga merupakan bagian penting dalam proses pembelajaran. Sikap biasanya tergambar pada ekspresi tindakan yang menggambarkan suasana hati seseorang terhadap stimulus yang ada disekitarnya atau kesan awal yang sudah terpersepsi dalam diri seseorang. Demikian juga berpakaian rapi, pakaian dan cara berpakaian merupakan salah satu pernyataan sikap untuk menampilkan gambaran kesederhanaan atau kemewahan seseorang. Kesederhanaan dan kemewahan dapat menjadi stimulus bagi orang lain untuk juga bisa berperilaku seperti itu. Siswa sebenarnya diharapkan untuk berperilaku sederhana dalam arti tidak mengabaikan unsur-unsur kerapian dan penampilan. Kesederhanaan dan

kerapian siswa dalam berpakaian menjadi salah satu aturan sekolah. Dengan demikian untuk mewujudkan kesederhanaan dan kerapian berpakaian maka contoh berpakaian guru sangat signifikan berpengaruh kepada siswanya.

Suasana kelas yang kondusif memungkinkan proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Pengorganisasian kelas merupakan tugas profesional guru. Sebab bagaimana pun siapnya unsur pembelajaran yang lain, kalau tidak ditunjang oleh suasana kelas yang kondusif, sulit bagi guru untuk mentransformasikan bahan materi pelajaran kepada siswa, Indikator yang diamati dalam menggambarkan suasana kelas adalah (1) penataan tempat siswa, (2) kedisiplinan siswa termasuk siswa yang keluar masuk kelas sewaktu pelajaran yang sedang berlangsung, dan (3) konsentrasi siswa terhadap kegiatan pembelajaran.

D. Perbandingan Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam pada SMA Negeri dan SMA Swasta

Sekolah negeri maupun sekolah swasta memiliki karakteristik mereka sendiri, sehingga dengan karakteristik masing-masing akan menampilkan perbedaan antara yang satu dengan yang lain. Jika kita berpikir secara bijak, baik itu sekolah negeri maupun sekolah swasta memiliki tujuan yang sama seperti yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan cara dan karakteristik masing-masing, sekolah negeri dan sekolah

swasta tentu telah berupaya untuk mencapai tujuan tersebut. perbedaan sekolah negeri dan swasta dari segi kompetensi guru yaitu;

1. Guru pada sekolah negeri tentu mempunyai tenaga pendidik yang terspesialisasi dalam bidangnya. Ditambah, umumnya guru di sekolah negeri dibiayai oleh negara, alias PNS. Bandingkan guru di sekolah swasta pada umumnya yang harus bekerja sambilan untuk menutupi kebutuhan dasar hidupnya. Tetapi dari hal tersebut tidak ditutup penyangkalan bahwa banyak guru pada sekolah swasta mempunyai kompetensi lebih unggul dari sekolah-sekolah negeri disebabkan pelatihan sertifikasi guru yang tidak membedakan antara guru negeri (PNS) dan guru swasta/madrasah. Dengan kelebihan-kelebihan sekolah negeri tersebut justru terjadi ironi.
2. Di sekolah negeri, hampir semua guru dan karyawan yang bekerja berstatus sebagai pegawai negeri sipil yang pendapatannya jauh lebih tinggi ketimbang mereka yang bekerja di sekolah swasta. Hal ini juga merupakan sebuah faktor yang mempengaruhi profesionalisme guru di sekolah swasta. Tidak sedikit sekolah-sekolah swasta yang ada di Kabupaten Pinrang kekurangan guru.
3. Pola pengajaran serta program dan kurikulum , guru pada sekolah negeri memakai pola pengajaran yang sangat statis. Materi yang diberikan oleh guru dari sekolah negeri

cenderung disampaikan dalam format satu arah atau *feedback*, artinya guru berceramah kepada murid-murid dan tidak ada timbal balik yang terjadi antara murid dan guru. Sedangkan guru pada sekolah swasta yang biasanya memakai pola pengajaran secara dinamis. Hal ini akan sangat berbeda sekali dengan guru pada sekolah swasta yang penyampaian materi pelajaran biasanya disampaikan dalam bentuk diskusi antara guru dengan murid.

4. Guru pada sekolah negeri, baik SSN, RSBI, maupun SBI mau tidak mau harus menggunakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang telah distandarisasi oleh Depdiknas, sedangkan guru pada sekolah swasta umumnya menggunakan kurikulum sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikannya.
5. Cara belajar guru dan murid pada sekolah swasta di banyak melakukan diskusi dengan peserta didik, presentasi di depan kelas, berdebat dan beradu argumentasi. Hal ini menyebabkan murid sekolah swasta pandai dalam menyampaikan pendapatnya. Sementara murid sekolah negeri belajar dengan cara menghafal dan memahami materi dengan mendengarkan guru dan membaca textbook. sehingga murid sekolah negeri susah menyampaikan pendapatnya dikarenakan cenderung pasif dalam belajar.
6. Kompetensi seorang guru pada SMA Negeri dan SMA

Swasta dalam proses pembelajaran di tinjau dari berbagai aspek seperti menciptakan iklim kelas yang kondusif, memenej, umpan balik dan memberi penguatan dalam mengemukakan materi pembelajaran, dan pembaharuan diri dan pengembangan seluruh komponen pembelajaran terkadang memiliki perbedaan yang signifikan tetapi juga memiliki sisi persamaan terutama guru-guru yang telah mengikuti Diklat sertifikasi (PLPG dan PPG).

Beberapa hal berdasarkan penelitian berkorelasi dengan kompetensi guru dalam hal iklim situasi kelas mencakup hal-hal sebagai berikut;

- a. Menciptakan interpersonal yang kuat, khususnya empati, respek dan kesungguhan.
- b. Menciptakan hubungan yang baik dengan siswa.
- c. Kesungguhan dalam menerima dan peduli terhadap peserta didik atau siswa.
- d. Mengekspresikan ketertarikan dan antusiasme.
- e. Menciptakan suatu atmosfer kebersamaan dan kepaduan kelompok.
- f. Mengikutsertakan siswa dalam pengaturan dan perencanaan.
- g. Mendengarkan siswa dan menghormati hak mereka untuk berbicara dalam resitasi dan diskusi.
- h. Meminimalkan perselisihan dalam setiap hal.

Sebagai fungsi atau unsur dari lembaga pendidikan, maka pengorganisasian pada SMA Negeri sangat diperhatikan agar

setiap komponen yang terlibat dalam pengelolaan lembaga ini dapat memenuhi tugas dan tanggung jawabnya secara efektif, baik secara administratif maupun fungsional.

Sedangkan strategi pengaturan management dari guru agama yang kreatif dan memiliki kompetensi meliputi;

1. Mengadakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan proses pembelajaran
2. Mengajukan pertanyaan atau tugas-tugas yang membutuhkan tingkat pemikiran yang berbeda.
3. Memberikan respon yang sifatnya mendukung terhadap siswa yang berkemampuan rendah.
4. Memberikan *feed back* yang positif terhadap respon-respon siswa.
5. Menggunakan kurikulum dan metode pengajaran yang inovatif.⁷

Dalam proses pembelajaran guru SMA Negeri merupakan sumber daya edukatif dan sekaligus aktor proses pembelajaran yang utama. Untuk itu kreatifitas seorang guru selalu menjadi hal yang utama dalam pembelajaran. Perubahan yang cepat dalam teknologi informasi dan teknologi pembelajaran bukan menjadi penghalang bagi guru sebagai sumber dan aktor pendidikan yang utama, melainkan menjadi tantangan yang menuntut kreatifitas dan kompetensi profesional guru yang lebih tinggi.

Dalam situasi pendidikan, khususnya pendidikan formal di sekolah, guru merupakan komponen yang penting dalam

⁷Abdul Samad, SMA Negeri 1 Pinrang, Wawancara 2 Juni 2013.

meningkatkan mutu pendidikan. Ini disebabkan guru berada di barisan terdepan dalam pelaksanaan pendidikan. Dengan kata lain, ia merupakan komponen yang paling berpengaruh terhadap terciptanya proses dan hasil pendidikan yang berkualitas. Dengan demikian upaya perbaikan apapun yang dilakukan untuk meningkatkan pendidikan tidak akan memberikan sumbangan yang signifikan tanpa didukung oleh guru yang kreatif, profesional dan berkompeten. Oleh karena itu, diperlukan sosok guru yang mempunyai kualifikasi, kompetensi dan dedikasi yang tinggi dalam menjalankan tugas profesionalnya.

Satu kunci pokok tugas dan kedudukan guru sebagai tenaga profesional menurut ketentuan pasal 4 UU Guru dan Dosen adalah sebagai agen pembelajaran (*Learning Agent*) yang berfungsi meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Sebagai agen pembelajaran guru memiliki peran sentral dan cukup strategis antara lain sebagai fasilitator, motivator, pemacu, perekayasa pembelajaran, dan pemberi inspirasi belajar bagi peserta didik.⁸ Guru yang memiliki kompetensi profesional pada lingkungan SMA Negeri pada intinya adalah guru yang memiliki daya kreasi dan kompetensi dalam melakukan tugas pendidikan dan pengajaran.

Sedangkan guru agama pada SMA Swasta di samping melaksanakan tugas pengajaran, yaitu memberitahukan

⁸Fahri Nohon, SMA Negeri 1 Cempa Pinrang , Wawancara oleh Peneliti di Pinrang, 4 Mei 2013.

pengetahuan keagamaan, ia juga melaksanakan tugas pengajaran dan pembinaan bagi peserta didik, ia membantu pembentukan kepribadian, pembinaan akhlak serta menumbuh kembangkan keimanan dan ketaqwaan para peserta didik.

Proses pembelajaran pada SMA Swasta khususnya pada Kabupaten Pinrang merupakan suatu proses yang mengandung serangkaian perbuatan guru dan siswa atas dasar hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam proses pembelajaran tersirat adanya satu kesatuan kegiatan yang tak terpisahkan antara siswa yang belajar dan guru yang mengajar. Agar proses pembelajaran pada SMA Swasta dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka guru mempunyai tugas dan peranan yang penting dalam mengantarkan peserta didiknya mencapai tujuan yang diharapkan.

Masalah kreatifitas dan kompetensi guru baik pada sekolah negeri maupun swasta merupakan hal urgen yang harus dimiliki oleh setiap guru dalam jenjang pendidikan apapun. Guru yang kreatif dan terampil mengajar tentu harus pula memiliki pribadi yang baik dan mampu melakukan *social adjustment* dalam masyarakat. Kreatifitas dan kompetensi guru sangat penting dalam rangka penyusunan kurikulum (Materi Pembelajaran). Ini dikarenakan Materi pembelajaran Pendidikan Agama Islam haruslah disusun berdasarkan

kompetensi yang dimiliki oleh guru di Kabupaten Pinrang. Tujuan, program pendidikan, sistem penyampaian, evaluasi, dan sebagainya, hendaknya direncanakan sedemikian rupa agar relevan dengan tuntutan kompetensi guru secara umum. Dengan demikian diharapkan guru SMA Swasta tersebut mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab sebaik mungkin.

Agar tujuan pendidikan tercapai, yang dimulai dengan lingkungan belajar yang kondusif dan efektif, maka guru-guru harus melengkapi dan meningkatkan kompetensinya. Di antara kriteria-kriteria kompetensi guru yang harus dimiliki meliputi: Secara umum, guru harus memenuhi dua kategori yaitu memiliki *capability* dan *loyalty*, yakni guru itu harus memiliki kemampuan dalam bidang ilmu yang diajarkannya, memiliki kemampuan teoritik tentang mengajar yang baik dan mulai perencanaan, implementasi sampai evaluasi dan memiliki loyalitas keguruan, yakni terhadap tugas-tugas yang tidak semata di dalam kelas, kategori, *capability* dan *loyalty* tersebut, terkandung dalam macam-macam kompetensi guru.

Kompetensi guru meliputi kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional. *Pertama*, Dalam kompetensi personal ini telah mencakup kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial yang merupakan modal dasar bagi guru dalam menjalankan tugas dan keguruannya secara profesional. Kompetensi personal guru menunjuk perlunya struktur kepribadian dewasa yang mantap, susila,

dinamik (reflektif serta berupaya untuk maju), dan bertanggung jawab. Kompetensi kepribadian sangat besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan dan perkembangan pribadi para peserta didik. Kompetensi ini juga sangat penting dalam membentuk kepribadian peserta didik, guru menyiapkan dan mengembangkan sumber daya manusia (SDM). Kedua, kompetensi sosial dimaksudkan bahwa guru mampu memfungsikan dirinya sebagai makhluk sosial di masyarakat dan lingkungannya sehingga mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua dan wali peserta didik, serta masyarakat sekitar.

Dalam standar nasional pendidikan, kompetensi profesional yang harus dimiliki sekolah-sekolah swasta adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam standar nasional pendidikan. Terdapat beberapa kemampuan dasar keguruan yang menjadi tolok ukur kinerjanya sebagai pendidik profesional, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Guru dituntut menguasai bahan ajar. Penguasaan bahan ajar dari para guru sangatlah menentukan keberhasilan pengajarannya. Guru hendaknya menguasai bahan ajar wajib (pokok), bahan ajar pengayaan dan bahan ajar penunjang dengan baik untuk keperluan pengajarannya,

mampu menjabarkan serta mengorganisasikan bahan ajar secara sistematis.

2. Guru mampu mengolah program belajar mengajar. Guru diharapkan menguasai secara fungsional tentang pendekatan sistem pengajaran, asas pengajaran, prosedur-metode, strategi-teknik pengajaran, menguasai secara mendalam serta berstruktur bahan ajar, dan mampu merancang penggunaan fasilitas pengajaran.
3. Guru mampu mengelola kelas, usaha guru menciptakan situasi sosial kelasnya yang kondusif untuk belajar sebaik mungkin.
4. Guru mampu menggunakan media dan sumber pengajaran. Kemampuan guru dalam membuat, mengorganisasi, dan merawat serta menyimpan alat pengajaran dan atau media pengajaran adalah penting dalam upaya meningkatkan mutu pengajaran.
5. Guru menguasai landasan-landasan kependidikan. Guru yang menguasai dasar keilmuan dengan mantap akan dapat memberi jaminan bahwa siswanya belajar sesuatu yang bermakna dari guru yang bersangkutan.
6. Guru mampu mengelola interaksi belajar mengajar, guru mampu berperan sebagai motivator, inspirator, organisator, fasilitator, evaluator, membantu penyelenggaraan administrasi kelas serta sekolah, ikut serta dalam layanan B.K di sekolah. Dalam pengajaran

guru dituntut cakap dalam aspek didaktis-metodis agar siswa dapat belajar giat.

7. Guru mampu menilai prestasi siswa untuk kepentingan pengajaran. Keahlian guru dalam pengukuran dan penilaian hasil belajar siswa mempunyai dampak yang luas, data penilaian yang akurat sangat membantu untuk menentukan arah perkembangan diri siswa, memandu usaha, optimalisasi dan integrasi perkembangan diri siswa.
8. Guru mengenal fungsi serta program pelayanan BK. Mampu menjadi partisipan yang baik dalam pelayanan BK di sekolah, membantu siswa untuk mengenali serta menerima diri serta potensinya membantu menentukan pilihan-pilihan yang tepat dalam hidup, membantu siswa berani menghadapi masalah hidup, dan lain-lain.

Kompetensi pedagogik yang harus dimiliki oleh guru-guru pada SMA Swasta adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik. Kompetensi ini meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Kompetensi paedagogik merupakan kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik yang sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Pemahaman wawasan/landasan kependidikan.

- b. Pemahaman terhadap peserta didik.
- c. Pengembangan kurikulum/ silabus.
- d. Perancangan pembelajaran.
- e. Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis.
- f. Pemanfaatan teknologi pembelajaran.
- g. Evaluasi Hasil Belajar (EHB).
- h. Pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

Sedangkan kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif dan berwibawa serta menjadi teladan peserta didik. Dalam standar nasional pendidikan, dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Kompetensi kepribadian sangat besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan dan perkembangan pribadi para peserta didik. Kompetensi kepribadian ini memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam membentuk kepribadian anak, guna menyiapkan dan mengembangkan sumber daya manusia (SDM) serta mensejahterakan masyarakat, kemajuan negara, dan bangsa pada umumnya.

Adapun kompetensi sosial adalah kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik dan

masyarakat sekitar. Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat yang sekurang-kurangnya memiliki kompetensi untuk:

1. Berkomunikasi secara lisan, tulisan dan isyarat.
2. Menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional.
3. Bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua / wali peserta didik; dan
4. Bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar.

Sedangkan yang dimaksud kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam. Kompetensi profesional merupakan kemampuan penguasaan materi, pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam standar nasional pendidikan. Adapun ruang lingkup kompetensi profesional sebagai berikut:

1. Mengerti dan dapat menerapkan landasan kependidikan baik filosofi, psikologis, sosiologis, dan sebagainya.
2. Mengerti dan dapat menerapkan teori belajar sesuai taraf perkembangan peserta didik.
3. Mampu menangani dan mengembangkan bidang studi yang menjadi tanggung jawabnya.
4. Mengerti dan dapat menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi.

5. Mampu mengembangkan dan menggunakan berbagai alat, media dan sumber belajar yang relevan.
6. Mampu mengorganisasikan dan melaksanakan program pembelajaran.
7. Mampu melaksanakan evaluasi hasil belajar peserta didik.
8. Mampu menumbuhkan kepribadian peserta didik.

Seorang pendidik profesional selalu menginginkan umpan balik atas proses pembelajaran yang dilakukannya. Hal tersebut dilakukan karena salah satu indikator keberhasilan pembelajaran ditentukan oleh tingkat keberhasilan yang dicapai peserta didik. Dengan demikian, hasil penilaian dapat dijadikan tolok ukur keberhasilan proses pembelajaran dan umpan balik bagi pendidik untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran yang dilakukan.

Daftar Pustaka

- A. Samana, *Profesionalisme Keguruan*. Yogyakarta: Kanisius, 1994.
- Abidin, Zainal. *Kepribadian Muslim*. Semarang: Aneka Ilmu, 1989.
- Abu 'Abdillah Muhammad ibn Isma'il ibn Ibrahim ibn al-Mugirah ibn Bardarbah al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*. CD Mausu'ah al-Hadis/al-Syarif, Kitab Al-Hadis al-Anbiya', nomor 3202.
- Achmadi, *Ideologi Pendidikan Islam*. Cet.I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007
- AECT, *Defenisis Teknologi Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
- Agung, Iskandar. *Peningkatan Kreativitas Pembelajaran bagi Guru*. Jakarta: Bestari Buana Murni, 2010.
- Ahmad, Khursyid *Prinsip-prinsip Pendidikan Islam*, Terj., M. Hashem. Cet. II; Bandung: Kota Kembang, 1958.
- Al-Abrasyi, Muhammad Athiyah *Al-Tarbiyyah al-Islamiyyah*, ter. Bustami A. Gani dan Djohar Bahry, *Dasar-dasar Pokok Pendidikan Islam*. Cet. IV; Jakarta: Bulan Bintang, 1979.
- . *Attarbiyatul Islamiyah*. Cet. I; Beirut: Dar al-Syamiyah, 1992.
- . *Al-tarbiyah fi Al-Islam wa Falasifatuha*. Mesir: Alhalaby, 1969.
- al-Qardhawi, Yusuf. *Pendidikan Islam Dan Madrasah*, Terj, Bustami A.Gani dan Zainal Abidin Ahmad. Jakarta: Bulan

- Bintang, 1980.
- Al-Qurasyi, *Alqudah wa Dauraha fi Altarbiyah al-Nasy*. Makka: Maktabah al-Faisaly, 1984.
- Al-Syaibani, Umar Muhammad al-Toumi. *Filsafat Pendidikan Islam*, terjemahan Hasan langgulung. Jakarta: Bulan Bintang, 1999.
- Ancok dan Suroso, *Psikologi Islam*. Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994.
- Ansyar, *Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum*. Jakarta: Dekdikbut Dikti, 2003.
- Ary, H. Gunawan. *Kebijakan-Kebijakan Pendidikan di Indonesia*. Cet.II; Jakarta: Bina Aksara, 1999.
- Ashraf, Ali. *Horison Baru Pendidikan Islam* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), h. 226.
- Azra, Azyumardi. *Paradigma Baru Pendidikan Nasional: Rekonstruksi dan Demokrasi*. Cet. I; Jakarta: Penerbit Kompas, 2009.
- Barnadib, Sutari Imam. *Pengantar Ilmu Pendidikan Sistematis*. Yogyakarta: Andi Ofset, 1993.
- Collin, G. dan Dixon, *Integrated Learning. Australia*. Cet. Australia: Bookshelf Publishing, 1991.
- Danim, Sudarwan *Agenda Pembaruan Sistim Pendidikan*, Cet. II. Yokyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Danim, Sudarwan. *Profesionalisasi dan Etika Profesi Guru*. Bandung: Cv. Alfabeta, 2011.
- Daradjat, Zakiah. *Kepribadian Guru*. Jakarta: Bulan Bintang, 2005.
- Darmaningtyas, *Pendidikan pada dan Setelah Krisis*. Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Daud, Muhammad. *Pendidikan Agama Islam*. Cet.I; Jakarta: Raja Gafindo, 2006.
- Degeng, *Desain Pembelajaran*. Cet. I Malang: Ikip Malang, 1990.
- , *Ilmu Mengajar: Taksonomi Variabel*. Jakarta: Dedikbud, 1989.

- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Cet; XI; Semarang: PT;Toha Putra, 1997.
- , Kumpulan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah RI tentang Pendidikan, op.cit., Penjelasan pasal 28 ayat (3) butir a,
- , *Pedoman Manajemen Berbasis Madrasah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, 2007.
- , *Panduan Pengembangan Silabus Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: Direktorat jenderal manajemen pendidikan dasar dan menengah pembinaan sekolah menengah pertama, 2006.
- Depdiknas, *Pendekatan Kontekstual dalam Pembelajaran*. Jakarta: Depdiknas. Diknas: Jakarta, 2002.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, *Kumpulan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah RI tentang Pendidikan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, 2007.
- Ditjen Dikdasmen Depdiknas, *Pendekatan Kontekstual. Contextual Teaching and Learning, CTL*. Jakarta: Ditjen Dikdasmen, 2002.
- E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah. Konsep, Strategi, dan Implementasi*. Bandung: PT. Remaja Rosda karya, 2003.
- , *Menjadi Guru Profesional Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010.
- Fowler J.W., *Teori Perkembangan Kepercayaan*. Terjemahan. Cet.I; Jogyakarta: Kanisius, 1995.
- Gagne. RM, *The Condition off Learning*. Ney York: Holt, Rinehart,1992.
- H. Abd, Rahman Getteng, *Pendidikan Islam dalam Pembangunan*. Ujung pandang: Yayasan al-Ahkam, 1997.
- Hamalik, Oemar .*Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2005.

- Kemp, JE, *The Intruksional Desing Proses*. New York: Harfer and Row, 1985.
- Komaruddin, *Kamus Istilah Skripsi dan Tesis*. Bandung: Angkasa, 1999
- Langgulong, Hasan. *Beberapa Pemikiran Tentang Pendidikan Islam*. Bandung: al-Ma'arif, 1980.
- lie, Anita. Guru dan Dosen Sebagai Pekerja Budaya“ Kompas 3/09/2011
- M. Ja'far, *Beberapa Aspek Pendidikan Islam*. Surabaya: Al-Ikhlash, 1992.
- Majid Irsal al-Kailani, *Alfikir Altarbawi indaibn Taimiyah*. Madinah: Maktabah Dar Alturats, 1986.
- Mansoer Faki, *Sesat Teori Pembangunan dan Globalisasi*. Cet. II; Yogyakarta: Insis Pres, 2003.
- Maruf Ade dan Anas. *Shaping Globalisation: Jawaban kaum Sosial Demokrat atas Neoliberalisme*. Cet. II; Yogyakarta: Jendela, 2009.
- Marzuki, *Metodologi Riset*. Yogyakarta: t. pn, 2008.
- Mastuhu, *Menata Ulang Sistem pendidikan Nasional dalam Abad 21*. Cet. II; Yogyakarta: Safiriah Insani Press, 2006.
- , *Sistem Pendidikan Nasional Visioner*. Cet. III; Jakarta: Lentera Hati, 2010.
- Mudjiono. *Strategi Belajar Mengajar*. Jakarta: Depdikbud Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Proyek Pembinaan Tenaga Kependidikan. 1991/1992.
- Muhaimin dkk., *Strategi Belajar Mengajar “Penerapan dalam Pendidikan Agama”* Surabaya: Citra Media, 1996.
- Muhaimin, *Nuansa Baru Pendidikan Islam Mengurai Benang Kusut Dunia Pendidikan*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2006.
- , *Paradigma Pendidikan Islam, Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah*. Cet. II; Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2007.

- Muhaimin, Rekonstruksi Pendidikan Islam dari Paradigma Pengembangan, Manajemen, Kelembagaan Kurikulum hingga Strategi Pembelajaran. Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.
- Muhammad Ali, *Strategi Penelitian Pendidikan*. Cet. II; Bandung Angkasa, 1993.
- , *Strategi Penelitian Pendidikan*. Cet. II; Bandung Angkasa, 1993.
- Muhammad, A. *Komunikasi Organisasi*. Ed.1, Cet.4, Jakarta: Bumi Aksara, 2001
- Mujahid. Zulfadli, *Kebijakan Sekolah Negeri dan Swasta VS Pendidikan Untuk Semua*.
di <http://edukasi.kompasiana.com/2011/06/04/>.
- Mulyasa, E. *Menjadi Guru Profesional. Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan..*
- Munandar, Utami. *Mengembangkan Bakat dan Kreativitas Anak Sekolah. Petunjuk bagi para guru dan orang tua*. Jakarta: Grasindo, 1992.
- Nana Sudjana, *Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar*. Bandung: Sinar Baru, 1989.
- Nasr, Seyyed Hossein. *The Heart of Islam*, diterjemahkan oleh Nurasia Faqih Sutan Harahap dengan judul, *Pesan-pesan Universal Islam untuk Kemanusiaan*, Bandung; Mizan, 2003.
- Nasution, S. *Metode Research*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Nata, Abuddin *Perspektif Islam Tentang Strategi Pembelajaran*. Cet. I; Jakarta: Kencana, 2009.
- , *Metodologi Studi Islam* Cet. XI, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Nata, Abuddin *Metodologi Studi Islam*, Cet. XI. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Nata, Abuddin, *Manajemen Pendidikan Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di Indonesia*, Cet. I; Jakarta: PT. Prenada Media, 2001

- Natsir, Muhammad. *Capita Selecta*. Bandung : Gravenhage, 1954.
- Nizar, Samsul. *Filsafat Pendidikan Islam, Pendekatan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Ciputat Pers, 1993.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 28.
- Percival dan Ellington, *Teknologi Pendidikan, terjemahan, Sudjarwo*. Jakarta: Erlangga, 1988.
- Pidarta, M. *Manajemen Pendidikan Indonesia*. Edisi Revisi, Jakarta: Bina Aksara, 2008.
- PP RI No.41 tahun 2008 tentang Guru, Bab.I, pasal.3, ayat:7.
- Quillian, *Semantic Memory dalam Minsky (ed), Sematic Information: Processing: Canbridge*. Cet. I; Jakarta: MIT Press.
- Rembangy, Musthofa. *Pendidikan Transformatif Pergulatan Kritis Merumuskan Pendidikan di Tengah Pusaran Arus Globalisasi*. Cet. I; Yogyakarta: Teras, 2010.
- Risma, *Sekolah Negeri dan Swasta : Mari Bersepakat dengan Perbedaan dan Keahluannya* [online] dapat dilihat di <http://blog.intisari-online.com/2011/05/>.
- Rusyan, Tabrani. *Pendekatan dalam Proses Belajar Mengajar*. Bandung: CV. Remaja Karya, 1998.
- Saud, Udin Syaefuddin *Pengembangan Profesi Guru*. Bandung: CV.Alfabeta, 2010.
- Sholeh, Asrorun Ni'am. *Membangun Profesionalitas Guru. Analisis Kronologis atas Lahirnya UU Guru dan Dosen*. Jakarta: Elsas, 2006.
- Slameto, *Belajar dan Faktor yang Mempengaruhinya*. Cet. IV; Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Soedijarto, *Memantapkan Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Gramedia Widiasarana, 1993.
- Soekarwati at. el, *peningkatan Rancangan Intriksional untuk Memperbaiki Kualitas Belajar Megajar*. Cet. I; Malang: Unibraw, 1995.

- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*. Cet. I; Bandung: Rosdakarya, 2006.
- Sulaiman, *Asas-Asas Ilmu Pengetahuan dalam Islam*. Cet.I; Jakarta: Pustaka, 1964.
- Supriadi, *Mengangkat Citra dan Martabat Guru*. Yogyakarta: Adi Cita Karya Nusa, 1999.
- Suryabrata, *Psikologi Kepribadian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Susanto, A. *Pemikiran Pendidikan Islam*. Cet. I: Jakarta: Amzah, 2009.
- Sutadipura, *Kompetensi Guru dan Kesehatan Mental*. Bandung: Angkasa, 1994.
- Suwito dan Fauzan, *Sejarah Sosial Pendidikan Islam*. Cet. I; Jakarta: 2005.
- Suyanto, *Refleksi dan Reformasi Pendidikan di Indonesia*. Cet. I; Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2009.
- Syahidin, *Menelusuri Metode Pendidikan Dalam Alqur'an*. Cet. I; Bandung: Alfabeta, 2009.
- , *Moral dan Kognisi Islam*. Cet. III; Alfabeta: Bandung, 2009.
- Taba H., *Teachers Handbook for Elementary Social Studies*. Reading: Addison Wesley, 1980.
- Tafsir, Ahmad *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994.
- Tilar, H.A.R. *Pendidikan, Kebudayaan, dan Masyarakat Madani Indonesia: Strategi Reformasi Pendidikan Nasional*. Cet. I; Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2005.
- Tohirin, *Psikologi Pembelajaran Pendidikan Islam*. Cet III; Jakarta: Raja Grafindo, 2008.
- Uhbiyati, Nur. *Ilmu Pendidikan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 1997.

- Undang-undang RI No.20 Tahun 2003 *Tentang Sistem Pendidikan Nasional* (Cet. III; Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2006), h. 5-6.
- UU RI No. 20 tahun 2003 *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: BP. Panca Usaha, 2004.
- UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003, pasal 4. Bandung: Citra Umbara, 2004.
- Zaiz, *Curriculum: Principle and Foundation*. New York, Harper Publisher, 1976.
- Zuhairini dkk, *Filsafat Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1995.